

**IMPLEMENTASI PROGRAM PUPUK BERSUBSIDI DI DESA  
KURYOKALANGAN KECAMATAN GABUS KABUPATEN  
PATI TAHUN 2023-2024**

Skripsi  
Program Skripsi (S-1)  
Jurusan Ilmu Politik



Oleh:  
**Alfina Shofiatun Nisa**  
2006016074

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
2024**

## NOTA BIMBINGAN

Lampiran : -  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Ilmu  
Sosial dan Ilmu Politik  
UIN Walisongo Semarang  
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa Skripsi saudara:

Nama : Alfina Shofiatun Nisa  
NIM : 2006016074  
Jurusan : Ilmu Politik  
Judul Skripsi : Implementasi Program Pupuk Bersubsidi Di Desa  
Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati  
Tahun 2023-2024

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 05 Desember 2024  
Pembimbing,



M. Nuqlir Bariklana, M.Si  
NIP. 198505022019031007

**LEMBAR PENGESAHAN**


**SKRIPSI  
IMPLEMENTASI PROGRAM PUPUK BERSUBSIDI DI DESA  
KURYOKALANGAN KECAMATAN GABUS KABUPATEN PATI  
TAHUN 2023-2024**

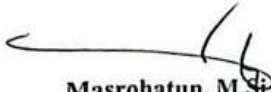
Disusun Oleh:  
**Alfina Shofiatus Nisa**  
2006016074


Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi  
Pada tanggal 19 Desember 2024 dan dinyatakan lulus.

**Susunan Dewan Penguji**

  
**Ketua Sidang**  
**M. Nuqlir Bariklana, M.Si**  
NIP. 198505022019031007

**Sekretaris Sidang**  
  
**Tika Ifrida Takavasa, M.A**  
NIP. 198811152019032018

**Penguji Utama**  
  
**Masrohatun, M.Si**  
NIP. 198806212018012001

**Pembimbing**  
  
**M. Nuqlir Bariklana, M.Si**  
NIP. 198505022019031007

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya Alfina Shofiatun Nisa menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul "IMPLEMENTASI PROGRAM PUPUK BERSUBSIDI DI DESA KURYOKALANGAN KECAMATAN GABUS KABUPATEN PATI TAHUN 2023-2024" yang saya tulis untuk mendapatkan gelar dari Program Sarjana (S-1) ini merupakan hasil penulisan saya sendiri dan tidak ada campur tangan dari pihak luar manapun.

Semarang, 05 Desember 2024



*Alfina Shofiatun Nisa*  
Alfina Shofiatun Nisa  
NIM. 2006016074

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kemurahan Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Implementasi Program Pupuk Bersubsidi di Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati Tahun 2023-2024”. Shalawat serta salam juga penulis haturkan kepada Nabi Muahmmad SAW, pemimpin umat Islam, yang telah membimbing umatnya menuju akhlak mulia serta memiliki intelektualitas yang tinggi. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S.Sos) pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Pada kesempatan ini, dalam proses penyusunan skripsi ini penulis banyak menerima bantuan, dukungan, dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan dan menyelesaikan studi Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, Selaku Dekan FISIP Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si Selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Sekaligus Dosen Pembimbing penulis yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan dukungan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Solkhah Mufrikhah M. Si, selaku Wali Dosen penulis yang telah memberikan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
5. Seluruh jajaran Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan berbagai ilmu dan pengalamannya sehingga dapat bermanfaat dan sangat berguna bagi penulis.
6. Seluruh Civitas Akademik dan Staf Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
7. Seluruh informan, Bapak Hayyin, Bapak Widodo, Bapak Kamijan, Bapak Ali Musthofa, Bapak Ahmad Fakih, BapK Darno, Bapak Jumani yang men jadi data

dan membantu penelitian di Desa Kuryokalangan sebagai desa penelitian. Tak lupa kepada Bapak Bapak Surya selaku Dinas Pertanian Pati dan Ibu Enny selaku Penyuluh Pertanian Kecamatan Gabus telah menerima dan mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan memberika segala informasi yang dibutuhkan untuk memeperoleh data menyelesaikan skripsi. Semoga kebaikan dan ilmu yang diberikan membawa manfaat yang lebih luas.

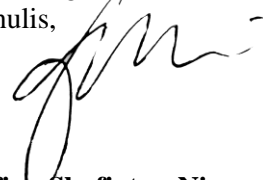
8. Teristimewa (Alm) Bapak Sholikin yang telah menjadi sosok penuh kebijaksanaan dalam hidup penulis. Keberadaan dan kasih sayang dan nilai – nilai hidup yang selalu senantiasa beliau tanamkan menjadi obor penerang dalam setiap langkah penulis dan Ibu Siti Nurhidayati yang tiada henti memberikan kasih saying dan keiklasan, pengorbanan, cinta yang tiada henti. Kelembutan hati dan kekuatan yang Ibu tunjukkan menjadi inspirasi terbesar dalam hidup penulis.
9. Terkasih kakak laki – laki Ahmad Suyuti Ikhsan S.Ag, atas dukungan, inspirasi, dan teladan yang senantiasa diberikan. Kehadiran serta motivasi yabg Kakak berikan telah menjadi semangat dalam proses penulis dalam melesaikan karya ini. Dan kepada Adik Ahmad Riza Fatkhul Muiz, yang selalu memberikan keceriaan dan dukungan dengan caranya sendiri. Keceriaanya menjadi semangat dan pengingat bagi penulis untuk terus maju memberikan yang terbaik. Serta Nenek Marsih yang telah meberikan perhatian, dan do'a serta nasehatnya di perjalanan hidup penulis.
10. Taufan Satyawiguna, S.Pd. sebagai teman, keluarga, sahabat yang selalu memberi dukungan, semangat, dan perhatian sepanjang proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan bantuan yang diberikan sangat berarti dalam memperlancar setiap tahapan penelitian dan penulisan. Tanpa kontribusi dan kesabaran yang ditunjukkan, penyelesaian skripsi ini akan terasa jauh lebih berat. Terima kasih telah menjadi sumber motivasi dan kekuatan dalam perjalanan akademik ini.
11. Teman – teman dekat seperjuangan suka duka selama di Semarang Latiana, Aqila Latifah, Bintang, Selma, Ida, Dini, Putri, Aribayana, Aprilia, Chela. Semoga tidak hanya jadi masa kuliah namun tali pertemanan terus sampai selamanya hingga jadi manusia dan tidak lupa dengan teman perkuliahan.
12. Keluarga Besar Pangkas Nusantara, tanpa tempat kerja ini saya tidak akan survive sendiri dengan kondisi yang ada di tempat ini, penulis merasakan betul menjadi kelas pekerja serta kepekaan sosial bertambah terhadap kondisi kelas pekerja di Kota Semarang.

13. Teman- teman Program Studi Ilmu Politik terutama untuk kelas Politik C angkatan 2020 UIN Walisongo Semarang atas pengalaman dan kebersamaanya dalam melewati masa-masa sukses diluar sana dan meraih apa yang telah kita cita - citakan.
14. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membatu memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini, dan menjadi bagian dalam perjalanan penulis untuk menyelesaikan studi ini sampai selesai.

Penulis menyadari betul bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan walau bagaimanapun penulis berusaha memberikan yang terbaik. Penulis menerima kritik dan saran dengan kelapangan hati, demi tercapainya hal terbaik dari penelitian ini. Penulis menerima kritik dan saran dengan kelapangan hati, demi tercapainya hal terbaik dari penelitian ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya. Ahir kata penulis ucapkan terimakasih atas segala perhataian yang berikan.

Semarang, 05 Desember 2024

Penulis,



**Alfina Shofiatun Nisa**

NIM. 2006016074

## **PERSEMBAHAN**

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan segala syukur Allah SWT Pencipta Alam Semesta

Karya ini saya persembahkan kepada

Kedua orang tua, Bapak Sholikin (alm) dan Ibu Siti Nurhidayati yang selalu menjadi sumber inspirasi yang selalu memberikan do'a, dukungan, dan cinta yang tak terhingga.

Semoga skripsi ini dapat menjadi bukti bahwa segala do'a dan perjuangan kalian tidak sia-sia. Terima kasih untuk segala kasih sayang dan keyakinan yang telah kalian berikan dan mendorong penulis untuk terus maju dan meraih impian.

**MOTTO**

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri – sendiri” – Hindia

“Sebab KETAKUTAN ADALAH ILUSI, dan kita adalah manusia merdeka!” -

Megawati Soekarnoputri

## ABSTRAK

Pertanian memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia, terutama di wilayah pedesaan, di mana mayoritas penduduknya menggantungkan hidup pada sektor ini. Salah satu kebijakan utama pemerintah untuk mendukung produktivitas dan kesejahteraan petani adalah subsidi pupuk, yang bertujuan menjaga stabilitas harga, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan hasil panen. Namun, implementasi kebijakan ini di tingkat lapangan sering menghadapi tantangan, seperti keterlambatan distribusi, ketidaktepatan sasaran penerima, dan kendala teknis dalam penggunaan Kartu Tani. Desa Kuryokalangan, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, sebagai salah satu daerah dengan potensi pertanian tinggi, juga menghadapi masalah serupa. Oleh karena itu, penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan program subsidi pupuk di Desa Kuryokalangan tersebut dengan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dari program implementasi kebijakan oleh teori Merilee. S. Grindle, yang mencakup dua perspektif yaitu, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks kebijakan (*context of implementation*).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus guna melihat proses implementasi serta pelaksanaan program pupuk bersubsidi di Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati. Data dalam penelitian dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program subsidi pupuk di Desa Kuryokalangan masih menghadapi beberapa kendala. Dari sisi isi kebijakan, permasalahan utama adalah adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan petani dan jumlah pupuk yang disediakan. Dari sisi konteks implementasi, ditemukan bahwa koordinasi antaraktor yang terlibat belum optimal, daya tanggap petani terhadap kebijakan masih rendah, dan pengawasan dalam distribusi pupuk bersubsidi perlu ditingkatkan.

**Kata Kunci :** Implementasi kebijakan, Pupuk Subsidi, Pertanian

### **ABSTRACT**

*Agriculture plays an important role in the Indonesian economy, especially in rural areas, where the majority of the population depends on this sector for their livelihood. One of the government's main policies to support farmer productivity and welfare is fertilizer subsidies, which aim to maintain price stability, reduce production costs, and increase yields. However, the implementation of this policy at the field level often faces challenges, such as late distribution, inaccurate targeting of recipients, and technical constraints in the use of Farmer Cards. Kuryokalangan Village, Gabus District, Pati Regency, as one of the areas with high agricultural potential, also faces similar problems. Therefore, this study evaluates the implementation of the fertilizer subsidy program in the village by identifying the inhibiting factors of the policy implementation program by Merilee's theory. S. Grindle, which includes two main dimensions, namely the content of policy and the implementation environment (context of implementation).*

*This study uses a qualitative method with a case study approach to see the implementation process and implementation of the subsidized fertilizer program in Kuryokalangan Village, Gabus District, Pati Regency. Data in the study were collected through in-depth interviews, observations, and related document studies. The results of the study showed that the implementation of the fertilizer subsidy program in Kuryokalangan Village still faced several obstacles. In terms of policy content, the main problem was the mismatch between farmers' needs and the amount of fertilizer provided. In terms of the implementation environment, it was found that coordination between the actors involved was not optimal, farmers' responsiveness to policies was still low, and supervision in the distribution of subsidized fertilizers needed to be improved.*

**Keywords:** *Policy Implementation, Subsidized Fertilizer, Agriculture*

## DAFTAR ISI

<b>NOTA BIMBINGAN</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	3
E. Tinjauan Pustaka .....	4
F. Metode Penelitian .....	6
G. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b> .....	<b>12</b>
A. Definisi Konseptual .....	12
1. Implementasi kebijakan .....	12
2. Program pupuk bersubsidi .....	13
3. Peningkatan Produktifitas Pertanian .....	14
B. Landasan Teori.....	16
1. Tahapan Kebijakan Publik .....	16
2. Model Kebijakan Publik .....	18
3. Implementasi Kebijakan .....	19
4. Implementasi Kebijakan Grindle .....	20
C. Kerangka Berfikir .....	23
<b>BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN</b> .....	<b>25</b>
A. Gambaran Umum Desa Kuryokalangan .....	25
B. Sejarah Desa Kuryokalangan .....	25
C. Kondisi Geografis .....	26

D. Kondisi Demografis .....	26
E. Visi dan Misi Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.....	27
F. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati .....	29
G. Gambaran Sawah Desa Kuryoakalangan .....	30
<b>BAB IV PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PUPUK BERSUBSIDI DI DESA KURYOKALANGAN KECAMATAN GABUS KABUPATEN PATI.....</b>	<b>33</b>
A. Kebijakan Pupuk Bersubsidi .....	33
B. Identifikasi Stakeholder .....	41
C. Proses Implementasi Program Pupuk Subsidi.....	49
D. Analisis Isi Kebijakan (Contect of Policy).....	56
<b>BAB V ANALISIS KONTEKS KEBIJAKAN PROGRAM PUPUK BERSUBSIDI DI DESA KURYOKALANGAN KECAMATAN GABUS KABUPATEN PATI ....</b>	<b>72</b>
A. Konteks Kebijakan ( <i>Context of Policy</i> ).....	72
B. Faktor Pendukung Implementasi Program Pupuk Bersubsidi Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati .....	78
C. Faktor Penghambat Implementasi Program Pupuk Bersubsidi Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati .....	82
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B.Saran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>92</b>
A. Dokumen Wawancara .....	92
B. Identitas Diri .....	100
C. Riwayat Pendidikan .....	100

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Infortman.....	8
Tabel 2 Jumlah Penduduk Desa Kuryokalangan .....	26
Tabel 3 Sebaran Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin.....	26
Tabel 4 Jenis Mata Pencaharian Penduduk .....	27
Tabel 5 Tingkat Pendidikan.....	27
Tabel 6 Luas Tanah .....	30
Tabel 7 Jenis Tanaman.....	30
Tabel 8 Kelompok Tani Desa Kuryokalangan.....	32
Tabel 9 HET Pupuk Subsidi .....	39
Tabel 10 Alokasi Pupuk Subsidi Jawa Tengah .....	39
Tabel 11 Alokasi Pupuk Bersubsidi Kabupaten Pati 2023.....	40
Tabel 12 Alokasi Pupuk Bersubsidi Kabupaten Pati 2024.....	40
Tabel 13 Alokasi Pupuk Subsidi Kec. Gabus 2023 .....	41
Tabel 14 Alokasi Pupuk Subsidi Kec. Gabus 2024 .....	41
Tabel 15 Alokasi Pupuk Subsidi Desa Kuryokalangan 2023 .....	41
Tabel 16 Alokasi Pupuk Subsidi Desa Kuryokalangan 2024 .....	41
Tabel 17 Alokasi Pupuk Kabupaten Pati 2023.....	69
Tabel 18 Alokasi Pupuk Kabupaten Pati 2024.....	69

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1 Kerangka Tahapan Kebijakan Publik .....</b>	<b>17</b>
<b>Gambar 2 Model Institusi Kebijakan .....</b>	<b>18</b>
<b>Gambar 3 Kerangka Berfikir Teori Implementasi Kebijakan Grindle (1980) .....</b>	<b>24</b>
<b>Gambar 4 Struktur Organisasi.....</b>	<b>29</b>
<b>Gambar 5 Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi .....</b>	<b>37</b>
<b>Gambar 6 Penyaluran Pupuk Bersubsidi.....</b>	<b>38</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam struktur perekonomian Indonesia, pertanian mempunyai peran yang penting terutama di wilayah pedesaan. Mayoritas penduduk Indonesia mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian utama. Menyadari pentingnya sektor ini, pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan untuk mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani. Salah satu kebijakan utama yang terus dilaksanakan adalah pemberian subsidi pupuk. Kebijakan subsidi pupuk bertujuan untuk menjaga kestabilan harga pupuk bagi petani, mengurangi biaya produksi, dan pada akhirnya meningkatkan hasil panen.

Sejak tahun 1970-an, kebijakan subsidi pupuk telah menjadi bagian integral dari upaya pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian. Subsidi pupuk memungkinkan petani kecil dan menengah memperoleh pupuk dengan harga terjangkau yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga ketahanan pangan nasional, serta membuat kesejahteraan petani meningkat. Namun meskipun kebijakan ini sudah berlangsung lama, masih terdapat berbagai masalah dan tantangan dalam pelaksanaannya, terutama di tingkat lapangan (Hani, 2024).

Kabupaten Pati, yang dikenal sebagai salah satu lumbung padi di Provinsi Jawa Tengah, yang menempati urutan ke-5 sebagai penghasil komoditas padi pada tahun 2023 (BPS Povinsi Jawa Tengah, 2023). Kecamatan Gabus, sebagai bagian dari Kabupaten Pati adalah wilayah yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Desa Kuryokalangan, salah satu desa di Kecamatan Gabus, mempunyai potensi pertanian yang cukup tinggi, terutama dalam produksi padi dan palawija. Namun tantangan utama yang dihadapi petani di Kuryokalangan adalah keterbatasan akses terhadap pupuk bersubsidi, yang sangat diperlukan untuk meningkatkan produksi pertanian mereka.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian, telah mengembangkan berbagai program distribusi pupuk bersubsidi. Namun di lapangan, implementasi program ini tidak selalu berjalan mulus. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di beberapa desa Kecamatan Gabus, peneliti menemukan permasalahan yang cukup menarik di desa ini terkait distribusi pupuk bersubsidi. Masalah-masalah ini meliputi ketidaktepatan sasaran penerima subsidi, keterlambatan distribusi pupuk, hingga kelangkaan pupuk yang sering kali dialami petani pada musim tanam yang krusial. Selain itu penerapan Kartu Tani yang

seharusnya memudahkan proses distribusi dan pengawasan pupuk subsidi, masih mengalami banyak kendala teknis maupun administratif.

Salah satu kendala yang sering muncul dalam implementasi program subsidi pupuk adalah kurangnya pemahaman petani terkait penggunaan Kartu Tani. Kartu Tani merupakan instrumen penting dalam kebijakan distribusi pupuk bersubsidi yang diluncurkan pemerintah untuk memastikan bahwa pupuk subsidi hanya diberikan kepada petani yang berhak. Namun, di beberapa daerah termasuk Desa Kuryokalangan, penggunaan Kartu Tani masih belum optimal. Banyak petani yang belum terbiasa menggunakan kartu ini dalam proses pembelian pupuk, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengadaan pupuk. Selain itu sering kali terdapat masalah teknis pada sistem elektronik yang mendukung Kartu Tani yang semakin memperburuk situasi.

Isu lain yang muncul adalah ketidaktepatan alokasi pupuk bersubsidi. Pupuk bersubsidi seharusnya hanya disalurkan kepada petani yang memiliki luas lahan tertentu yang sesuai dengan kriteria pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan ketidaksesuaian petani dalam penerimaan pupuk subsidi seperti adanya petani yang berlebih dalam penerimaan pupuk subsidi, sementara petani lain yang juga berhak justru kesulitan mengaksesnya. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam pengawasan dan distribusi pupuk di tingkat lokal, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas kebijakan tersebut.

Permasalahan ini semakin mempertegas pentingnya kajian lebih mendalam mengenai implementasi program subsidi pupuk di Desa Kuryokalangan, Kecamatan Gabus. Penelitian ini perlu dilaksanakan untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya implementasi program ini, serta upaya yang tepat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Secara lebih luas, penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi bagi evaluasi dan perbaikan kebijakan subsidi pupuk di tingkat nasional, sehingga distribusi pupuk bersubsidi dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi petani.

Adapun urgensi dari penelitian ini juga didukung oleh pentingnya peran pupuk dalam keberlangsungan sektor pertanian. Pupuk adalah salah satu input utama dalam produksi pertanian yang sangat mempengaruhi hasil panen. Tanpa akses yang memadai terhadap pupuk, terutama pupuk bersubsidi yang harganya lebih terjangkau, petani akan kesulitan untuk meningkatkan produktivitas lahan mereka. Hal ini pada gilirannya dapat mengancam ketahanan pangan nasional serta menurunkan kesejahteraan petani di pedesaan.

Selain itu, penelitian ini juga relevan dengan kebijakan pemerintah yang terus berupaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam distribusi pupuk bersubsidi melalui

penerapan sistem digital seperti Kartu Tani. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai efektivitas implementasi kebijakan subsidi pupuk di tingkat desa serta menawarkan solusi untuk mengatasi kendala yang ada.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini akan difokuskan pada evaluasi implementasi program subsidi pupuk di Desa Kuryokalangan, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan program subsidi pupuk di tingkat lokal, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalannya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam membuat distribusi dan pemanfaatan pupuk bersubsidi di desa tersebut meningkat, serta menjadi acuan bagi pengambil kebijakan di tingkat yang lebih tinggi.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan masalah tentang bagaimana Implementasi kebijakan program pupuk Bersubsidi di Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati yang ditinjau dari perspektif bagaimana konten kebijakan dan konteks kebijakan.

#### **C. Tujuan Penelitian**

Perumusan masalah dalam penelitian ini didasari oleh latar belakang yang dijelaskan sebelumnya. Menganalisis implementasi kebijakan publik terkait dengan Program Pupuk Bersubsidi di Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, serta berbagai faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan program. Oleh karena itu, pemecahan masalah penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Program Pupuk Bersubsidi di Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian terbagi menjadi dua yakni manfaat secara teoritis dan secara praktis, dijabarkan sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu politik, khususnya terkait dengan teori implementasi kebijakan. Studi ini akan menambah wawasan mengenai bagaimana kebijakan subsidi pupuk dikelola dan diimplementasikan ditingkat lokal, serta tantangan yang dihadapi.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dikaji sebagai referensi dan pembelajaran, khususnya bagi peneliti serta bagi pembaca umum dan masyarakat sebagai warga Negara yang berhak mengakses informasi.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan tinjauan literature sebelum melakukan penelitian. Tinjauan ini melibatkan pengumpulan informasi dari penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas. Tujuan dari tinjauan literatur ini adalah untuk memahami berbagai sudut pandang dalam penelitian sebelumnya, sehingga penulis dapat menentukan posisi dan kontribusi penelitian yang sedang dilakukan. Berikut ini adalah kajian pustaka dari penelitian ini

#### **1. Implementasi Program Pupuk Subsidi**

Implementasi program subsidi sebagai salah satu instrumen kebijakan publik yang bertujuan untuk mendukung sektor pertanian, khususnya dalam distribusi pupuk bersubsidi. Program subsidi memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pupuk dikalangan petani, serta menjadi alat-alat intervensi pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Namun, implementasi program ini tidak lepas dari tantangan, seperti kebocoran subsidi, distribusi yang tidak merata, dan ketidaktepatan sasaran.

Dalam penelitian *“Implementasi Program Kartu Tani dalam Distribusi Pupuk Bersubsidi”* oleh Suhamah, Emy, Sumantry, dan Kosasih (2024). Upaya pemerintah dalam menciptakan program Kartu Tani di Kec. Tinggimoncong, Desa Bugel menunjukkan hasil yang cukup positif. Program ini mengharuskan petani yang tergabung dalam kelompok tani untuk mengajukan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sesuai kebutuhan mereka, dengan distribusi pupuk subsidi yang diatur berdasarkan luas lahan dan kuota yang ditetapkan (Suhamah, 2024).

Selanjutnya penelitian berjudul *“Implementasi Kebijakan Program Kartu Tani untuk Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang Tahun 2021”* oleh Riki, Abdul, Wawan Setiawan Abdullah (2022). Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi program kartu tani di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Pakisjaya telah melaksanakan program tani dengan baik, meskipun mengalami kendala dalam aksesibilitas akibat mesin EDC yang sering eror untuk penebus pupuk bersubsidi. Industri pupuk bersubsidi telah tersebar secara merata hampir mencapai 100%. Meskipun distribusi kartu tani belum sepenuhnya mencapai 100% akibat kendala birokrasi yang kompleks, hal tersebut tidak menjadi hambatan. Proses distribusi pupuk bersubsidi tetap dapat berjalan

karena seluruh petani telah terdaftar dalam RDKK. Frekuensi program kartu tani dan distribusi pupuk bersubsidi sudah cukup memadai, dan tidak ditemukan penyimpangan dalam penentuan target kelompok sasaran. Ketetapan layanan dan akuntabilitas program juga terjaga dengan baik oleh petani, serta petani mendapatkannya dalam penggunaan data dan dana sesuai regulasi (Riki R. A., 2022).

Selanjutnya penelitian berjudul *“Implementasi Program Kartu Tani dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi”* oleh Chakim dan Lutfil (2019). Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan kartu tani masih belum mencapai hasil yang maksimal dan tujuan yang diharapkan. Berbagai masalah yang dihadapi antara lain kurangnya sosialisasi kepada petani, sehingga banyak yang belum memahami cara memanfaatkan kartu tani, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam memberikan pelayanan yang maksimal, serta implementasi kartu tani yang belum berjalan sepenuhnya dikarenakan adanya kendala seperti masih banyak petani yang belum mempunyai kartu tani, kehilangan kartu tani, serta jaringan yang tidak stabil, yang menyebabkan proses penebusan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani memakan waktu lebih lama, dan terbatasnya prasarana yang ada (Chakim, 2019).

Penelitian selanjutnya berjudul *“Pendistribusian Pupuk Bersubsidi di Tingkat Petani Kecamatan Buay Pemuka Peliung dari Segi Ketetapan Tempat, Jumlah, Harga, Jenis, Waktu dan Mutu”* oleh Wening, Muslihah, dan Irman (2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Buay Pemuka Peliung, OKU Timur, terkait enam tepat (tepat harga, mutu, jenis, jumlah, waktu, dan tempat) masih membutuhkan perbaikan dan pengawasan lebih lanjut agar kebijakan subsidi pupuk dapat memberikan manfaat maksimal untuk petani (Tyas, 2024).

## **2. Masalah - Masalah Program Pupuk Bersubsidi**

Dalam penelitian berjudul *“Program Kartu Tani: Analisis Hambatan dari Perspektif Interest Group di Kab. Majalengka Tahun 2020-2023”* oleh Hafiih (2024). Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat bias politik dan Tindakan curang yang dilakukan oleh kelompok kepentingan, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat yang mendukung kios pengecer dan Lurah dalam menjual pupuk subsidi di luar wilayah yang seharusnya. Selain itu, terdapat berbagai hambatan dalam implementasi Kartu Tani, seperti tumpang tindih kewenangan di antara pelaksana kebijakan. Hambatan lain termasuk kesulitan dalam mengakses Kartu Tani, seperti proses perbaikan mesin EDC yang memakan waktu lama dan kerumitan dalam perbaikan Kartu Tani yang rusak, karena prosesnya terlalu kompleks dan tidak dapat diwakilkan oleh pihak bank (Anbiya, 2024).

Selanjutnya ada penelitian yang berjudul “*Problematika Implementasi Program Kartu Tani di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian Kec. Bonang Kab. Demak*” oleh Ahmad, Wahid, Siwi, Kadhung (2021), Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak menunjukkan pelaksanaan program Kartu Tani telah mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan, namun terdapat kendala teknis dan non-teknis pada setiap tahapan pelaksanaannya. Kompleksitas masalah yang muncul dalam program ini terus diupayakan untuk diatasi oleh pihak pelaksana kebijakan, dengan dukungan peningkatan minat petani terhadap program tersebut. Terdapat beberapavariabel yang memengaruhi pelaksanaan program Kartu Tani di wilayah ini, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel ini saling terkait dan memiliki pengaruh terhadap keberhasilan implementasi program (Gayatri, 2021).

Hasil telaah peneliti terhadap kedua kajian pustaka tersebut mengidentifikasi bahwa adanya perbedaan signifikan dengan penelitian yang akan dijalankan. Penelitian ini akan mengeksplorasi penerapan program pupuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada di Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan mengikuti beberapa langkah metode yang telah dirancang oleh peneliti. Berikut penjelasan mengenai metode yang digunakan:

##### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana data yang dikumpulkan dan disajikan berupa kata atau gambar, bukan angka. Sebagaimana dijelaskan Bogdan & Taylor (1992), menjelaskan bahwa metode ini menghasilkan data deskriptif yang berupa pernyataan lisan atau tertulis, yang diperoleh dari individu atau perilaku yang diamati. Analisis data dilakukan secara *non-matematis*, dengan tujuan mengungkap temuan melalui berbagai metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menurut John W. Creswell (2015), menambahkan bahwa pendekatan studi kasus sering digunakan dalam penelitian ini untuk menyelidiki peristiwa atau permasalahan yang telah terjadi, dengan tujuan mengumpulkan informasi untuk menemukan solusi untuk mengatasi masalah yang ada.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), karena memerlukan pengumpulan data secara langsung. Peneliti terlibat secara langsung dalam observasi dan interaksi dengan petani di Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus, Pemerintah di Desa Kuryokalangan, Distributor pupuk Desa Kuryokalangan, dan Kelompok Tani di Desa

Kuryokalangan untuk memahami penerapan kebijakan Pemerintah Pusat tentang subsidi pupuk.

## **2. Sumber dan Jenis Data**

Menurut Suharsimi Artikunto (2002), sumber data dalam penelitian adalah subjek atau pihak yang memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Data penelitian berupa data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan langsung dari objek penelitian melalui observasi dan wawancara, sehingga data ini bersifat langsung dan asli. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui sumber yang ada seperti jurnal, buku atau situs internet yang menyediakan informasi relevan dengan topik penelitian.

Data primer bersumber dari informan Kantor Desa Kuryokalangan, petugas distributor pupuk di Desa Kuryokalangan, para petani dan Kelompok Tani di Desa Kuryokalangan. Data Sekunder meliputi RDKK dan literatur -literatur terkait yang mendukung peneliti.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informan. Peneliti akan menggunakan tiga teknik untuk mengumpulkan data penelitian, yaitu:

### **a. Observasi**

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung atau tidak langsung. Observasi memungkinkan peneliti mendapatkan data yang berkaitan dengan keadaan sebenarnya di lapangan dan memahami perilaku serta kondisi lingkungan di wilayah penelitian. Dalam konteks penelitian ini di Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati. Sehingga observasi menjadi penting dilakukan untuk memahami tentang kondisi sosial ekonomi, budaya, dan lingkungan masyarakat setempat.

### **b. Wawancara**

Dalam penelitian yang fokus pada implementasi mengenai program pengelolaan pupuk bersubsidi bagi petani di Desa Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, salah satu pendekatan yang diterapkan untuk mengumpulkan data adalah melalui metode wawancara.

Dalam penelitian ini teknik wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data utama. Wawancara dilakukan secara langsung kepada petani di Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus, Pemerintah Desa Kuryokalangan, Distributor Subsidi Pupuk di Desa Kuryokalangan, dan Kelompok Tani di Desa Kuryokalangan. Teknik wawancara ini akan memberikan data kualitatif yang berharga dalam memahami

persepsi, pengalaman, dan pandangan para pemangku kepentingan teknik dengan implementasi kebijakan pupuk bersubsidi di Desa Kuryokalangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan dan pencatatan data sekunder mengenai peristiwa yang sudah terjadi. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, rekaman audio, maupun karya monumental lainnya. Dalam konteks penelitian ini, dokumen yang relevan adalah kebijakan pemerintah pusat tentang tata kelola pupuk bersubsidi, laporan evaluasi, dan dokumentasi terkait distribusi di Desa Kuryokalangan. Dokumen-dokumen ini akan memberikan informasi yang diperlukan untuk menganalisis implementasi program pupuk bersubsidi di tingkat lokal.

#### 4. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah individu yang diharapkan dapat memberikan data secara objektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Informan yang dipilih adalah petugas Dinas pertanian, penyuluh pertanian, pemerintah Desa Kuryokalangan, pengecer pupuk, kelompok tani, pegiat pertanian di Desa Kuryokalangan, dan petani. Peneliti memilih Dinas pertanian, penyuluh pertanian, pemerintah Desa Kuryokalangan, pengecer pupuk, kelompok tani, pegiat pertanian di Desa Kuryokalangan, dan petani karena mereka memiliki informasi yang relevan dan mendalam terkait pelaksanaan distribusi pupuk subsidi, sekaligus berperan sebagai pelaksana program tersebut. Selain itu, masyarakat penerima manfaat program juga menjadi informan, karena mereka adalah pihak yang merasakan langsung hasil dari distribusi pupuk subsidi. Untuk menentukan informan, peneliti menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik pemilihan sampel yang dilakukan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu.

Tabel 1 Data Informan

No.	Nama Informan	Jabatan
1	Muda Surya Wirawan, SP	Ketua Tim Pupuk dan Pembiayaan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
2	Eny Prasetyowati BL, S.P	Koordinator Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Gabus
3	Hayyin Nu'mah S.H	Sekretaris Desa Kuryokalangan
4	Slamet Widodo	Ketua Kelompok Tani
5	Kamijan	Pengecer Pupuk Resmi

6	Ali Mustofa	Petani Sekaligus Pegiat Pertanian Desa Kuryokalangan
7	Ahmad Fakhri	Petani Desa Kuryokalangan
8	Darno	Petani Desa Kuryokalangan
9	Jumani	Petani Desa Kuryokalangan
10	Siti	Petani Desa Kuryokalangan

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode yang dipakai untuk mengolah data menjadi informasi yang lebih mudah untuk dipahami, sehingga dapat membantu dalam mencari solusi atas permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Teknik ini melibatkan pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi). Pendekatan ini bersifat induktif, dimana analisis dilakukan dengan fokus pada pola-pola yang muncul dari data yang dikumpulkan. Proses analisis kualitatif mengutamakan pemahaman mendalam terhadap proses dan makna yang terkandung dalam data.

Menurut Miles dan Huberman (1984) terdapat tiga kegiatan analisis data yang berjalan bersamaan, yaitu:

### a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menajamkan, pengelompokkan, mengarahkan, dan menyederhanakan kata dan membuang kata yang tidak perlu yang diperoleh dari catatan tertulis di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada tahap ini peneliti akan memusatkan perhatian pada data hasil wawancara dengan petani di Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus, pemerintah Desa Kuryokalangan, distributor subsidi pupuk di Desa Kuryokalangan dan Kelompok tani di Desa Kuryokalangan. Data yang didapat melalui wawancara tersebut diteliti kembali oleh penulis apakah data yang didapat sudah benar dan tidak ada kesalahan, maka data tersebut dianalisis secara deskriptif untuk memastikan validitas yang objektif dari hasil penelitian.

### b. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman, penyajian data merupakan proses pengorganisasian informasi secara sistematis sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian yang terstruktur, data dapat lebih mudah dipahami dan dianalisis, memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola atau

temuan penting yang mendukung dalam membuat keputusan atau tindakan yang relevan dengan hasil penelitian.

c. Hasil analisis

Hasil analisis ini merupakan langkah akhir dalam proses analisis data. Berdasarkan data yang sudah direduksi dan disajikan, peneliti merumuskan kesimpulan yang didukung oleh bukti yang kuat dari data yang telah terkumpulkan. Dalam penelitian ini, hasil yang diperoleh dari analisis data digunakan untuk memahami bagaimana implementasi program pupuk bersubsidi di Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi, sistematika penulisan menjadi hal yang sangat penting dan tidak bisa ditinggalkan, sebab hal ini akan menunjukkan garis besar dari keseluruhan penulisan skripsi disetiap bab yang salingberkaitan. Pada penelitian ini penulis akan membagi ke dalam lima bab dan setiap babnya memiliki relevansi pada setiap bagian yang diteliti dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman isi skripsi secara keseluruhan dengan lebih mudah dan jelas.

#### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini berisi bagian pendahuluan yang terdiri dari berbagai unsur penting yang menjadi landasan penelitian. Berisi penjelasan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah yang ingin dipecahkan, tujuan yang akan dicapai melalui penelitian ini, dan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian. Selain itu, bab ini juga menyajikan tinjauan pustaka yang berfungsi sebagai landasan teori, penjelasan metode penelitian yang digunakan, dan terakhir, sistematika penulisan skripsi yang akan menjadi pedoman penelitian secara keseluruhan.

#### **BAB II Kerangka Teori**

Bab kedua memaparkan teori-teori yang relevan dengan objek penelitian, yang dalam hal ini akan mengkaji teori implementasi yang dikemukakan oleh tokoh Grindle. Penyusunan kerangka teori dilakukan berdasarkan aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian.

#### **BAB III Gambaran Objek Penelitian**

Bab ketiga dalam penelitian ini menyajikan gambaran umum mengenai objek penelitian yang akan diteliti. Uraian tersebut mencakup berbagai aspek seperti kondisi geografis, demografi, sosial budaya, pendidikan, ekonomi, serta struktur politik institusi di wilayah tersebut. Penelitian ini fokus di Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati

dengan tujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai situasi di wilayah yang menjadi objek penelitian.

#### **BAB IV Proses Implementasi Kebijakan Program Pupuk Bersubsidi di Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati**

Bab keempat ini memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan untuk menjawab rumusan masalah penelitian bagaimana implementasi program pupuk bersubsidi di Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati dengan konteks kebijakan oleh Teori Merille S. Grindle.

#### **Bab V Analisis Konteks Kebijakan Program Pupuk Bersubsidi di Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati**

Bab kelima ini memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan untuk menjawab rumusan masalah penelitian bagaimana implementasi program pupuk bersubsidi di Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati dengan konteks kebijakan oleh Teori Merille S. Grindle serta apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi pupuk bersubsidi di Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.

#### **BAB VI Penutup**

Bab ini menyajiakan kesimpulan dari penelitian berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan. Saran diberikan untuk pemangku kebijakan, petani, dan peneliti selanjutnya, dengan tujuan memperbaiki implementasi program pupuk bersubsidi dan memberikan arahan untuk penelitian di masa depan.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **A. Definisi Konseptual**

Secara konseptual, kebijakan publik mencakup studi tentang administrasi Negara dengan dua fokus utama, yaitu “apa” dan “bagaimana” yakni “Apa” mengacu pada pihak atau entitas yang bertanggung jawab, sementara “bagaimana” berhubungan dengan metode atau prinsip yang digunakan untuk melakukan rencana secara efektif dan kolaboratif.

Menurut Lislle, kebijakan merupakan tindakan pemerintah yang dirancang untuk mengatasi masalah tertentu. Hal ini selaras dengan pandangan Thomas Dye yang menyatakan bahwa kebijakan publik mencakup semua keputusan yang diambil atau tidak diambil oleh pemerintah. Anderson menambahkan bahwa kebijakan publik memiliki tujuan spesifik yang dirancang untuk menyelesaikan masalah tertentu. (Patarai, 2020).

#### **1. Implementasi kebijakan**

Implementasi kebijakan adalah proses penerapan keputusan atau kebijakan yang telah dirancang untuk menyelesaikan permasalahan tertentu di masyarakat. Tahapan ini merupakan langkah penting dalam siklus kebijakan karena menjadi jembatan yang menghubungkan antara kebijakan yang dirumuskan di atas kertas dengan hasil nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Proses ini tidak hanya melibatkan pelaksanaan teknis, tetapi juga menuntut koordinasi serta partisipasi dari pihak-pihak yang terlibat.

Pada dasarnya, implementasi kebijakan adalah proses dinamis yang melibatkan berbagai elemen, mulai dari aktor pelaksana, sumber daya, hingga lingkungan sosial dan politik yang memengaruhi keberhasilannya. Pemerintah sering kali menjadi pemimpin utama dalam implementasi kebijakan, namun pelaksanaannya juga melibatkan berbagai pihak lain, seperti lembaga lokal, organisasi masyarakat, dan individu. Keterlibatan semua pihak ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan bisa berjalan sesuai rencana serta bermanfaat untuk masyarakat.

Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya dapat berupa anggaran, tenaga kerja, informasi, atau teknologi yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan tersebut. Tanpa sumber daya yang memadai, kebijakan yang dirancang dengan baik sekalipun dapat mengalami hambatan dalam

pelaksanaannya. Selain itu, pentingnya komunikasi yang baik juga tidak dapat diabaikan. Semua pihak yang terlibat harus memahami tujuan kebijakan, langkah-langkah pelaksanaan, dan peran mereka masing-masing agar kebijakan dapat diterapkan secara efektif.

Namun, implementasi kebijakan sering kali menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan antara perumusan kebijakan di tingkat pusat dan kebutuhan nyata di tingkat lokal. Kebijakan yang tidak disesuaikan dengan kondisi lokal berisiko sulit diimplementasikan dan tidak memberikan dampak yang diinginkan. Selain itu, hambatan lain bisa datang dari resistensi pelaksana atau masyarakat yang belum memahami sepenuhnya manfaat kebijakan tersebut.

Oleh karena itu, fleksibilitas dalam pelaksanaan sering kali menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan. Kebijakan harus mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan dinamika lokal tanpa mengorbankan tujuan utamanya. Pelibatan masyarakat dan pendekatan yang partisipatif juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas implementasi. Dengan melibatkan masyarakat sebagai mitra dalam pelaksanaan kebijakan, penerimaan terhadap kebijakan tersebut cenderung lebih tinggi, sehingga tujuan yang diharapkan lebih mudah tercapai.

Proses implementasi tidak hanya berfokus dengan bagaimana kebijakan dijalankan, namun juga pada evaluasi terhadap hasil yang dicapai. Implementasi yang baik adalah yang tidak hanya menghasilkan tindakan konkret, namun juga dampak positif yang berkelanjutan untuk masyarakat. Keberhasilan implementasi kebijakan menjadi tolok ukur apakah kebijakan yang dirumuskan sudah relevan dan efektif dalam menjawab permasalahan yang ada. Dengan demikian, implementasi kebijakan tidak hanya menjadi bagian dari proses administratif, tetapi juga wujud nyata dari upaya pemerintah dalam menciptakan perubahan yang berarti di tengah masyarakat.

## 2. Program pupuk bersubsidi

Program pupuk bersubsidi adalah kebijakan pemerintah yang dirancang untuk mendukung sektor pertanian dengan menyediakan pupuk pada harga yang lebih terjangkau daripada harga pasar. Subsidi ini diberikan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan menjaga keseimbangan ekonomi petani. Program ini dirancang sebagai bagian dari usaha pemerintah dalam mencapai ketahanan pangan nasional, dengan memastikan ketersediaan pupuk yang memadai dan

terjangkau bagi petani. Subsidi diberikan berdasarkan alokasi yang ditentukan dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), yang merupakan dokumen resmi yang menyebutkan kebutuhan pupuk bagi setiap kelompok tani berdasarkan luas lahan dan jenis komoditas yang ditanam. Program ini diatur dalam berbagai regulasi, seperti Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur jenis pupuk bersubsidi, jumlah alokasi, mekanisme distribusi, dan sasaran penerima manfaat.

Dalam pelaksanaannya, program pupuk bersubsidi melibatkan beberapa pihak utama, termasuk sebagai berikut:

- a. Dinas Pertanian sebagai regulator dan pengawas program di tingkat kabupaten atau kota.
- b. Penyalur pupuk (distributor dan pengecer resmi) yang bertugas mendistribusikan pupuk kepada petani sesuai kuota yang telah ditentukan.
- c. Kelompok tani yang menyusun RDKK dan berperan sebagai penghubung antara petani dan penyedia pupuk.
- d. Penyuluh pertanian yang memberikan edukasi kepada petani mengenai penggunaan pupuk secara efisien dan sesuai kebutuhan.

Pupuk yang disubsidi mencakup beberapa jenis, seperti urea, NPK, NPK Formula Khusus, pupuk organik dengan komposisi yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan spesifik tanah dan tanaman. Program ini diatur dalam berbagai regulasi, seperti Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur jenis pupuk bersubsidi, jumlah alokasi, mekanisme distribusi, dan sasaran penerima manfaat.

Namun program pupuk bersubsidi tidak terlepas dari tantangan seperti ketidaktepatan sasaran penerima akibat data yang tidak akurat, keterlambatan distribusi pupuk di wilayah tertentu, serta kurangnya pemahaman petani tentang aplikasi pupuk yang sesuai dengan kondisi tanah dan tanaman.

### 3. Peningkatan Produktifitas Pertanian

Peningkatan produktivitas pertanian merupakan upaya strategis untuk memastikan bahwa sektor pertanian mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terus bertambah, tanpa harus memperluas lahan pertanian secara signifikan. Fokus dari upaya ini adalah memaksimalkan hasil panen melalui pemanfaatan sumber daya yang ada secara efisien, baik itu berupa lahan, air, pupuk, benih, maupun tenaga kerja. Dalam konteks pembangunan pertanian, peningkatan produktivitas tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kuantitas hasil, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekosistem serta kesejahteraan petani.

Produktivitas pertanian yang tinggi menunjukkan kemampuan sistem pertanian menghasilkan lebih banyak output dengan input yang sama atau bahkan lebih sedikit. Hal ini sangat penting mengingat tantangan besar yang dihadapi sektor pertanian, seperti keterbatasan lahan subur, perubahan iklim, degradasi tanah, serta kebutuhan untuk menghasilkan pangan yang cukup bagi populasi yang terus bertambah. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan teknologi, kebijakan, pendidikan petani, serta pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana.

Teknologi modern memainkan peran penting dalam upaya ini. Penggunaan alat-alat mekanis, irigasi cerdas, dan sistem berbasis digital, seperti Internet of Things (IoT), telah terbukti meningkatkan efisiensi dalam proses pertanian. Selain itu, benih unggul yang tahan terhadap hama dan cuaca ekstrem, serta pemupukan yang tepat guna, dapat mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Kombinasi teknologi dengan praktik pertanian yang baik juga mampu menjaga kesuburan tanah dan mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan.

Selain teknologi, peningkatan produktivitas juga bergantung pada keterampilan dan pengetahuan petani. Edukasi mengenai praktik pertanian berkelanjutan, seperti penggunaan pupuk organik, rotasi tanaman, serta pengelolaan hama yang ramah lingkungan, sangat diperlukan untuk mengoptimalkan hasil pertanian. Keterampilan petani dalam mengadopsi teknologi modern dan memahami dinamika pasar juga menjadi kunci penting dalam mendukung produktivitas yang lebih baik.

Namun, peningkatan produktivitas pertanian tidak hanya bergantung pada upaya individual petani. Dukungan dari pemerintah, seperti pemberian subsidi pupuk, pembangunan infrastruktur irigasi, dan akses terhadap kredit usaha tani, memainkan peran yang signifikan. Kebijakan yang berpihak pada petani kecil, seperti penyediaan akses terhadap teknologi dan pasar yang lebih luas, mampu mendorong peningkatan produktivitas secara kolektif.

Selain itu, peningkatan produktivitas pertanian harus tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Praktik pertanian yang tidak berkelanjutan, seperti penggunaan pupuk kimia secara berlebihan atau eksploitasi lahan tanpa perbaikan, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dalam jangka panjang. Dengan demikian, pendekatan yang seimbang antara peningkatan produktivitas dan konservasi sumber daya alam harus menjadi prioritas dalam pembangunan sektor pertanian.

Dengan memastikan bahwa setiap elemen dalam sistem pertanian berjalan secara optimal, peningkatan produktivitas tidak hanya berkontribusi untuk pemenuhan kebutuhan pangan, namun juga pada peningkatan pendapatan petani dan stabilitas ekonomi di sektor agraris. Upaya ini menjadi langkah strategis untuk mencapai ketahanan pangan nasional dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat luas

## **B. Landasan Teori**

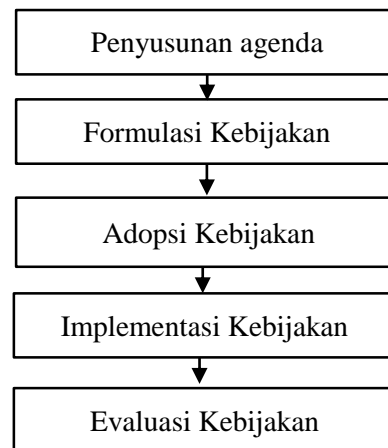
### **1. Tahapan Kebijakan Publik**

Kebijakan publik dalam pembuatannya memerlukan berbagai aspek yang kompleks dan memerlukan pertimbangan dari banyak faktor. Sejumlah ahli politik menyusun dan membagi terkait proses pembuatan kebijakan berdasarkan sudut pandang mereka guna memudahkan analisisnya. Menurut William Dunn, tahapan-tahapan dalam pembuatan kebijakan publik dapat dijelaskan sebagai berikut: Tahap pembuatan kebijakan publik menurut William Dunn dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Penyusunan Agenda:** Tahap ini, para pemangku kepentingan meninjau isu-isu yang akan menjadi prioritas dalam agenda publik. Berbagai masalah bersaing untuk memperoleh atensi dan menjadi prioritas utama. Tidak semua masalah akan dibahas, hanya yang terpilih yang akan menjadi fokus utama. Tahap ini sangat krusial karena menetapkan arah dan prioritas dalam pengembangan kebijakan publik yang akan dirumuskan.
- b. **Formulasi Kebijakan:** Setelah isu-isu yang dipilih dimasukkan ke dalam agenda, langkah berikutnya adalah merumuskan kebijakan. Para pembuat kebijakan melakukan analisis dan mengidentifikasi berbagai alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan untuk diadopsi. Di tahap ini, juga dilakukan evaluasi terhadap dampak dan resiko masing-masing alternatif, serta melibatkan konsultasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa solusi yang diambil adalah paling efektif.
- c. **Adopsi Kebijakan:** Dari berbagai pilihan kebijakan yang tersedia, atau di antaranya akan dipilih sebagai kebijakan resmi. Pengesahan ini bisa melalui dukungan mayoritas dalam lembaga legislative, kesepakatan antara pemimpin lembaga terkait, atau keputusan pengadilan. Pada tahap ini, kebijakan diumumkan secara resmi, dan komunikasi serta sosialisasi yang efektif menjadi penting agar kebijakan bisa diterima dan dipahami oleh masyarakat luas.

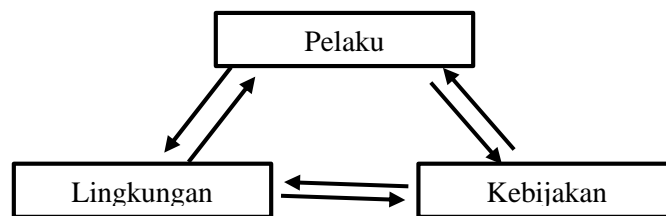
- d. Implementasi Kebijakan: Setelah kebijakan disetujui, langkah selanjutnya adalah tahap pelaksanaan kebijakan melalui unit pelaksana teknis yang ditunjuk pemerintah di lapangan. Dinamika pasti terjadi dengan berbagai pro dan kontra dalam pelaksanaan suatu kebijakan, ada pihak mendukung penerapan kebijakan, sementara yang lain mungkin menolak. Ini merupakan tahap nyata dari pelaksanaan kebijakan publik, sehingga diperlukan koordinasi dan pengawasan yang baik antara semua pihak yang terlibat.
- e. Evaluasi Kebijakan: Ini merupakan tahap final dengan tujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan yang sudah ditetapkan apakah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Setiap kebijakan memiliki tolak ukur yang telah disepakati sebelumnya untuk mengukur keberhasilan kebijakan tersebut. kinerja dan efektivitas kebijakan publik dievaluasi dan hasil dari evaluasi tersebut memberikan masukan serta rekomendasi untuk perbaikan atau revisi kebijakan bila dibutuhkan.

Gambar 1 Kerangka Tahapan Kebijakan Publik



## 2. Model Kebijakan Publik

Dalam pandangan Thomas Dye (dalam Said, 2016), model institusi dalam kebijakan publik menekankan bahwa kebijakan publik adalah hasil keputusan yang diambil oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menyusunnya. Lembaga-lembaga ini, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, memiliki otoritas dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan yang bersifat mengikat bagi seluruh warga negara dan lembaga pemerintah lainnya. Model ini menitikberatkan pada hubungan baik antara masyarakat dan pemerintah yang baik, karena keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada komunikasi dan interaksi yang efektif antara keduanya.



Gambar 2 Model Institusi Kebijakan

Ilustrasi tersebut menggambarkan adanya hubungan saling bergantung antara pelaksanaan kebijakan dan faktor-faktor disekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan harus taat pada kebijakan yang telah ditetapkan, namun keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada dukungan dari lingkungan sekitar.

Dalam teori kebijakan publik, terdapat berbagai model yang dapat digunakan untuk memahami bagaimana kebijakan dibuat, diimplementasikan, dan dievaluasi. Berikut adalah beberapa model kebijakan publik yang sering digunakan:

Salah satu model yang sering dibahas adalah model rasional, yang mengedepankan analisis logis dan sistematis. Model ini bertujuan untuk mencari solusi yang paling optimal dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya. Namun, pendekatan ini sering kali menghadapi kendala dalam praktik, seperti keterbatasan data atau waktu.

Berbeda dengan model rasional, model inkremental menawarkan pendekatan yang lebih realistis. Kebijakan dibuat secara bertahap melalui penyesuaian kecil terhadap kebijakan yang sudah ada. Model ini cocok digunakan

ketika pembuat kebijakan ingin meminimalkan risiko atau mengakomodasi berbagai kepentingan.

Selain itu, ada model kelompok, yang menyoroti pentingnya peran kelompok kepentingan dalam proses kebijakan. Dalam model ini, kebijakan dipandang sebagai hasil dari negosiasi atau kompromi antara berbagai kelompok dengan kepentingan yang berbeda. Model ini memperlihatkan bahwa kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh aktor-aktor eksternal yang memiliki pengaruh besar.

Di sisi lain, model elit menekankan bahwa kebijakan seringkali dibuat oleh kelompok elit yang memiliki kekuasaan atau pengaruh. Dalam model ini, kepentingan masyarakat umum sering kali menjadi perhatian sekunder, karena kebijakan lebih banyak mencerminkan preferensi kelompok elit tersebut.

Model sistem memberikan pandangan yang holistic dengan menggambarkan kebijakan sebagai respons sistem politik terhadap masukan dari masyarakat. Masukan ini berupa tuntutan atau dukungan yang kemudian diproses oleh lembaga-lembaga pemerintah untuk menghasilkan kebijakan. Model ini menunjukkan hubungan dinamis antara masyarakat, pemerintah, dan lingkungan eksternal.

Selain itu, terdapat model institusional, yang menyoroti peran lembaga formal dalam pembentukan kebijakan, dan model pilihan publik, yang melihat pembuat kebijakan sebagai individu rasional yang berupaya memaksimalkan kepentingannya sendiri. Kedua model ini memberikan perspektif yang berbeda mengenai aktor dan struktur dalam proses kebijakan.

Keseluruhan model kebijakan ini menunjukkan bahwa proses kebijakan tidak bersifat statis, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti dinamika masyarakat, interaksi aktor, dan perubahan lingkungan. Dengan demikian model-model ini, pembuat kebijakan dapat memilih pendekatan yang paling sesuai untuk menciptakan kebijakan yang efektif, adil, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

### 3. Implementasi Kebijakan

Beberapa ahli memberikan definisi tentang implementasi, menurut Kamus Webster, menjelaskan implementasi adalah “melakukan untuk menyediakan sarana pelaksanaan untuk memberikan efek praktis” (Solihin Abdul Wahab, 2015). Dalam hal ini, implementasi merujuk pada proses pelaksanaan kebijakan yang umumnya

diwujudkan melalui undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, atau dekrit presiden.

Pressman dan Wildavsky mengartikan implemmentasi sebagai “tindakan yang sangat terkait dengan kebijakan.” Menurut mereka, implementasi merupakan tahap krusial dalam pelaksanaan kebijakan yang memerlukan perhatian dan pengawasan yang diteliti agar dapat berjalan dengan efektif.

Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa implementasi mencakup “berbagai aktivitas yang dilakukan oleh individu, aparat pemerintah, atau kelompok, baik dari sektor publik maupun swasta, dalam rangka mewujudkan tujuan dari sebuah kebijakan”.

Sementara itu, Mazmanian dan Sabatier mengungkapkan bahwa implementasi adalah “pelaksanaan kebijakan utama yang biasanya berupa undang-undang, namun juga bisa berupa perintah eksekutif atau keputusan pengadilan”.

Eugene Bardach, seorang pakar kebijakan, mendefinisikan implementasi sebagai upaya yang tidak hanya merancang program yang baik secara teoritis, namun juga mengkomunikasikan dan melaksanakan program tersebut dengan memuaskan bagi seluruh pihak, termasuk penerima manfaat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan rangkaian aktivitas yang bertujuan merealisasikan rencana yang sudah dirancang. Keberhasilan proses implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai elemen pendukung, dengan pemimpin memiliki peranan penting untuk mengarahkan dan mengawasi jalannya pelaksanaan.

#### 4. Implementasi Kebijakan Grindle

Implementasi adalah yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan (Ali, 2017). Pengertian ini sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn yang menjelaskan bahwa implementasi mencakup keterlibatan individu atau kelompok dari sektor publik ataupun swasta dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan (Herabudin, 2016). Dengan demikian, implementasi adalah realisasi dari keputusan yang pemerintah tetapkan.

Dalam analisis implementasi kebijakan, terdapat tiga perspektif utama:

- a. Perspektif pertama berfokus pada penilaian keberhasilan pelaksanaan kebijakan, termasuk faktor pendukung dan hambatan yang mempengaruhi.

- b. Perspektif kedua menyoroti peran pelaksana, yaitu institusi atau pihak yang bertanggung jawab memastikan kebijakan diterapkan dengan efektif di lapangan.
- c. Perspektif ketiga berasal dari kelompok sasaran, yang mengevaluasi dampak kebijakan dalam memberikan perubahan positif dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara berkelanjutan.

Beberapa ahli memberikan pandangan terkait implementasi kebijakan, salah satunya adalah Merilee S. Grindle. Menurut Grindle, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh isi kebijakan dan tiga elemen utama yang mendukung proses tersebut. Elemen-elemen atau komponen tersebut mencakup sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan sebagai berikut:

- a. Konten kebijakan, yang meliputi:
  - 1) Ketersediaan dana dan sumber daya;
  - 2) Sanksi yang diterapkan;
  - 3) Tingkat pemahaman tentang kebijakan.
- b. Kredibilitas kebijakan, yang mencakup:
  - 1) Kejelasan kebijakan;
  - 2) Konsistensi kebijakan;
  - 3) Frekuensi penyampaian kebijakan;
  - 4) Penerimaan oleh pihak terkait.
- c. Bentuk kebijakan, yang melibatkan:
  - 1) Efisiensi kebijakan;
  - 2) Partisipasi masyarakat;
  - 3) Jenis kebijakan yang digunakan.

Menurut Grindle, menjelaskan bahwa penyusunan kebijakan mengikuti kebijakan yang telah disampaikan, dengan keberhasilan yang bergantung pada tingkat "*implementability*" atau kemampuan untuk diterapkan, yang terdiri dari dua variabel utama:

- a. Isi kebijakan (*Content of Policy*)
  - 1) Kepentingan yang mempengaruhi (*Interest Effected*), Implementasi kebijakan selalu berkaitan dengan kepentingan tertentu, dan keberhasilannya dapat diukur berdasarkan sejauh mana kepentingan tersebut mempengaruhi proses pelaksanaan.

- 2) Jenis manfaat (*Type of Benefits*), Kebijakan harus memberikan manfaat yang bisa diterima oleh masyarakat penerima, secara langsung maupun tidak langsung.
  - 3) Derajat perubahan yang diinginkan (*Extent of Change Envision*), setiap kebijakan mempunyai target yang harus dicapai, dan keberhasilan implementasi diukur dari besarnya perubahan yang dihasilkan dan pencapaian target yang jelas.
  - 4) Letak pengambilan keputusan (*Site of Decision Making*), pengambilan keputusan yang tepat sangat penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan
  - 5) Pelaksana program (*Program Implementer*), keberhasilan kebijakan tergantung pada kompetensi para aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program. Kebijakan harus menyebutkan secara rinci siapa yang bertanggung jawab sebagai implementator.
  - 6) Sumber daya yang tersedia (*Resources Committed*), keberhasilan kebijakan juga bergantung pada ketersediaan sumber daya yang memadai untuk mendukung pelaksanaannya.
- b. Konteks Kebijakan (*Context of Policy*)
- 1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat (*Power, Interest and Strategy of Actor Involved*), jika ada kekuatan politik yang berkepentingan, mereka akan menyusun strategi untuk mencapai hasil sesuai harapan.
  - 2) Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa (*Institution and Regime Characteristic*). Pelaksanaan kebijakan sering kali memunculkan potensi konflik di antara berbagai pihak yang berkepentingan. Dalam situasi ini, pertanyaan mengenai siapa yang memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut dapat menjadi gambaran tidak langsung tentang karakter lembaga atau rezim yang mengelola kebijakan tersebut.
  - 3) Tingkat kepatuhan dan respons pelaksana (*Compliance and Responsiveness*), keberhasilan kebijakan sangat bergantung dengan tingkat kepatuhan serta respons dari kelompok sasaran kebijakan. Respon positif terhadap kebijakan menandakan bahwa pelaksanaan kebijakan telah berjalan sesuai harapan dan dapat membawa perubahan yang diinginkan (Muhtadi, 2020).

Grindle (1980) menyatakan bahwa kesuksesan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel utama:

a. Isi kebijakan dan konteks implementasi

Faktor dalam isi kebijakan meliputi berbagai elemen seperti pihak yang terdampak, manfaat yang dihasilkan, cakupan perubahan yang diharapkan, posisi pembuat kebijakan, pelaksana program, serta ketersediaan sumber daya. Sementara itu, konteks implementasi mencakup aspek seperti kekuasaan, kepentingan, strategi para aktor, karakter lembaga dan rezim yang berkuasa, serta tingkat kepatuhan dan respons terhadap kebijakan.

b. Dampak (*Impact*)

Dampak kebijakan mencakup manfaat program, perubahan yang terjadi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan dapat dilihat melalui:

- 1) Kepatuhan terhadap arahan atasan.
- 2) Pelaksanaan yang berjalan lancar tanpa hambatan berarti
- 3) Pencapaian hasil yang memuaskan bagi semua pihak terkait.

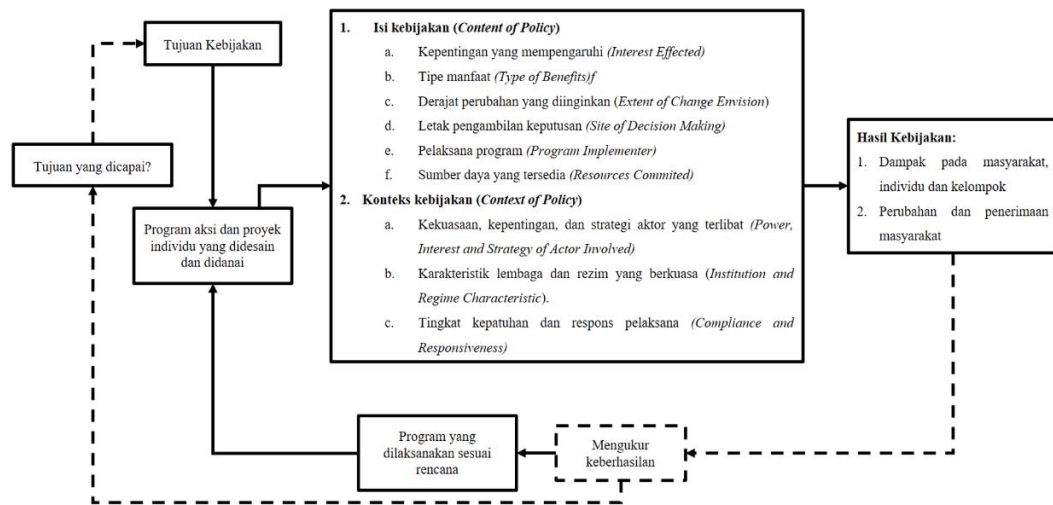
Sebaliknya, kegagalan dalam implementasi dapat terjadi karena:

- 1) Ketidakjelasan kebijakan, termasuk kurangnya ketegasan atau sumber daya pendukung.
- 2) Informasi yang terbatas sehingga pelaksana tidak memahami kebijakan secara menyeluruh.
- 3) Minimnya dukungan dari berbagai pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan.

**C. Kerangka Berfikir**

Peneliti mengadopsi teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Merilee S. Grindle untuk mengavulasi tingkat keberhasilan pengembangan program pupuk subsidi di Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati. Dalam teori Grindle, terdapat dua variabel yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan.

Gambar 3 Kerangka Berfikir Teori Implementasi Kebijakan Grindle (1980)



Sumber: Model S. Merilee S. Grindle, Samodra Wibawa, (1994:23)

1. Isi kebijakan (*Content of Policy*)
  - a. Kepentingan yang mempengaruhi (*Interest Effected*)
  - b. Tipe manfaat (*Type of Benefits*)
  - c. Derajat perubahan yang diinginkan (*Extent of Change Envisioned*)
  - d. Letak pengambilan keputusan (*Site of Decision Making*)
  - e. Pelaksana program (*Program Implementors*)
  - f. Sumber daya yang tersedia (*Resources Committed*)
2. Konteks kebijakan (*Context of Policy*)
  - a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat (*Power, Interest and Strategies of Actor Involved*)
  - b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa (*Institution and Regime Characteristic*).
  - c. Tingkat kepatuhan dan respons pelaksana (*Compliance and Responsiveness*)

### **BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Kuryokalangan**

Desa Kuryokalangan merupakan sebuah pemerintahan administratif yang berbentuk desa yang berlokasi di Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Indonesia. Terletak di kaki Gunung Muria dengan latar belakang Pegunungan Kendeng disebelah selatan. Desa ini menawarkan pemandangan alam yang menawan. Selain itu, Desa Kuryokalangan berada di jalur strategis Jalan Raya Gabus-Tlogoayu KM.02, Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, yang membuat desa ini mudah diakses. Posisinya yang strategis, dengan pemandangan alam yang indah serta berbatasan dengan desa-desa lain yang mendukung interaksi antarwilayah.

Desa Kuryokalangan terbagi menjadi dua wilayah atau dukuh, yaitu Kuryo dan Kalangan. Nama desa ini merupakan gabungan dari kedua dukuh tersebut, dengan Kuryo terletak di bagian selatan dan Kalangan di bagian utara. Kedua wilayah ini berdampingan dan membentuk satu kesatuan administratif Desa Kuryokalangan.

#### **B. Sejarah Desa Kuryokalangan**

Desa Kuryokalangan memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan penyebaran Islam di Jawa. Berdasarkan cerita para sesepuh nama “Kalangan” muncul dari kejadian di masa lalu. Pada abad ke-18 M, seorang murid Sunan Muria bernama Singgo Joyo berperan dalam penyebaran Islam, terutama di wilayah pesisir utara Jawa. Singgo Joyo menetap di daerah yang kini dikenal sebagai Kuryokalangan, yang saat itu masih berupa hutan belantara tanpa penduduk. Ia membuka lahan di wilayah tersebut menggunakan gaman, namun gamannya hilang selama proses tersebut, sehingga daerah itu dinamakan “Kalangan,” yang berasal dari kata Jawa "kelangan," yang berarti kehilangan.

Di Dukuh Kalangan, terdapat mitos yang dipercaya oleh warga. Sebelum menikah, calon pengantin pria mengikuti tradisi "Mubeng Asem," yaitu mengelilingi pohon asem sebagai penghormatan terhadap adat setempat. Tradisi ini berawal dari kebiasaan istri Singgo Joyo yang senang melihat pengantin, sehingga mempelai pria diminta untuk mengitari pohon asem di dekat rumahnya saat ada pernikahan.

Selain itu, warga juga melestarikan tradisi “manganan,” yaitu hajatan sederhana yang disertai doa dan tahlilan. Manganan dilakukan saat seseorang mempunyai hajat atau keinginan, dengan harapan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Tradisi ini dianjurkan oleh Singgo Joyo untuk mendorong masyarakat bersedekah dan berbagi rezeki.

### C. Kondisi Geografis

Secara geografis Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati memiliki batas-batas wilayah dengan beberapa desa lainnya, yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mojolawaran
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sugihrejo
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bogotanjung
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kedalingan, Kecamatan Tambakromo

### D. Kondisi Demografis

Berikut adalah kondisi demografi di Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati:

1. Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Desa Kuryokalangan

Data per Juli 2024

Tabel 2 Jumlah Penduduk Desa Kuryokalangan

Kategori	Jumlah
Total Penduduk	3.067 jiwa
Jumlah Kepala Keluarga (KK)	1008 KK

2. Penyebaran Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Data per Juli 2024

Tabel 3 Sebaran Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur (tahun)	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	138	149	287
5 – 9	148	117	265
10 – 14	93	102	195
15 – 19	95	102	197
20 – 24	137	152	289
25 – 29	136	147	283
30 – 39	227	218	445
40 – 49	155	178	333
50 – 59	255	258	513
60 ke atas	115	145	260
<b>Jumlah</b>	<b>1499</b>	<b>1568</b>	<b>3067</b>

### 3. Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Kuryokalangan

Data Tahun 2024

Tabel 4 Jenis Mata Pencaharian Penduduk

<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Jumlah (orang)</b>
Petani Sendiri	795
Buruh Tani	75
Nelayan	-
Buruh Industri/Pabrik	57
Buruh Bangunan	105
Pedagang	136
Sopir/Kondektur/Kernet	12
PNS/TNI/Polri	51
Pensiunan/Purnawirawan	10
Pengusaha/Wiraswasta	75
Pegawai Swasta/Karyawan Perusahaan	127
Jumlah	1.443

### 4. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Kuryokalangan

Data Tahun 2024

Tabel 5 Tingkat Pendidikan

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah (orang)</b>
Belum Sekolah	248
Tidak Sekolah (tidak Pernah Sekolah)	15
Tidak Tamat SD	215
Tamat SD/Sederajat	853
Tamat SLTP/Sederajat	573
Tamat SLTA/Sederajat	981
Tamat SMK	62
Tamat Akademik	29
Tamat Sarjana (S1,S2&S3)	43
Jumlah	3019

### E. Visi dan Misi Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati

Desa Kuryokalangan memiliki visi dan misi yang jelas untuk mengembangkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih. Berikut adalah visi dan misi Desa Kuryokalangan:

### **1. Visi Desa Kuryokalangan**

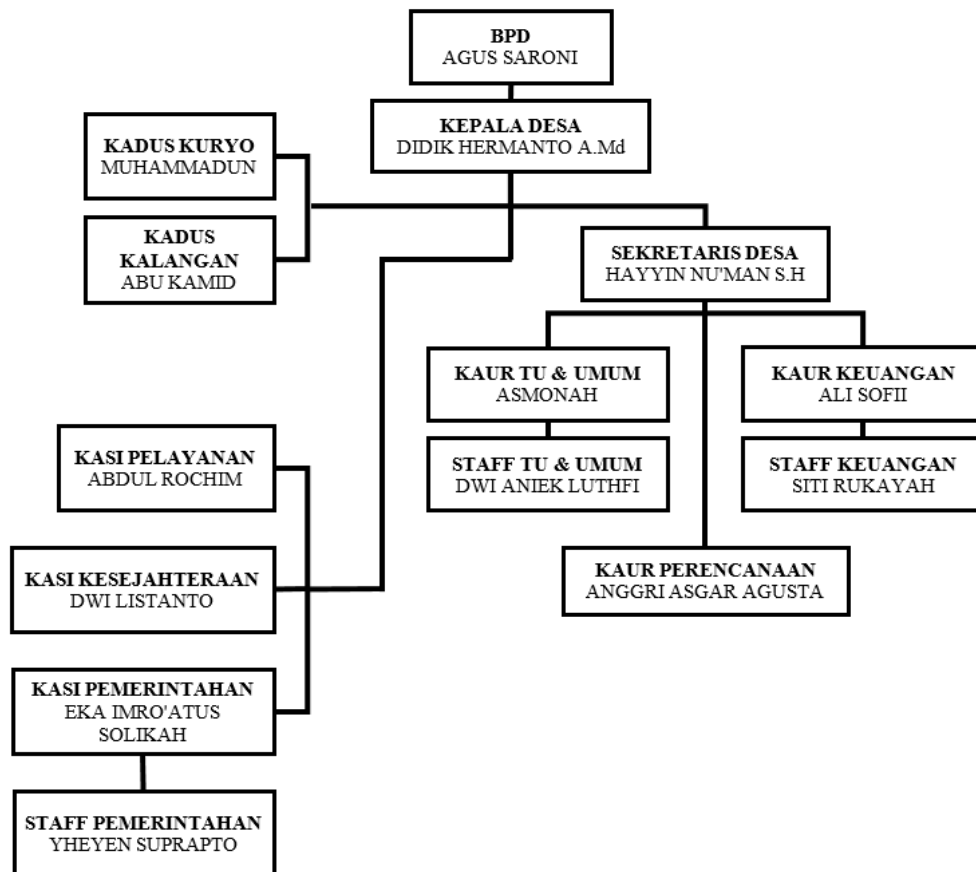
Terbangunnya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih guna mewujudkan Desa Kuryokalangan yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat.

### **2. Misi Desa Kuryokalangan**

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, demokratis, dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya.
- b. Memberdayakan lembaga desa sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
- c. Meningkatkan pembangunan di segala bidang.
- d. Meningkatkan pelayanan masyarakat dengan semboyan: “Kalau bisa cepat, kenapa harus lambat? Kalau bisa mudah, kenapa harus sulit? Kalau bisa murah, kenapa harus mahal?”
- e. Menanamkan nilai-nilai religius dan kearifan lokal melalui program pengembangan nilai-nilai spiritual dan adat istiadat.
- f. Mewujudkan sistem usaha mandiri melalui program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- g. Menumbuhkan peran pemuda dalam menyalurkan ide, berkreasi melalui olahraga, kesenian, hingga wirausaha.

## F. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati

Gambar 4 Struktur Organisasi



### G. Gambaran Sawah Desa Kuryoakalangan

Desa Kuryoakalangan terletak di Kecamatan Gabus Kabupaten Pati Jawa Tengah. Desa ini memiliki wilayah yang didominasi oleh lahan pertanian, khususnya sawah. Mayoritas penduduk di desa ini bekerja sebagai petani sehingga sawah menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat.

#### 1. Luas dan Kondisi Tanah

Luas lahan pertanian di Desa Kuryoakalangan kisaran mencapai 152 Ha yang seluruhnya digunakan untuk usaha tanaman pangan. Luas lahan di wilayah Desa Kuryoakalangan menurut penggunaannya secara lengkap disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6 Luas Tanah

No.	Jenis Lahan	Luas (Ha)
	<b>Sawah</b>	
1	Irigasi Teknis	100
2	Irigasi ½ Teknis	-
3	Irigasi Sederhana	-
4	Tadah Hujan	52
	<b>Jumlah</b>	152

Lahan sawah di Desa Kuryoakalangan memiliki luas yang cukup signifikan dengan topografi yang cenderung datar membuatnya cocok untuk budidaya tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai.

Berikut disajikan data mengenai jenis tanaman, luas tanam, luas panen, rata-rata produktivitas dan jumlah produksi di Desa Kuryoakalangan:

Tabel 7 Jenis Tanaman

Jenis Tanaman	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Rata-Rata Prod. (Ha)	Jumlah Produksi (Kg)
Padi	126	126	6,5	819
Jagung	67	67	4,0	268
Kacang Tanah	5	5	0,5	2
Kacang Hijau	78	78	0,2	16
Kedelai	8	5	0,5	2
Tebu	4	4	125, 0	500
Sayuran	-	-	-	-
Buah – Buah	3	2	0,3	1

Sebagaimana besar sawah di desa ini adalah sawah tadah hujan, sehingga produktivitasnya sangat dipengaruhi oleh pola curah hujan. Pada musim hujan, petani memaksimalkan hasil panen, namun pada musim kemarau, beberapa sawah petani tidak dapat diolah akibat keterbatasan sumber air.

Selain itu, sebagian sawah di desa ini memanfaatkan irigasi sederhana yang berasal dari saluran air kecil di sekitar desa. Namun sistem irigasi ini belum mampu mencakup seluruh lahan sawah secara merata. Kondisi ini menyebabkan pola tanam petani sangat bergantung pada kondisi cuaca, sehingga sering kali hasil panen menjadi tidak stabil.

## 2. Kualitas Tanah

Kondisi tanah sawah di Desa Kuryokalangan secara umum masih tergolong cukup subur, tetapi sebagian menunjukkan penurunan kualitas akibat penggunaan pupuk kimia seperti urea yang berlebihan telah meningkatkan kemasaman tanah (pH rendah), terutama setelah beberapa musim tanam berturut-turut.

Untuk mengatasi permasalahan ini, sebagian petani telah mulai menerapkan metode penggunaan pupuk organik. Salah satu inisiatif yang dilakukan oleh kelompok tani di desa ini, seperti kelompok tani “Makmur” adalah pemanfaatan limbah pertanian, seperti jerami, dan dedaunan untuk diolah menjadi kompos. Salah satu inovasi yang cukup populer adalah penggunaan Biosaka, sebuah teknologi organik yang berbasis bahan alami. Biosaka dibuat dengan pemanfaatan campuran tumbuhan disekitar sawah seperti dedaunan segar. Langkah ini bertujuan untuk menjaga kesuburan tanah sekaligus mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia.

## 3. Pola Tanam dan Komoditas Utama

Mayoritas petani di Desa Kuryokalangan menanam padi pada musim hujan. Tanaman ini dipilih karena menjadi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. Sedangkan pada musim kemarau, petani biasanya menanam tanaman lain seperti jagung, kacang tanah, atau palawija, yang lebih tahan pada kekurangan air.

Sebagian petani juga menerapkan pola sistem tanam bergilir atau tumpang sari, seperti menanam jagung atau kacang secara bersamaan. Cara ini dianggap lebih efisien untuk memaksimalkan hasil panen dan menjaga tanah tetap produktif karena hal ini dapat menjaga kesuburan tanah dengan memperkaya unsur hara secara alami.

## 4. Sistem Pengolahan Sawah

Pengelolaan sawah di Desa Kuryokalangan umumnya dikelola oleh petani secara mandiri, tetapi dengan dukungan dari kelompok tani seperti “Makmur” dan “Subur”.

Kelompok tani membantu petani dalam mengatur jadwal tanam, pembagian pupuk subsidi, dan memeberikan pelatihan sederhana terkait teknik bertani. Selain itu juga Dinas Pertanian Kabuapten Pati juga memberikan kontribusi dalam bentuk penyuluhan dan program subsidi pupuk. Berikut adalah gambaran tentang kelompok tani yang ada di Desa Kuryokalangan:

Tabel 8 Kelompok Tani Desa Kuryokalangan

Nama Kelompok Tani	Jumlah Anggota (Petani)	Komoditas Utama
Makmur	179 orang	Padi, jagung, kedelai
Subur	149 orang	Padi, jagung, kedelai

**BAB IV**  
**PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PUPUK**  
**BERSUBSIDI DI DESA KURYOKALANGAN KECAMATAN GABUS**  
**KABUPATEN PATI**

**A. Kebijakan Pupuk Bersubsidi**

Suatu program pemerintah pasti dalam pelaksanaannya diatur oleh kebijakan agar program yang dijalankan sesuai dengan harapan dan manfaat dari program tersebut. Program pupuk bersubsidi diatur dalam kebijakan-kebijakan dari berbagai tingkatan mulai dari pusat hingga daerah. Berikut adalah kebijakan yang mengatur jalannya program pupuk bersubsidi.

**1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian**

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2024 ini merupakan perubahan atas Pementan Nomor 10 Tahun 2022 tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sektor pertanian. Dalam revisi peraturan ini terdapat penambahan pupuk organik dalam pengalokasiannya. Selain itu perubahan selanjutnya yakni penetapan anggaran pupuk bersubsidi dilakukan setelah penetapan volume yang diputuskan dalam Rapat Tingkat Menteri terkait yang dipimpin oleh Menko Perekonomian. Permentan nomor 01 tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 05 April 2024. Peraturan menteri ini berisi semua tentang program ini mulai dari bagaimana pemerintah mengatur dan menetapkan pengalokasian pupuk subsidi diatur dalam peraturan ini. Peraturan ini menjelaskan bahwa penerima pupuk bersubsidi adalah petani warga negara Indonesia baik perseorangan atau bersama keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, atau perkebunan. Usaha tani di bidang tanaman pangan meliputi padi, jagung dan kedelai. Usaha tani dibidang hortikultura adalah cabai, bawang merah dan bawang putih. Usaha tani dibidang perkebunan adalah tebu rakyat, kakao dan kopi. Jadi terdapat sembilan macam jenis tanaman pertanian yang mendapatkan pupuk bersubsidi yang terbagi dalam empat jenis pupuk yaitu urea, NPK, NPK khusus dan organik.

Petani penerima bantuan pupuk harus tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (eRDKK) yang nantinya ini menjadi dasar alokasi pupuk bersubsidi.

Alokasi Pupuk Bersubsidi di tingkat provinsi dilakukan sesudah penetapan alokasi di tingkat pusat. Penetapan alokasi pupuk bersubsidi di tingkat provinsi berdasarkan e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani). Penetapan alokasi ini mempertimbangkan luas baku lahan sawah yang dilindungi serta penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di kabupaten/kota dalam provinsi tersebut.

Penetapan alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat kabupaten/kota dilakukan setelah alokasi pupuk bersubsidi tingkat provinsi ditetapkan. Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan e-RDKK dan ditetapkan dengan keputusan gubernur. Alokasi Pupuk Bersubsidi dirinci lebih lanjut berdasarkan kecamatan, jenis Pupuk Bersubsidi, dan jumlah. Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Keputusan bupati/walikota ditetapkan paling lambat bulan Desember pada tahun sebelumnya.

## **2. Keputusan Direktur Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 34 / 11 / KPTS / RC.210 / B / 12 / 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2024**

Petunjuk Teknis (Juknis) Program adalah panduan operasional yang digunakan oleh pemangku kepentingan untuk mempermudah implementasi nyata suatu program dilapangan. Juknis juga diharapkan bisa memberi pedoman dan arahan bagi pelaksana kebijakan dan penerima manfaat dari kebijakan. Juknis program pupuk subsidi tertuang dalam Keputusan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 34/11/KPTS/RC.210/B/12/2023. Dalam keputusan tersebut memuat berbagai aspek sebagai berikut:

### **1. Pengorganisasian**

Pengelolaan pupuk bersubsidi melibatkan berbagai instansi yang terkait berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 305 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Kebijakan Pupuk Bersubsidi, yang dimana melibatkan mulai dari tingkat pusat, hingga tingkat kabupaten/kota. Dalam proses keputusan tersebut menetapkan pembentukan Kelompok Kerja Kebijakan Pupuk Subsidi yang diketuai oleh Deputy Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian,

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Masing-masing tingkatan memiliki peran dan tugasnya, meliputi:

1) Pemerintah Tingkat Pusat

Tugas dari pemerintah pusat merumuskan kebijakan pengelolaan pupuk bersubsidi, merancang petunjuk teknis pengelolaan pupuk bersubsidi, menetapkan alokasi dan HET (Harga Eceran Tertinggi) pupuk bersubsidi tingkat provinsi, melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan pupuk subsidi, serta verifikasi dan validasi penyaluran pupuk subsidi tingkat nasional.

2) Pemerintah Tingkat Provinsi

Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi selaku pembina ditingkatnya juga pembina di kabupaten/kota bertugas melakukan penyusunan petunjuk pelaksanaan program berdasarkan petunjuk teknis pemerintah pusat agar sesuai dengan kondisi masing-masing daerah, menyusun konsep alokasi pupuk bersubsidi tingkat kabupaten/kota yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Gubernur, melakukan pembinaan, *monitoring* dan evaluasi kegiatan pengelolaan pupuk subsidi, serta menganalisis laporan dari kabupaten/kota melalui sistem yang e-Verval.

3) Pemerintah Tingkat Kabupaten/Kota

Satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota adalah Pembina setingkatnya sampai kecamatan yang bertugas melakukan penyusunan petunjuk pelaksanaan program berdasarkan petunjuk teknis pemerintah pusat agar sesuai dengan kondisi masing-masing daerah, menyusun konsep alokasi pupuk bersubsidi tingkat kabupaten/kota yang selanjutnya akan ditetapkan oleh bupati/walikota, melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan pupuk subsidi tingkat kecamatan, serta melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada satuan kerja tingkat provinsi.

2. Penyaluran Pupuk Subsidi

1) Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi

Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian tentang Alokasi dan Harga Ecer Tertinggi yang berlaku saat tahun berjalannya program. Pengalokasian dijadikan dasar pemerintah untuk melakukan pengadaan juga penyaluran kepada penerima bantuan pupuk bersubsidi yang sesuai dengan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Subsidi untuk Sektor Pertanian.

2) Kriteria Penerimaan Pupuk Bersubsidi

Kriteria Penerimaan Pupuk Bersubsidi mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Cara Penetapan Alokasi dan Harga Ecer Tertinggi Pupuk Bersubsidi pada Sektor Pertanian. Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa penerima pupuk subsidi adalah petani yang memiliki usaha tani subsektor taman pangan (padi, jagung, kedelai), hortikultura (cabai, bawang merah, bawang putih), dan/atau perkebunan (kopi, tebu rakyat, kakao) dengan lahan paling paling luas 2 hektar setiap musim tanam, namun lebih diutamakan kepada petani yang memiliki lahan paling luas 0,5 hektar.

3. Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Subsidi

Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Subsidi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Subsidi untuk Sektor Pertanian. Penyedia pupuk bersubsidi yang ditunjuk oleh pemerintah adalah PT. Pupuk Indonesia (Persero) dimana pupuk subsidi akan disalurkan melalui produsen, distributor dan penyalur masing disetiap wilayah tanggung jawabnya.

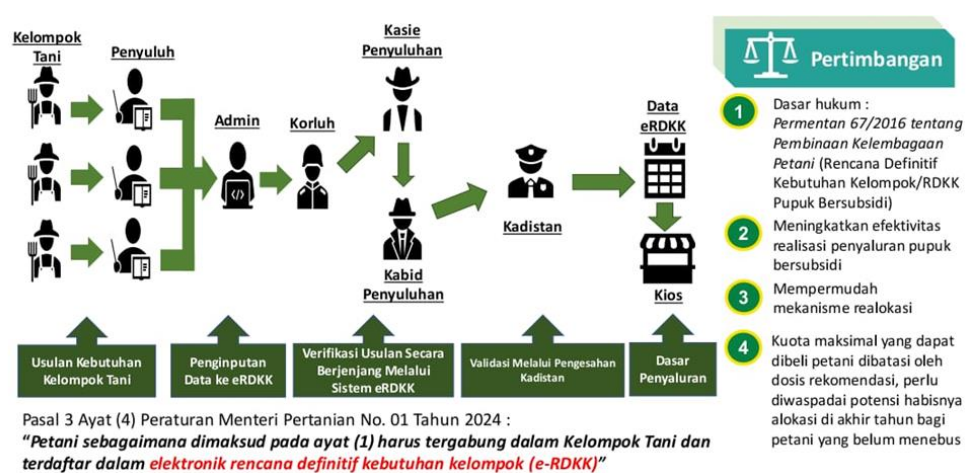
4. Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Sesuai revisi Permentan No. 10 Tahun 2022, usulan kebutuhan pupuk subsidi harus sesuai dengan kebutuhan petani yang disusun dalam bentuk RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) sesuai dengan yang diinput pada aplikasi e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang mengacu pada Permentan No. 67 Tahun 2016. Proses penginputan e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dilakukan oleh *entry team* data dari kecamatan lalu verifikasi dilakukan secara berjenjang mulai dari Koordinator Penyuluh (Korluh) tingkat kecamatan, selanjutnya oleh Kasi dan Kabid Penyuluhan diketahui oleh Kabid Pertanian yang selanjutnya divalidasi oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

Penetapan alokasi pupuk bersubsidi mengacu pada data RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang telah diinput dan diverifikasi sebagai dasar alokasi pupuk bersubsidi ditingkat provinsi. Alokasi pupuk tingkat provinsi ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian yang selanjutnya keputusan tersebut dijadikan dasar alokasi di tingkat kabupaten/kota. Alokasi pupuk

bersubsidi ditingkat kabupaten/kota di unggah melalui e-Alokasi sebagai dasar penyaluran pupuk bersubsidi tingkat provinsi. Penetapan alokasi pupuk bersubsidi di tingkat kabupaten/kota didasarkan pada usulan kebutuhan pupuk dari tingkat kecamatan yang diperoleh dari data kebutuhan petani yang disusun dan divalidasi oleh pemerintah kabupaten/kota. Alokasi untuk setiap petani disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota kepada petani melalui Kios Pupuk Lengkap (KPL) sebagai dasar dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

Gambar 5 Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi



Realokasi pupuk bersubsidi memungkinkan dilakukan apabila terdapat beberapa kondisi seperti terdapat perubahan peraturan mengenai alokasi pupuk bersubsidi, upaya peningkatan dan memaksimalkan pupuk subsidi. Realokasi mempertimbangkan hal-hal seperti penambahan/pengurangan volume alokasi dan atau jumlah petani.

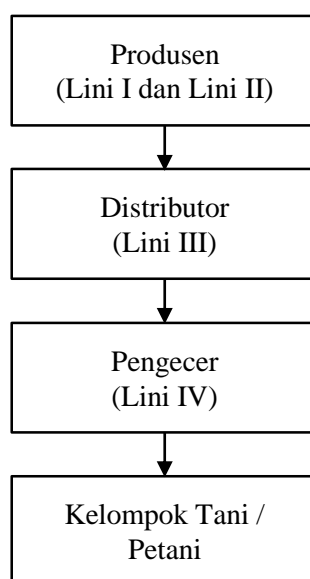
Penyusunan regulasi alokasi pupuk bersubsidi Harga Ecer Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Alokasi Pupuk Subsidi dan Harga Ecer Tertinggi Pupuk Subsidi sektor pertanian dan keputusan menteri pertanian terkait, untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh penetapan alokasi pupuk bersubsidi yang ditetapkan Gubernur/Bupati/Walikota/Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota di masing-masing wilayahnya.

Sumber pendanaan dari program pupuk bersubsidi bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPABUN). Dukungan operasional pengawalan penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2024 bersumber dari

Satuan Kerja Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian yang dialokasikan melalui Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Mekanisme Penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan secara tertutup sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, dengan alur sebagai berikut:

Gambar 6 Penyaluran Pupuk Bersubsidi



Penyaluran pupuk kepada petani dilakukan oleh pengecer resmi yang ditunjuk di wilayahnya, sesuai dengan alokasi pupuk bersubsidi di daerah tersebut. Pengecer resmi di lini IV diwajibkan untuk menjual pupuk bersubsidi hanya kepada petani yang terdaftar dalam sistem e-Alokasi. Harga Ecer Tertinggi yang telah ditentukan dalam Permentan berlaku untuk petani selaku pembeli pupuk subsidi di Lini IV dengan menggunakan Kartu Tani atau KTP.

Monitoring dan evaluasi pengelolaan program pupuk bersubsidi dapat dijalankan secara berkala sesuai dengan ketersediaan anggaran, baik oleh petugas Pembina di tingkat kabupaten/kota, provinsi, ataupun pusat. Pelaksanaan monitoring mengacu pada Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Indikator keberhasilan pengelolaan pupuk bersubsidi adalah tercapainya kemudahan bagi petani dalam memperoleh pupuk bersubsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan adanya berita acara yang memuat hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi

secara akuntabel. Kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dapat dipantau melalui sistem e-Verval.

### 3. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 249 / KPTS / SR.320 / M / 04 / 2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian

Keputusan Menteri Pertanian ini menetapkan terkait alokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian untuk tahun anggaran 2024 berdasarkan jenis, jumlah dan sebaran pupuk diberbagai provinsi. Keputusan Menteri Pertanian ini menggantikan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 744/KPTS/SR.300/M/12/2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keputusan ini adalah bagian dari pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Permentan No 01 Tahun 2024. Terkait harga pupuk dari tahun 2023 tidak ada perubahan, namun di tahun 2023 tidak terdapat jenis pupuk organik.

Harga pupuk bersubsidi berdasarkan keputusan ini sebagai berikut:

Tabel 9 HET Pupuk Subsidi

Pupuk Urea	Rp. 2.250 per Kg
Pupuk NPK	Rp. 2.300 per Kg
Pupuk NPK Khusus	Rp. 3.350 per Kg
Pupuk Organik	Rp. 800 per Kg

Keputusan alokasi pupuk bersubsidi tingkat pusat meliputi pembagian jumlah pupuk di setiap provinsi. Dari keputusan menteri tersebut terdapat rincian alokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian tingkat Provinsi Jawa Tengah untuk 36 kabupaten/kota. Jumlah keseluruhan dari alokasi tersebut adalah:

Tabel 10 Alokasi Pupuk Subsidi Jawa Tengah

Jenis Pupuk	Jumlah (TON)
Urea	773.647
NPK	640.510
NPK F. Khusus	149
Organik	100.096

Pupuk Bersubsidi ditujukan untuk petani yang mengelola usaha tani di subsektor tanaman pangan (seperti padi, kedelai, dan jagung), hortikultura (seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih), serta/atau perkebunan (seperti tebu rakyat, kopi, dan kakao) dengan luas lahan maksimal 2 hektar, termasuk petani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Alokasi pupuk organik diprioritaskan pada wilayah sentra komoditas pada di lahan sawah dengan kandungan C\_Organik kurang dari 2%.

#### **4. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 521.34/10 Tahun 2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024**

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 521.34/10 Tahun 2024 ditetapkan di Semarang 3 Mei 2024 oleh Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana. Keputusan ini berisi tentang alokasi dan HET pupuk bersubsidi tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Keputusan ini menindaklanjuti dari Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 249 / KPTS / SR.320 / M / 04 / 2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, yang dimana sesuai dengan Permentan Nomor 01 Tahun 2024 alokasi pupuk tingkat provinsi dilakukan setelah alokasi tingkat pusat ditetapkan. Isi dari Keputusan Gubernur Jawa Tengah, terdapat rincian dari alokasi pupuk bersubsidi per kabupaten/kota yang berada di Jawa Tengah, dalam hal ini terdapat total dari alokasi pupuk bersubsidi Kabupaten Pati sebagai berikut

Tabel 11 Alokasi Pupuk Bersubsidi Kabupaten Pati 2023

<b>Jenis Pupuk</b>	<b>Jumlah (Ton)</b>
Urea	47.000
NPK	26.000
NPK F. Khusus	80

Tabel 12 Alokasi Pupuk Bersubsidi Kabupaten Pati 2024

<b>Jenis Pupuk</b>	<b>Jumlah (Kg)</b>
Urea	40.628.854
NPK	38.866.213
NPK F. Khusus	-
Organik	1.300.000

Dari penetapan alokasi pupuk bersubsidi tingkat provinsi diatas nantinya akan ditetapkan alokasi ditingkat kabupaten/kota oleh masing-masing kepala daerah.

#### **5. Keputusan Bupati Pati Nomor 521.1992 Tahun 2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Ecer Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2024**

Sesuai dengan peraturan menteri pertanian yang berlaku maka penetapan alokasi dan HET pupuk bersubsidi tingkat kabupaten/kota ditetapkan setelah menetapkan alokasi tingkat provinsi, dalam hal ini Kabupaten Pati telah menetapkan Keputusan Bupati Pati Nomor 521.1992 Tahun 2024 pada 08 Mei 2024. Alokasi pupuk subsidi

yang ditetapkan oleh bupati berisi tentang pembagian jumlah alokasi pupuk per kecamatan. Berdasarkan lokasi penelitian kali ini, penulis mengambil lokasi di Desa Kuryokalangan, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, adapun rincian alokasi di kecamatan tersebut sebagai berikut:

Tabel 13 Alokasi Pupuk Subsidi Kec. Gabus 2023

<b>Jenis Pupuk</b>	<b>Jumlah (Ton)</b>
Urea	2.409,645
NPK	1.195,735
NPK F. Khusus	-

Tabel 14 Alokasi Pupuk Subsidi Kec. Gabus 2024

<b>Jenis Pupuk</b>	<b>Jumlah (Ton)</b>
Urea	2.127,154
NPK	1.531,047
NPK F. Khusus	-
Organik	169,463

Alokasi pupuk bersubsidi di Desa Kuryokalangan adalah sebagai berikut:

Tabel 15 Alokasi Pupuk Subsidi Desa Kuryokalangan 2023

<b>Jenis Pupuk</b>	<b>Jumlah (Ton)</b>
Urea	98,373
NPK	53,61
NPK F. Khusus	-

Tabel 16 Alokasi Pupuk Subsidi Desa Kuryokalangan 2024

<b>Jenis Pupuk</b>	<b>Jumlah (Ton)</b>
Urea	36,501
NPK	33,217
NPK F. Khusus	-
Organik	-

## **B. Identifikasi Stakeholder**

Stakeholder adalah individu, kelompok, atau organisasi yang mempunyai kepentingan terhadap suatu organisasi, proyek, atau keputusan. Stakeholder berperan sebagai pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung untuk mendukung kelangsungan dan pencapaian tujuan organisasi. Stakeholder dapat memengaruhi ataupun dipengaruhi oleh berbagai tindakan, kebijakan, dan sasaran yang ditetapkan oleh organisasi tersebut.

Implementasi program pupuk subsidi Desa Kuryokalangan melibatkan berbagai pihak pemangku kepentingan (*stakeholder*), mulai dari perencanaan kebijakan tingkat pusat hingga pelaksanaannya tingkat desa. Setiap stakeholder mempunyai peran yang saling melengkapi dalam implementasi program pupuk bersubsidi ini dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

#### 1. Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian Pertanian yang berperan sebagai pengambil kebijakan utama program pupuk subsidi. Menteri Pertanian sebagai kunci dalam pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan, melakukan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dibidang pengaturan alokasi pupuk bersubsidi per provinsi serta sistem RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Pemerintah pusat bekerja sama dengan kementerian terkait juga berbagai pihak yang bersangkutan untuk menjalankan dan mensukseskan program ini. Adapun tugas dan tanggung jawab utama dari menteri pertanian yakni:

- a. Merumuskan kebijakan program bersama instansi yang menjadi mitra kerjasama program ini.
- b. Membuat Juknis program.
- c. Menentukan alokasi Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi tingkat provinsi
- d. Melakukan pembinaan, monitoring, serta evaluasi kegiatan pengelolaan pupuk bersubsidi
- e. Menverifikasi dan menvalidasi penyaluran pupuk bersubsidi tingkat nasional
- f. Mengajukan pembayaran subsidi pupuk.

#### 2. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan kabupaten. Pemerintah Provinsi sebagai berperan dalam menyalurkan alokasi pupuk subsidi ke masing-masing kabupaten sesuai kuota yang telah ditentukan. Gubernur Jawa Tengah melalui instansi terkait juga bertanggung jawab dalam proses pengawasan agar distribusi dapat berjalan sesuai pedoman nasional.

Tugas dan tanggung jawab pemerintah provinsi Jawa Tengah:

- a. Koordinasi bersama pihak yang ditunjuk dalam pelaksanaan program pupuk subsidi ini, seperti Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, distributor pupuk, dankelompok tani.

- b. Melakukan penyesuaian terhadap petunjuk teknis (juknis) program pupuk subsidi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah di Jawa Tengah.
- c. Menyusun dan menetapkan alokasi pupuk tingkat kabupaten/kota berdasarkan data kebutuhan pertanian yang telah diverifikasi.
- d. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan pupuk bersubsidi
- e. Menganalisis laporan sistem e-Verval (verifikasi dan validasi elektronik) guna memastikan data petani di Provinsi Jawa Tengah penerima subsidi sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

### 3. Pemerintah Kabupaten Pati

Pemerintah Kabupaten Pati memiliki kewenangan dalam mendistribusikan kuota pupuk subsidi di provinsi ke tingkat kecamatan dan desa. Peran ini melibatkan pembinaan terhadap Dinas pertanian dan kelompok tani di Kabupaten Pati, serta evaluasi pelaksanaan program untuk memastikan kebijakan subsidi menjangkau kelompok tani yang benar-benar membutuhkan.

Tugas dan tanggung jawab Tim Pembina di tingkat Kabupaten Pati:

- a. Koordinasi bersama pihak yang ditunjuk dalam program ini, termasuk Dinas Pertanian Kabupaten Pati, distributor pupuk, dan kelompok tani di Kabupaten Pati untuk memastikan kelancaran distribusi pupuk subsidi.
- b. Melakukan penyesuaian terhadap juknis program sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah Kabupaten Pati.
- c. Menyusun dan menetapkan alokasi pupuk tingkat kecamatan sampai dengan petani berdasarkan data yang telah diverifikasi.
- d. Memberikan pembinaan kepada petugas tingkat Kecamatan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program pupuk subsidi, sehingga mampu menjalankan tugas sesuai dengan pedoman yang berlaku.
- e. Menyusun pelaporan implementasi program pupuk subsidi di Kabupaten Pati dan melaporkan melalui sistem e-verval, yaitu sistem informasi pelaporan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi.

### 4. Dinas Pertanian Kabupaten Pati

Dinas Pertanian Kabupaten Pati adalah pelaksana teknis program lapangan. Dinas Pertanian bertugas memverifikasi RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang diajukan oleh kelompok tani Desa Kuryokalangan, memberikan pelatihan teknis, serta mendampingi petani untuk memastikan penggunaan pupuk

sesuai kebutuhan. Dinas Pertanian Kabupaten Pati berperan penting untuk menghindari penyelewengan subsidi dan meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk.

Tugas dan wewenang Dinas Pertanian Kabupaten Pati:

- a. Perencanaan dan Pengelolaan Program: Dinas Pertanian Kabupaten Pati bertanggung jawab menyusun rencana kebutuhan pupuk subsidi di tingkat kabupaten berdasarkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang diajukan oleh kelompok tani. Selain itu, Dinas Kabupaten Pati mengalokasikan kuota pupuk subsidi yang diterima dari pemerintah provinsi ke tingkat kecamatan dan desa sesuai dengan data kebutuhan yang ada.
- b. Pendampingan dan Pembinaan Petani: Sebagai bagian dari dukungan teknis, Dinas Pertanian Kabupaten Pati memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada petani, terutama terkait penggunaan pupuk subsidi yang tepat guna dan efisien. Dinas Pertanian Kabupaten Pati juga mendampingi kelompok tani dalam proses penyusunan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) serta membantu petani mengatasi kendala teknis di lapangan.
- c. Pengawasan Distribusi Pupuk: Pengawasan menjadi salah satu tugas penting Dinas Pertanian Kabupaten Pati, yaitu memastikan distribusi pupuk subsidi berjalan sesuai kuota dan tepat sasaran. Dinas Pertanian Kabupaten Pati memantau pengecer resmi agar ketersediaan pupuk terjamin dan penyalurannya sesuai dengan kebutuhan petani yang terdaftar.
- d. Pengendalian Penyelewengan: Dinas Pertanian Kabupaten Pati bertugas mengawasi dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam menjalankan program pupuk subsidi, seperti penjualan pupuk subsidi kepada pihak yang tidak berhak atau manipulasi data dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Jika ditemukan pelanggaran, Dinas Kabupaten Pati juga bertanggung jawab menindaklanjuti laporan atau keluhan dari petani.
- e. Evaluasi dan Pelaporan: Dinas Kabupaten Pati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pupuk subsidi di wilayah kabupaten untuk menilai efektivitasnya. Hasil evaluasi tersebut dilaporkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pusat (Menteri Pertanian) sebagai bahan pertimbangan dalam perbaikan kebijakan.
- f. Koordinasi dengan Stakeholder: Dinas Pertanian Kabupaten Pati berkoordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jateng, Pemerintah Desa Kuryokalangan, kelompok tani Desa Kuryokalangan, dan

penyuluh pertanian yang ditugaskan di Desa Kuryokalangan dalam implementasi program pupuk subsidi. Selain itu, Dinas Kabupaten Pati juga bertugas menyampaikan sosialisasi kebijakan pertanian kepada petani melalui berbagai media dan penyuluhan.

#### 5. Pemerintah Desa Kuryokalangan

Pemerintah Desa Kuryokalangan memiliki peran sebagai fasilitator di tingkat lokal. Peran ini bertujuan untuk memastikan program dapat berlangsung dengan baik dan sesuai sasaran, serta memberikan manfaat langsung kepada petani yang membutuhkan. Berikut adalah tugas dan wewenang pemerintah desa dalam mendukung implementasi program pupuk bersubsidi:

- a. Fasilitasi Penyusunan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok): Pemerintah Desa Kuryokalangan membantu kelompok tani dalam proses penyusunan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang menjadi dasar alokasi pupuk subsidi. Peran ini mencakup pendampingan administrasi dan memastikan data yang disusun akurat serta sesuai dengan kebutuhan petani di wilayah desa.
- b. Koordinasi dengan Stakeholder: Pemerintah Desa Kuryokalangan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Pati, penyuluh pertanian Desa Kuryokalangan, kelompok tani Desa Kuryokalangan, dan pengecer pupuk resmi di Desa Kuryokalangan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Koordinasi ini mencakup pembagian tugas, penyelesaian kendala di lapangan, serta pelaporan pelaksanaan program kepada pihak terkait.
- c. Pengawasan Distribusi: Pemerintah Desa Kuryokalangan berperan mengawasi distribusi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran. Mereka memastikan bahwa pupuk hanya disalurkan bagi petani yang terdaftar dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dan mencegah adanya penyimpangan, seperti penjualan pupuk bersubsidi kepada pihak yang tidak berhak.

#### 6. Kelompok Tani (Poktan) Desa Kuryokalangan

Kelompok tani adalah pelaksanaan langsung program di tingkat di Desa Kuryokalangan ini. Kelompok tani Desa Kuryokalangan bertanggung jawab dalam menyusun RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) berdasarkan kebutuhan petani dalam anggotanya, yang menjadi dasar alokasi pupuk subsidi. Selain itu,

kelompok tani Desa Kuryokalangan mengelola distribusi pupuk subsidi kepada petani yang terdaftar menjadi anggotanya dan menjadi penghubung antara petani Desa Kuryokalangan dengan penyuluh pertanian Desa Kuryokalangan

Tugas dan wewenang Kelompok Tani Desa Kuryokalangan:

- a. Menyusun RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) berdasarkan kebutuhan anggota kelompoknya. RDKK ini mencakup data petani Desa Kuryokalangan, luas lahan, jenis tanaman, serta kebutuhan pupuk per musim tanam.
- b. Pendataan petani Desa Kuryokalangan yang berhak menerima pupuk bersubsidi sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Data ini harus akurat dan transparan untuk menghindari penyimpangan atau kesalahan alokasi.
- c. Mengelola distribusi pupuk dalam mendistribusikan pupuk bersubsidi kepada petani Desa Kuryokalangan. Kelompok tani memastikan bahwa pupuk diterima oleh petani yang terdaftar dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) sesuai dengan kuota yang telah ditentukan.
- d. Pengawasan penggunaan pupuk bersubsidi oleh anggotanya agar sesuai dengan kebutuhan dan tidak disalahgunakan. Pengawasan ini bertujuan memastikan pupuk digunakan secara efisien untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
- e. Pendampingan petani Desa Kuryokalangan yang terdaftar sebagai anggotanya meliputi edukasi tentang penggunaan pupuk yang tepat, pengelolaan lahan, dan teknik budidaya tanaman yang baik.
- f. Berkoordinasi dengan penyuluh pertanian Desa Kuryokalangan, Pemerintah Desa Kuryokalangan, dan Dinas Pertanian Kabupaten Pati untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Koordinasi ini mencakup penyusunan RDKK, pelaporan distribusi pupuk, dan penyelesaian masalah di lapangan.
- g. Meyelesaikan konflik internal atau ketidaksesuaian dalam distribusi pupuk di antara anggota, kelompok tani Desa Kuryokalangan bertugas menyelesaikan masalah tersebut secara musyawarah untuk menjaga keberlangsungan program.
- h. Meningkatkan kapasitas anggotanya melalui pelatihan, diskusi, atau kegiatan bersama lainnya. Hal ini bertujuan untuk membuat pengetahuan serta keterampilan petani Desa Kuryokalangan meningkat untuk mendukung keberhasilan program ini.

## 7. Pengecer Pupuk Resmi Desa Kuryokalangan

Pengecer pupuk resmi Desa Kuryokalangan merupakan pihak yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendistribusikan pupuk subsidi kepada kelompok tani. Pengecer Desa Kuryokalangan juga memastikan ketersediaan stok pupuk dan menyalurkannya tepat waktu, serta melaporkan realisasi distribusi kepada Dinas Pertanian Kabupaten Pati untuk memastikan akuntabilitas program pupuk subsidi ini.

Berikut penjelasan lebih lanjut terkait tugas dan wewenang pengecer pupuk resmi Desa Kuryokalangan:

- a. Menerima alokasi pupuk bersubsidi dan menyimpan pupuk bersubsidi dari distributor sesuai kuota yang telah ditentukan dan memastikan pupuk yang diterima dalam kondisi baik.
- b. Menyalurkan pupuk yang dilakukan berdasarkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang telah diverifikasi, untuk memastikan distribusi tepat sasaran sesuai kebutuhan petani di Desa Kuryokalangan.
- c. Mengelola stok pupuk termasuk menjaga ketersediaan stok pupuk sesuai kebutuhan petani Desa Kuryokalangan, serta melakukan pengelolaan stok untuk menghindari kekurangan atau penumpukan.
- d. Mencatat dan melaporkan realisasi distribusi kepada Dinas Pertanian terkait untuk memastikan akuntabilitas program subsidi pupuk ini.
- e. Memberikan pelayanan transparan kepada Petani Desa Kuryokalangan, seperti memberikan informasi terkait jumlah pupuk yang diterima, harga sesuai ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan menjadwalkan distribusinya.
- f. Melaksanakan Sosialisasi dan Edukasi kepada petani Desa Kuryokalangan mengenai aturan program pupuk bersubsidi, jenis pupuk yang tersedia, dan cara pembeliannya.

## 8. Penyuluh Pertanian Desa Kuryokalangan

Penyuluh pertanian Desa Kuryokalangan memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan program pupuk bersubsidi. Penyuluh pertanian Desa Kuryokalangan berfungsi sebagai penghubung antara Dinas Pertanian Kabupaten Pati dan petani Desa Kuryokalangan, memberikan bimbingan teknis, dan memastikan program berjalan dengan baik.

Berikut adalah tugas dan wewenang yang dimiliki penyuluh pertanian Desa Kuryokalangan:

- a. Pendampingan Teknis kepada Petani Desa Kuryokalangan

Penyuluh pertanian Desa Kuryokalangan bertugas memberikan bimbingan teknis kepada petani Desa Kuryokalangan tentang cara menggunakan pupuk bersubsidi secara efisien, mulai dari pemilihan jenis pupuk yang sesuai hingga pengelolaan tanah dan tanaman.

b. Sosialisasi Program Pupuk Bersubsidi

Penyuluh bertanggung jawab mensosialisasikan kebijakan dan mekanisme program pupuk bersubsidi kepada petani Desa Kuryokalangan. Informasi yang disampaikan mencakup alokasi pupuk, tata cara pengajuan, serta syarat yang harus dipenuhi petani agar dapat mengakses pupuk subsidi.

c. Penyusunan dan Verifikasi RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)

Penyuluh Pertanian Desa Kuryokalangan membantu kelompok tani Desa Kuryokalangan dalam menyusun RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) berdasarkan kebutuhan petani Desa Kuryokalangan dan luas lahan yang dikelola.

d. Pemantauan dan Evaluasi

Penyuluh pertanian Desa Kuryokalangan berperan aktif dalam memantau distribusi pupuk bersubsidi di lapangan, memastikan penyaluran berjalan tepat sasaran. Serta mengevaluasi dampak program pupuk subsidi ini terhadap produktivitas pertanian di Desa Kuryokalangan dan memberikan masukan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Pati untuk perbaikan program pupuk subsidi ini.

e. Pendampingan Kelompok Tani

Penyuluh mendampingi kelompok tani Desa Kuryokalangan dalam manajemen organisasi, pengelolaan subsidi, dan penyusunan laporan distribusi pupuk subsidi.

f. Pelaporan dan Koordinasi

Penyuluh pertanian Desa Kuryokalangan bertugas menyusun laporan hasil pendampingan, pemantauan, dan evaluasi kepada dinas pertanian Kabupaten Pati. Penyuluh pertanian Desa Kuryokalangan juga berkoordinasi dengan pemerintah Desa Kuryokalangan, pengecer pupuk resmi di Desa Kuryokalangan, dan kelompok tani Desa Kuryokalangan untuk memastikan kelancaran implementasi program pupuk subsidi.

9. Petani Desa Kuryokalangan Penerima Manfaat

Petani Desa Kuryokalngan adalah penerima langsung pupuk subsidi ini. Mayoritas petani di Desa Kuryokalangan adalah petani kecil yang tergabung dalam kelompok tani. Petani kecil yang dimaksud adalah petani yang mempunyai lahan kurang dari 2 Ha. Petani di Desa Kuryokalngan memanfaatkan pupuk subsidi untuk mendukung kegiatan pertanian, khususnya dalam meningkatkan hasil panen. Selain itu dengan adanya program ini biaya yang dikeluarkan dalam proses tanam semakin rendah, ini dapat membuat keuntungan petani bisa bertambah sehingga kesejahteraan petani turut serta meningkat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Darno selaku petani Desa Kuryokalangan:

*“Oh, iya, Mbak. Kami sebagai petani sangat terbantu dengan adanya program pupuk subsidi ini. Tanpa pupuk subsidi biaya produksi kami pasti lebih besar, dan keuntungan jadi kecil. Kalau pakai pupuk subsidi, kami bisa lebih hemat.”* (Wawancara Bapak Darno, Petani di Desa Kuryokalangan, 03 Oktober 2024, 08.54 WIB).

### **C. Proses Implementasi Program Pupuk Subsidi**

Implementasi program pupuk subsidi Desa Kuryokalangan merupakan langkah konkret yang dilakukan pemerintah dalam upaya pencapaian produksi pertanian. Program ini bertujuan untuk membuat hasil pertanian mereka meningkat dengan biaya produksi yang lebih rendah. Tata kelola pupuk bersubsidi diharapkan memenuhi 6 (enam) tepat (tepat waktu, jumlah, jenis, tempat, mutu dan harga) agar dapat mendorong peningkatan produksi pertanian khususnya pada komoditas yang mendapatkan fasilitas pupuk subsidi (Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian, 2023). Namun dalam implementasinya dilapangan pasti tidak lepas dari dinamika yang terjadi, ada beberapa hal yang berjalan semestinya namun ada juga yang kurang sesuai dengan aturan yang ada. Pada bagian ini penulis akan menjabarkan temuan dilapangan terkait implementasi program pupuk subsidi di Desa Kuryokalangan, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati berdasarkan 6T (Enam tepat).

#### **1. Tepat waktu**

Dalam penyaluran pupuk bersubsidi harus mengacu pada kapan masa tanam dilakukan, supaya pupuk dapat diterima oleh petani saat mereka membutuhkan. Masa tanam di Desa Kuryokalangan dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun, mengikuti kalender pertanian yang telah disesuaikan dengan kondisi cuaca dan jenis komoditas yang ditanam seperti padi, kedelai, dan jagung yang merupakan tanaman utama di Desa Kuryokalangan. Dengan demikian kebutuhan pupuk subsidi penting

terutama di bulan Oktober untuk masa tanam pertama (musim penghujan) dan bulan Maret untuk masa tanam kedua (musim kemarau) tepat sebelum masa tanam dimulai. Ketersediaan di waktu-waktu tersebut sangat penting dalam produktifitas pertanian sehingga hasil panen dapat dioptimalkan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ahmad Fakhri selaku salah satu petani di Desa Kuryokalangan:

*“Pupuk datang sebelum musim tanem, yaitu musim tanam pertama dan musim tanam kedua dan tepat waktu belum musim tanam dimulai mbak”* (Wawancara dengan Bapak Ahmad Fakhri, Petani di Desa Kuryokalangan, 03 Oktober 2024, 08.38 WIB)

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Bapak Darno selaku salah satu Petani di Desa Kuryokalangan:

*“Pernah saya telat mba dalam mendapatkan pupuk, pas musim tanam saya belum dapat pupuk jadi saya beli pupuk non subsidi. Terus setelah saya sudah beli malah baru turun baru dapat pupuknya jadi pupuknya gak kepakai”* (Wawancara Bapak Darno, Petani di Desa Kuryokalangan, 03 Oktober 2024, 08.54 WIB).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kamijan selaku agen kios resmi di Desa Kuryokalangan:

*“Penyaluran pupuk tepat waktu, tapi mungkin masih ada kendala di petani mengenai prosedur distribusi atau adanya perubahan data penerima pupuk bersubsidi yang menyebabkan sedikit keterlambatan pada tingkat individu.”* (Wawancara Bapak Kamijan selaku agen kios resmi di Desa Kuryokalangan, 07 Oktober 2024, 18.35 WIB).

Dapat disimpulkan secara keseluruhan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Kuryokalangan telah berjalan dengan baik dan mendukung kebutuhan petani selama kedua masa tanam.

## 2. Tepat jumlah

Petani penerima bantuan pupuk bersubsidi memiliki beragam luas lahan pertanian yang berbeda, hal ini juga menunjukkan perbedaan jumlah kebutuhan pupuk yang digunakan pada tanaman mereka. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Pati, alokasi Desa Kuryokalangan pada tahun 2023-2024 ditentukan melalui sistem e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Program pupuk bersubsidi dapat dikatakan berhasil apabila jumlah pupuk yang diberikan kepada petani penerima bantuan sudah sesuai dengan kebutuhan mereka.

Hal ini menjadi krusial jika penyaluran pupuk tidak sesuai dengan jumlah yang semestinya untuk kebutuhan mereka dalam mencapai hasil pertanian yang maksimal. Namun, jumlah pupuk yang diterima dirasa kurang oleh sebagian besar petani.

Menurut wawancara dengan Bapak Jumani, salah satu petani di Desa Kuryokalangan, keterbatasan kuota pupuk menyebabkan kebutuhan pupuk tidak terpenuhi sepenuhnya. Beliau mengungkapkan sebagai berikut:

*“Luas lahan yang saya garap cukup banyak tapi pupuk yang diterima hanya mencukupi sebagian kebutuhan saja, jadi saya sering beli pupuk non subsidi karna subsidi kurang.”*  
(Wawancara dengan Bapak Jumani, Petani di Desa Kuryokalangan, 03 Oktober, 16.20 WIB).

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan riil petani dan jumlah pupuk yang tersedia melalui program subsidi. Berdasarkan data dari kelompok tani pada RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), kebutuhan pupuk per hektar mencapai 300 kg pupuk NPK dan 200 kg pupuk urea per musim tanam. Namun, alokasi yang diberikan sering kali hanya mencakup 60%-70% dari kebutuhan ideal. Kekurangan pupuk ini memaksa petani untuk membeli pupuk nonsubsidi dengan harga yang lebih tinggi. Hal ini berdampak pada meningkatnya biaya produksi, yang pada akhirnya menurunkan margin keuntungan petani. Selain itu, keterbatasan pupuk subsidi juga dapat memengaruhi produktivitas lahan, terutama pada komoditas strategis seperti padi, jagung, dan kedelai yang menjadi andalan sektor pertanian di Desa Kuryokalangan. Keterbatasan ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kuota pupuk yang ditetapkan berdasarkan anggaran subsidi nasional. Pemerintah Kabupaten Pati bertugas mendistribusikan alokasi tersebut hingga tingkat desa, namun kuota sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Sistem e-Verval yang digunakan untuk verifikasi dan validasi data petani juga memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam memastikan semua petani yang membutuhkan pupuk subsidi terdaftar dengan baik.

Dalam upaya mengatasi masalah ini, kelompok tani di Desa Kuryokalangan berinisiatif melakukan diskusi internal untuk menyasiasi keterbatasan alokasi pupuk. Salah satunya adalah menyosialisasikan pembuatan pupuk Biosaka, yaitu sejenis ramuan organik yang dibuat dari campuran air dan daun atau rumput sehat yang diremas. Namun, langkah ini masih belum

sepenuhnya optimal untuk menyelesaikan permasalahan yang ada karena petani masih belum ada kesadaran penuh mengenai hal ini.

Dengan demikian, berdasarkan temuan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa meskipun program pupuk subsidi telah membantu meringankan beban petani, keberhasilannya belum sepenuhnya tercapai, terutama dalam aspek kecukupan jumlah. Perlu adanya evaluasi lebih lanjut terhadap mekanisme alokasi dan distribusi pupuk, agar program ini benar-benar dapat menjangkau petani yang membutuhkan dan mendukung peningkatan hasil panen secara optimal. Berdasarkan wawancara di atas disimpulkan kekurangan pupuk bersubsidi disebabkan keterbatasan alokasi pupuk bersubsidi yang ditentukan berdasarkan kuota, sehingga tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan ditingkat petani.

### 3. Tepat jenis

Jenis pupuk yang diberikan dalam program subsidi harus sesuai dengan kebutuhan komoditas yang ditanam oleh petani untuk mendukung produktivitas pertanian secara optimal. Komoditas utama yang ditanam oleh petani di Desa Kuryokalangan adalah padi, jagung, dan kedelai, yang termasuk dalam subsektor tanaman pangan. Berdasarkan data e-RDCK Desa Kuryokalangan tahun 2023-2024, petani di desa ini menerima pupuk subsidi berupa Urea (Nitrogen) dan NPK (Nitrogen, Phoska, Kalium). Jenis pupuk tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan lahan untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan.

Menurut keterangan dari Ketua Kelompok Tani Makmur Bapak Widodo, penggunaan pupuk Urea dan NPK cukup efektif untuk menunjang pertumbuhan tanaman padi, kedelai dan jagung yang merupakan komoditas utama di Desa Kuryokalangan. Berikut berdasarkan wawancara Bapak Widodo selaku Ketua Kelompok Tani mengungkapkan:

*“Pupuk Urea dan NPK sudah sesuai kebutuhan tanaman kami. Padi dan jagung memang membutuhkan dua jenis pupuk ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal, meskipun ada petani yang berharap juga mendapatkan pupuk organik untuk memperbaiki struktur tanah.”* (Wawancara Bapak Widodo Ketua Kelompok Tani Subur, 4 Oktober 2024, pukul 14.30 WIB).

Penggunaan pupuk yang tepat jenisnya ini mendukung keseimbangan kebutuhan hara tanaman, seperti nitrogen dari pupuk Urea untuk pertumbuhan daun dan batang, serta unsur hara majemuk dari pupuk NPK untuk meningkatkan

hasil panen. Berdasarkan wawancara dengan petugas penyuluh pertanian lapangan (PPL), alokasi jenis pupuk disesuaikan dengan rekomendasi teknis berdasarkan analisis kebutuhan lahan dan tanaman di Desa Kuryokalangan. Berikut wawancara dengan Ibu Eny Selaku Penyuluh Pertanian Desa Kuryokalangan:

*“Alokasi pupuk sudah disesuaikan dengan kebutuhan lahan dan tanamannya mbak, kebutuhan Desa Kuryokalangan ini, pupuk urea dan NPK yang dibutuhkan tanaman”* (Wawancara Ibu Eny Koordinator Badan Penyuluhan Pertanian Kecamatan Gabus, 09 Oktober 2024, 07.30 WIB)

Namun, meskipun jenis pupuk yang disalurkan sudah sesuai, beberapa petani menyatakan bahwa mereka juga membutuhkan pupuk organik untuk memperbaiki kualitas tanah. Tanah di Desa Kuryokalangan, mengalami penurunan kesuburan akibat penggunaan pupuk kimia yang berlebihan pada musim-musim tanam sebelumnya.

Menurut laporan BPS Kabupaten, luas lahan sawah di Desa Kuryokalangan mencapai 152 hektar, dengan kebutuhan pupuk NPK sekitar 36.501 kg dan pupuk Urea sekitar 33.217 kg. Data ini menunjukkan bahwa alokasi jenis pupuk subsidi sudah sesuai dengan kebutuhan komoditas unggulan di Desa Kuryokalangan.

Berdasarkan hasil temuan ini, dapat disimpulkan bahwa aspek tepat jenis dalam program pupuk bersubsidi di Desa Kuryokalangan sudah terpenuhi, meskipun perlu adanya evaluasi tambahan terkait kebutuhan pupuk organik sebagai pelengkap dalam menunjang keberlanjutan sistem pertanian. Hal ini penting untuk memastikan produktivitas tetap terjaga, sekaligus memperbaiki kualitas tanah secara jangka panjang.

#### 4. Tepat tempat

Kabupaten Pati yang dikenal dengan sebutan “Bumi Mina Tani”, menegaskan perannya sebagai salah satu wilayah yang mengandalkan sektor pertanian dan perikanan untuk mendukung perekonomian daerah. Dengan luas lahan pertanian yang signifikan, kabupaten ini menjadi sentra produksi tanaman pangan, seperti padi, jagung, dan kedelai. Salah satu kecamatan penghasil utama hasil pertanian di Kabupaten Pati adalah Kecamatan Gabus, di mana Desa Kuryokalangan turut berperan sebagai penyumbang hasil produksi pangan.

Desa Kuryokalangan memiliki lahan pertanian yang subur dan produktif, menjadikannya salah satu wilayah strategis yang menopang kebutuhan pangan

lokal. Berdasarkan wawancara dengan Ali Musthofa, seorang pegiat pertanian di desa tersebut, program pupuk bersubsidi yang diterapkan pemerintah dinilai telah memenuhi kebutuhan petani secara optimal. Ali Musthofa menyampaikan:

*“Penyaluran pupuk di Desa Kuryokalangan ini memang sesuai dengan kebutuhan petani. Wilayah ini mayoritas ditanami tanaman padi, jagung, kedelai, sehingga program pupuk subsidi ini mendukung produktivitas kami, mbak.”* (Wawancara dengan Bapak Ali Musthofa, Pegiat Pertanian di Desa Kuryokalangan, 03 Oktober 2024, 09.42 WIB).

Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa program pupuk bersubsidi di Desa Kuryokalangan telah berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan petani. Hal ini semakin diperkuat dengan data yang diperoleh dari e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani), yang menunjukkan bahwa jenis pupuk subsidi yang diberikan, seperti Urea (Nitrogen) dan NPK (Nitrogen, Phoska, Kalium), telah disesuaikan dengan jenis komoditas utama yang ditanam di Desa Kuryokalangan. Selain itu, data dari Dinas Pertanian Kabupaten Pati dan Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan bahwa Kecamatan Gabus, khususnya Desa Kuryokalangan, memiliki luas lahan sawah produktif lebih dari 152 hektar yang mayoritas digunakan untuk budidaya tanaman pangan. Dengan potensi pertanian yang signifikan ini, alokasi pupuk bersubsidi di Desa Kuryokalangan dapat dikatakan tepat sasaran dan mendukung peningkatan produktivitas hasil pertanian. Dan sebagai wilayah strategis yang berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan lokal dan regional, Desa Kuryokalangan membutuhkan perhatian yang berkelanjutan dalam pengelolaan program pupuk bersubsidi. Program ini tidak hanya mendorong peningkatan produktivitas pertanian, tetapi juga membantu petani dalam mengurangi beban biaya produksi, sehingga menciptakan kesejahteraan yang lebih merata.

#### 5. Tepat Mutu

Kualitas pupuk bersubsidi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan program ini. Pupuk bersubsidi harus memiliki kualitas yang baik agar dapat meningkatkan produktivitas hasil panen petani. Jika kualitas pupuk tidak sesuai standar, maka hal tersebut dapat menyebabkan penurunan produktivitas lahan dan hasil panen, yang tidak sejalan dengan tujuan utama dari program subsidi pupuk.

Di Desa Kuryokalangan, kualitas pupuk bersubsidi yang diterima petani dinilai cukup baik. Hal ini didukung oleh wawancara dengan Bapak Kamijan, salah satu pengecer pupuk bersubsidi resmi di desa tersebut:

*“Pupuk yang diterima kualitasnya cukup baik mbak, ada harga subsidi untuk warga, segitu sudah bagus.”*(Wawancara dengan Bapak Kamijan, Pengecer di Kios Pupuk Resmi Desa Kuryokalangan, 07 Oktober 2024, 18.35 WIB)

Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa pupuk bersubsidi yang disalurkan telah memenuhi standar mutu yang diharapkan oleh petani. Selain itu, pengawasan terhadap kualitas pupuk yang disubsidi perlu terus dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang diterima petani tetap memenuhi standar kualitas.

Keberhasilan prinsip tepat mutu ini juga ditunjang oleh peran pengecer resmi, yang berkomitmen dalam mendistribusikan pupuk berkualitas kepada petani. Dengan pupuk yang bermutu baik, petani di Desa Kuryokalangan dapat meningkatkan hasil panen mereka, mendukung produktivitas sektor pertanian, serta memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian daerah Kabupaten Pati.

#### 6. Tepat Harga

Prinsip tepat harga merupakan salah satu aspek penting dalam implementasi program pupuk bersubsidi yang bertujuan untuk membantu petani kecil mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau. Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 249/KPTS/SR.320/M/04/2024. Berdasarkan kebijakan tersebut, HET pupuk bersubsidi ditentukan sebagai berikut:

Urea: Rp112.500 per sak (50 kg)

NPK: Rp115.000 per sak (50 kg)

Namun, di Desa Kuryokalangan, terdapat sedikit perbedaan Harga Eceran Tertinggi HET dan harga yang diterima petani. Hal ini disampaikan oleh Bapak Widodo, Ketua Kelompok Tani di Desa Kuryokalangan:

*“Harga pupuk bersubsidi yaitu Rp120.000 per sak untuk urea dan Rp125.000 per sak untuk NPK.”*(Wawancara dengan Bapak Widodo, Ketua Kelompok Tani Desa Kuryokalangan, 04 Oktober 2024, 14.36 WIB).

Harga pupuk yang sedikit lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) menunjukkan bahwa prinsip tepat harga belum sepenuhnya berjalan optimal di

Desa Kuryokalangan, dengan selisih harga sebesar Rp. 7.500 untuk Urea dan Rp. 10.000 untuk NPK.

Namun, meskipun terjadi sedikit perbedaan harga, petani tetap mendapatkan manfaat dari program pupuk bersubsidi. Harga pupuk nonsubsidi jauh lebih tinggi, yaitu sekitar Rp350.000 - Rp400.000 per sak untuk urea dan Rp450.000 - Rp500.000 per sak untuk NPK. Selisih harga yang signifikan ini memungkinkan petani mengakses pupuk dengan biaya lebih rendah, sehingga meringankan biaya produksi dan mendorong penggunaan pupuk sesuai dosis yang dianjurkan untuk hasil panen optimal.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa prinsip tepat harga di Desa Kuryokalangan menunjukkan kemajuan dengan keberhasilan distribusi pupuk bersubsidi kepada petani. Namun selisih harga dan HET mengidentifikasi perlunya perbaikan dalam pengawasan dan transparansi distribusi. Dengan langkah-langkah tersebut, program pupuk bersubsidi dapat lebih optimal dalam mendukung keberlanjutan sektor pertanian di Desa Kuryokalangan dan Kabupaten Pati, yang dikenal sebagai "Bumi Mina Tani"

#### **D. Analisis Isi Kebijakan (Content of Policy)**

##### 1. Kepentingan yang mempengaruhi (*Interest Effected*)

Grindle (1980) dalam Nurmayana (2022) menyatakan bahwa pemikiran tentang pembuatan kebijakan dari pelaksanaannya menunjukkan bahwa ada banyak kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Ini berarti bahwa kepentingan tersebut berdampak pada pelaksanaan kebijakan. Pada kebijakan pupuk bersubsidi program pupuk subsidi mencakup berbagai kepentingan pemerintah melalui Kementerian Pertanian yang mempengaruhi perekonomian nasional terutama untuk mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan daya saing khususnya dibidang pertanian, membuka lapangan pekerjaan dan menanggulangi kemiskinan. Maka dari itu pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program pupuk subsidi sebagai bentuk upaya pemerintah dalam hal mendorong peningkatan produktifitas hasil pertanian dan memberi jaminan pupuk dengan harga terjangkau untuk petani penerima bantuan. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengungkapkan:

*"Pemerintah berharap kebijakan yang diambil ini mendapatkan dukungan dari seluruh pihak, sehingga tugas pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan terus mendapat kepercayaan dari masyarakat,"* (Berita [www.antarane.ws.com](http://www.antarane.ws.com) Diakses pada 03 November 2024)

Dari keterangan diatas bisa dikatakan bahwa kepentingan pemerintah dari kebijakan ini ialah mewujudkan peningkatan produktifitas kualitas hasil pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan daya saing khususnya dibidang pertanian, membuka lapangan pekerjaan dan menanggulangi kemiskinan.

Pada akhir tahun 2023 alokasi pupuk bersubsidi sangat erat dengan campur tangan kepentingan politik. Hal ini ditunjukkan oleh kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pupuk 4, 5 juta ton dari jumlah alokasi 12 juta ton, namun dengan kekuatan politik yang memiliki kepentingan tertentu pada momentum pemilihan presiden pada saat itu, maka dari angka realisasi 4, 5 juta ton dapat naik menjadi 9 juta ton untuk skala nasional.

Disampaikan oleh Bapak Surya, Ketua Tim Pupuk dan Pembiayaan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Pati:

*“Campur tangan politik juga terjadi pada momen pilpres kemarin, karena tim pak prabowo dekat dengan pemerintah maka realisasi dinaikan menjadi 9 juta ton meskipun anggarannya mepet namanya politik itu penguasa. Dari 9jt ton dialokasikan kepada provinsi jawa tengah 1,4juat ton, dari provinsi turun lagi ke Kab Pati 80 ribu ton, turun ke Kec. Gabus berdasarkan SK terakhir saya (ketua tim pupuk dan pembiayaan) 3695 ton.” (Wawancara Bapak Surya selaku Ketua Tim Pupuk dan Pembiayaan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Pati, 11 Oktober 2024, 08.50 WIB).*

Kepentingan politik tersebut dapat mempengaruhi realisasi pupuk yang sebelumnya tidak sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan. Dengan desakan kepentingan tertentu, pupuk bersubsidi dapat direalisasi sesuai dengan alokasinya.

Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian kebijakan pupuk bersubsidi mencakup bagaimana kepentingan pemerintah terwujud dalam pelaksanaan kebijakan:

- a. Komoditas Prioritas Pupuk Bersubsidi: Subsidi pupuk hanya diberikan kepada komoditas seperti padi, jagung, kedelai, tebu, bawang merah, bawang putih, cabai, kopi, dan kakao yang merupakan bagian dari program ketahanan pangan nasional.
- b. Penggunaan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) Sebagai Dasar Penyaluran: RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) menjadi pedoman utama dalam menentukan alokasi pupuk bersubsidi. Sistem ini melibatkan

kelompok tani untuk menyusun kebutuhan mereka, yang kemudian diverifikasi oleh Dinas Pertanian setempat, dan digunakan untuk menentukan kuota pupuk di setiap wilayah.

- c. Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET): Untuk menjaga aksesibilitas, pemerintah menetapkan HET pupuk bersubsidi, seperti pupuk urea memiliki HET sebesar Rp. 2.250 per kilogram.
- d. Pengawasan Distribusi: Distribusi pupuk diawasi secara ketat melalui distribusi resmi, kelompok tani, dan dilakukan sesuai mekanisme yang diatur, termasuk pencatatan elektronik melalui sistem e-RDKK.

Pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi di Desa Kuryokalangan memberikan gambaran tentang bagaimana kepentingan yang mempengaruhi kebijakan ini terealisasi.

Berdasarkan wawancara Ibu Eny Selaku Penyuluh Pertanian yang ditugaskan di Desa Kuryokalangan:

*“Kuota pupuk subsidi yang dialokasikan sudah sesuai dengan kebutuhan petani berdasarkan RDKK sesuai hitungan kebutuhan pokok ini berdasarkan luas tanah dan jenis komoditas yang ditanam. Jadi menurut kami kuota tersebut sudah mencukupi, namun keluhan seperti itu memang sering kami dengar, terutama saat musim tanam tertentu, Tapi perlu dipahami bahwa kuota yang diberikan pemerintah itu ada batasnya dan memang sudah terhitung secara adil sesuai lahan masing-masing petani. Mungkin ada kesalahpahaman di kalangan petani soal pembagian atau ekspektasi mereka lebih besar dari jumlah yang disediakan.”*(Wawancara Ibu Eny Selaku Penyuluh Pertanian, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, 09 Oktober 2024, 07.35 WIB).

Namun, tantangan lain muncul dari pengurangan komoditas yang mendapat subsidi, hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak Widodo Selaku Ketua Kelompok Tani Desa Kuryokalangan:

*“Sejak aturan tahun 2022 adanya pemotongan komoditas mba, jadi tanaman seperti kacang tidak mendapatkan subsidi sedangkan petani disini juga menanam kacang hijau.”*(Wawancara Bapak Widodo Selaku Ketua Kelompok Tani Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, 04 Oktober 2024, 14.36 WIB).

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pupuk bersubsidi dirancang untuk mendukung ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi. Kepentingan yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan ini mencerminkan prioritas

pemerintah dalam mencapai tujuan strategis di tingkat nasional, terutama dengan memberikan perhatian pada petani kecil. Di Desa Kuryokalangan, kebijakan subsidi pupuk berfokus pada petani yang bergabung dalam kelompok tani. Kelompok tani dipilih sebagai sasaran utama karena perannya yang struktur dalam menyalurkan pupuk subsidi kepada petani yang memiliki keterbatasan akses dan modal. Namun, tantangan seperti keterbatasan kuota, pengurangan komoditas, dan pengaruh kepentingan politik menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini perlu penguatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan secara efektif.

## 2. Jenis Manfaat (*Type of Benefits*)

Sebuah kebijakan harus memiliki jenis manfaat positif, dengan kata lain jenis manfaat untuk melihat keuntungan bagi masyarakat yang menerima bantuan. Program pupuk bersubsidi dirancang untuk memberikan kemudahan akses pupuk berkualitas dengan harga terjangkau bagi petani. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian, menurunkan biaya operasional, dan mendukung keberlanjutan sektor pertanian. Di Desa Kuryokalangan, implementasi kebijakan ini telah membawa manfaat nyata, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan.

Pada tahun 2023, kebijakan pupuk bersubsidi didasarkan pada Permentan No. 10 Tahun 2022. Terdapat perubahan dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 01 Tahun 2024, dijelaskan bahwa kebijakan pupuk bersubsidi adalah salah satu langkah strategis pemerintah untuk mendorong keberlanjutan sektor pertanian. Peraturan ini mengatur jenis pupuk yang bersubsidi, seperti urea dan NPK dan komoditas prioritas yang mendapatkan subsidi, yaitu kopi, padi, kedelai, bawang merah, cabai, jagung, bawang putih, tebu, dan kakao. Hal ini membuat petani yang menanam komoditas lain merasa kurang mendapatkan manfaat dari program subsidi ini. Proses pendistribusian pupuk bersubsidi didasari oleh RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disusun oleh kelompok tani (poktan) di tingkat desa. RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) ini memuat data mengenai kebutuhan pupuk berdasarkan luas lahan dan jenis tanaman yang dikelola petani. Mekanisme ini dirancang agar subsidi tepat sasaran dan diterima oleh petani yang benar-benar membutuhkannya. Peraturan ini juga menggarisbawahi pentingnya distribusi pupuk yang tepat waktu untuk mendukung aktivitas tanam petani. Pemerintah, melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian daerah, distributor, dan

kelompok tani, berupaya memastikan bahwa pupuk bersubsidi dapat diterima oleh petani sesuai jadwal dan kebutuhan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Fakih, seorang petani di Desa Kuryokalangan:

*“Pupuk ini sangat membantu saya dan banyak petani lainnya mbak karena pupuk harganya lebih murah dibandingkan pupuk nonsubsidi, jadi pendapatan dari panen bisa lebih untung juga kualitasnya juga bagus, tapi sekarang kalau kacang hijau tidak dapat subsidi mba, kan juga menananya”.* (Wawancara dengan Bapak Fakih, Petani Desa Kuryokalangan, 03 Oktober 2024, 08.38 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas menyatakan bahwa kualitas pupuk cukup membantu petani. Pupuk Subsidi di Desa Kuryokalangan ini difokuskan pada komoditas utama seperti padi, jagung, dan kedelai. Akan tetapi, tanaman seperti kacang hijau belum termasuk dalam kebijakan subsidi ini, meskipun terdapat petani yang menanam komoditas tersebut. Meskipun demikian, program subsidi pupuk yang diberikan dirasa bermanfaat dalam mendukung pertumbuhan tanaman, yang menunjukkan bahwa pupuk subsidi yang didistribusikan memenuhi standar kualitas yang diharapkan oleh petani. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan distribusi pupuk bersubsidi di Desa Kuryokalangan berjalan cukup baik.

Berikutnya wawancara dengan Bapak Hayyin selaku Sekretaris Desa Kuryokalangan yang menyatakan tentang kebermanfaatan program pupuk subsidi, berikut tuturnya:

*“Secara keseluruhan program pupuk subsidi bermanfaat bagi petani yang memiliki lahan yang kecil namun ingin mendapatkan hasil yang lebih, ini dilihat dari antusiasme mereka. Namun memang masih banyak PR agar lebih baik lagi.”*(Wawancara dengan Bapak Hayyin, Sekretaris Desa Kuryokalangan, 08 Oktober 2024, 12.21 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani Desa Kuryokalangan sebagai penerima bantuan dan perangkat Desa Kuryokalangan, program pupuk subsidi dinilai berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi penerimanya. Namun, diperlukan upaya improvisasi dari Pemerintah Desa Kuryokalangan untuk memastikan program ini dapat mencapai tujuan secara optimal. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah perluasan cakupan komoditas yang disubsidi. Kebijakan tahun 2024 juga menekankan pentingnya distribusi yang tepat waktu. Untuk

mencapai hal tersebut, Pemerintah Desa Kuryokalangan perlu bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Pati, penyuluh pertanian, pengecer pertanian Desa Kuryokalangan dan kelompok tani di Desa Kuryokalangan. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pupuk sesuai kebutuhan musim tanam. Secara keseluruhan, implementasi program di Desa Kuryokalangan menunjukkan bahwa kebijakan ini membantu petani menekan biaya produksi, meningkatkan hasil panen baik dari segi kuantitas dan kualitas, serta mengoptimalkan penggunaan lahan kecil untuk hasil maksimal. Namun, beberapa petani Desa Kuryokalangan mengeluhkan terbatasnya subsidi untuk komoditas tertentu, seperti kacang hijau, mengurangi dampak positif program pupuk subsidi ini.

Dengan demikian, dapat disimpulkan kebijakan pupuk bersubsidi di Desa Kuryokalangan telah memberikan manfaat nyata kepada petani, tetapi masih terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki. Dengan memperbaiki cakupan komoditas, meningkatkan distribusi, dan memberikan edukasi kepada petani, kebijakan ini dapat mencapai tujuan yang lebih optimal.

### 3. Derajat Perubahan (*Extend of Change Envision*)

Sebuah kebijakan yang dibuat tentunya memiliki tujuan dan target perubahan yang diharapkan. Jika dalam implementasi kebijakan memiliki derajat perubahan yang besar maka kebijakan tersebut bisa dikatakan berhasil.

Derajat perubahan dari kebijakan pupuk bersubsidi ini adalah mendorong kenaikan produktivitas dan kualitas pertanian serta memastikan akses terhadap pupuk dengan harga yang terjangkau untuk petani yang memerlukannya. Ini berarti bahwa pemerintah sangat mengharapkan kualitas produk hasil pertanian dapat meningkat sehingga harapan pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan hingga pengentasan kemiskinan dapat tercapai.

Kebijakan pupuk bersubsidi memiliki derajat perubahan yang bertujuan meningkatkan produktivitas hasil pertanian, dan mendorong kesejahteraan petani kecil. Implementasi kebijakan pada tahun 2023-2024 menunjukkan beberapa perubahan signifikan, baik dari jenis pupuk yang disubsidi maupun dampaknya terhadap petani di Desa Kuryokalangan. Pada tahun 2023, kebijakan pupuk bersubsidi mencakup 9 jenis komoditas utama, seperti padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao, dan tabu. Namun, jenis pupuk yang disubsidi hanya terbatas pada 2 jenis, yaitu urea dan NPK. Proses distribusi pupuk

bersubsidi pada data RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disusun oleh kelompok tani (poktan). Kebijakan ini membantu petani kecil yang memiliki lahan maksimal 2 hektar untuk mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hayyin Sekretaris Kuryokalangan:

*“Pupuk bersubsidi pada tahun lalu 2023 sudah sangat membantu petani di desa kami, meskipun hanya dua jenis pupuk yang disediakan. Namun, hal ini cukup untuk komoditas strategis seperti padi, jagung kedelai.”* (Wawancara dengan Bapak Hayyin, Sekretaris Desa Kuryokalangan, 08 Oktober 2024, 12.41 WIB).

Pada tahun 2024, kebijakan pupuk bersubsididi mencakup 9 jenis komoditas yang sama tetapi jenis pupuk yang disubsidi mengalami perluasan menjadi 4 jenis, yaitu Urea NPK, NPK Khusus, organik. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan lebih banyak pilihan kepada petani sesuai kebutuhan tanah dan jenis tanaman yang dibudidayakan. Langkah ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung efisiensi penggunaan pupuk dan keberlanjutan sektor pertanian.

Dapat disimpulkan bahwa subsidi pupuk ini membawa perubahan signifikan terhadap kemampuan petani dalam meningkatkan hasil panen sekaligus mendukung keberlanjutan pertanian di Desa Kuryokalangan. Program ini memungkinkan petani kecil untuk mengakses pupuk dengan biaya yang lebih terjangkau, sesuatu yang sebelumnya sulit dicapai. Berdasarkan hasil wawancara, para petani di Desa Kuryokalangan merasa sangat terbantu dengan adanya pupuk subsidi. Selain itu, distribusi pupuk subsidi di Desa Kuryokalangan ini merasa sangat terbantu dengan adanya pupuk subsidi. Selain itu, distribusi pupuk subsidi di Desa Kuryokalangan ini dinilai tepat waktu dan efisien oleh beberapa pihak. Namun, masih terdapat tantangan seperti kurangnya pemahaman petani dalam menggunakan pupuk sesuai kondisi tanah, terutama tanah dengan tingkat keasaman tinggi. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam edukasi petani serta penyesuaian kebijakan untuk mencakup lebih banyak jenis komoditas demi keberhasilan yang lebih luas.

#### 4. Letak Pengambilan Keputusan (*Site of Decision Making*)

Pengambilan suatu keputusan harus mengacu kepada kepentingan bersama dan tidak menguntungkan satu pihak tertentu saja. Kebijakan tentang program pupuk bersubsidi ditetapkan berdasarkan usulan kebutuhan pupuk petani melalui e-RDKK. Alokasi pupuk bersubsidi ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian

Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Penetapan alokasi Pupuk Bersubsidi di tingkat pusat dilaksanakan sesudah keputusan volume yang diputuskan dalam Rapat Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang kemudian diikuti dengan penetapan anggaran subsidi pupuk. Alokasi pupuk bersubsidi di tingkat provinsi dilakukan setelah alokasi tingkat pusat ditetapkan. Selanjutnya, penetapan alokasi di tingkat kabupaten/kota dijalankan sesudah alokasi di tingkat provinsi ditentukan. Alokasi pupuk bersubsidi di tingkat kabupaten/kota akan dirinci lebih lanjut berdasarkan kecamatan, jenis pupuk bersubsidi, dan jumlah yang ditetapkan oleh bupati/walikota, yang kemudian merinci alokasi pupuk berdasarkan jenis pupuk, kebutuhan kecamatan, dan data dari e-RDKK. Sistem e-RDKK ini menjadi dasar penting dalam penentuan alokasi, karena memuat data kebutuhan pupuk setiap kelompok tani yang telah diusulkan sebelumnya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hayyin, Sekretaris Desa Kuryokalangan, alokasi pupuk bersubsidi yang diterima desa sudah sesuai dengan data di e-RDKK, berikut pernyataannya.

*“Disini kami sebagai fasilitator, pupuk yang datang sesuai dengan alokasi yang sudah ditentukan, mbak. Tapi ada keluhan dari beberapa petani karena mereka merasa kuotanya kurang untuk memenuhi kebutuhan lahan mereka. Namun, dari sisi penyuluh, alokasi ini sudah dianggap cukup dan sesuai dengan data di e-RDKK.”* (Wawancara dengan Bapak Hayyin, Sekretaris Desa Kuryokalangan, 08 Oktober 2024, 12.21 WIB)

Di sisi lain, petani seperti Bapak Jumani menyampaikan keluhan bahwa kuota pupuk sering kali tidak mencukupi kebutuhan mereka, terutama pada musim tanam ketika kebutuhan pupuk meningkat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jumani petan di Desa Kuryokalangan menyatakan sebagai berikut:

*“Kami petani sering merasa pupuknya kurang, mbak. Apalagi kalau musim tanam. Meskipun katanya sesuai data, tapi kebutuhan di lapangan sering lebih besar dari alokasi yang ada.”* (Wawancara dengan Bapak Jumani, Petani Desa Kuryokalangan, 03 Oktober 2024, 16.20 WIB).

Kebijakan pupuk bersubsidi dirancang untuk memenuhi kebutuhan petani secara optimal berdasarkan data yang dihimpun melalui sistem e-RDKK. Proses

pengambilan keputusan dimulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah, dengan penetapan alokasi pupuk yang berjenjang. Alokasi pupuk bersubsidi ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2024, yang menjadi landasan utama dalam penetapan volume dan harga pupuk subsidi untuk sektor pertanian. Sistem ini bertujuan menciptakan transparansi dan keadilan dalam distribusi pupuk kepada petani kecil.

Di tingkat lapangan, hasil wawancara dengan Bapak Hayyin, Sekretaris Desa Kuryokalangan, menunjukkan bahwa alokasi pupuk di Desa Kuryokalangan sudah sesuai dengan data e-RDKK. Namun, terdapat keluhan dari petani, seperti yang disampaikan Bapak Jumani, terkait kurangnya kuota pupuk terutama pada musim tanam. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara data administratif dan kebutuhan riil petani di lapangan.

Kesenjangan ini memiliki dampak yang signifikan, terutama dalam mendukung produktivitas dan kesejahteraan petani. Sistem e-RDKK, meskipun memiliki keunggulan dalam hal administrasi dan transparansi, dinilai kurang fleksibel dalam merespons kondisi dinamis di lapangan, seperti perubahan kebutuhan pupuk selama musim tanam. Akibatnya, beberapa petani merasa kesulitan memenuhi kebutuhan lahan mereka, yang pada akhirnya memengaruhi hasil panen.

Dari sisi pemerintah desa, peran mereka lebih sebagai fasilitator, memastikan distribusi pupuk berjalan sesuai alokasi yang telah ditentukan. Namun, peran ini masih terbatas pada pengawasan teknis dan belum menjangkau upaya strategis untuk mengatasi kekurangan alokasi pupuk. Di sisi lain, penyuluh pertanian memainkan peran penting dalam mendampingi kelompok tani untuk menyusun data kebutuhan pupuk melalui e-RDKK.

Untuk mengatasi kendala ini, beberapa langkah strategis diperlukan, antara lain:

- a) Evaluasi Sistem e-RDKK: Sistem ini perlu diperbarui secara berkala agar lebih mencerminkan kebutuhan dinamis petani, terutama selama musim tanam.

- b) **Fleksibilitas Alokasi:** Perlu ada mekanisme tambahan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan pupuk pada kondisi tertentu, seperti musim tanam atau bencana alam.
- c) **Edukasi Petani:** Memberikan pelatihan terkait penggunaan pupuk yang tepat sesuai kondisi tanah, sehingga petani dapat memaksimalkan alokasi yang tersedia.
- d) **Penguatan Peran Pemerintah Desa:** Meskipun hanya sebagai fasilitator, pemerintah desa dapat lebih aktif dalam melaporkan kebutuhan tambahan atau membantu menyelesaikan kendala distribusi.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kebijakan pupuk bersubsidi tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan nyata petani. Hal ini penting agar tujuan utama program, yakni meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani, dapat tercapai secara optimal di Desa Kuryokalangan.

#### 5. Pelaksana Program (*Program Implementer*)

Dalam indikator ini, aktor memainkan peran penting dalam keberhasilan program. Aktor harus kompeten dan tercatat dengan jelas dalam kebijakan yang ada. Program yang baik biasanya memiliki implementator yang telah ditetapkan secara rinci, dan pelaksanaannya perlu melibatkan berbagai pihak untuk memastikan program berjalan dengan sukses.

Dalam implementasi program pupuk subsidi di Desa Kuryokalangan, berbagai aktor memainkan peran penting sebagai pelaksana kebijakan. Peran Aktor sangat penting untuk keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Program pupuk bersubsidi memiliki beberapa aktor penting dalam proses pelaksanaannya. Aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program ini mulai dari pusat hingga tingkat desa diatur berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 305 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Kebijakan Pupuk Bersubsidi.

Pertama, Dinas Pertanian berperan sebagai pengarah utama kebijakan pupuk bersubsidi di tingkat kabupaten. Dinas Pertanian bertugas memberikan panduan, memberikan pendanaan, menetapkan alokasi pupuk, dan mengawasi distribusi pupuk subsidi di wilayah kerjanya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Surya Dinas Pertanian:

*“Kami bertugas memberikan panduan teknis, menetapkan alokasi pupuk untuk setiap desa, dan memastikan bahwa proses distribusi berjalan sesuai aturan. Selain itu juga melakukan pemantauan berkala dan memberikan edukasi terkait penggunaan pupuk agar petani dapat memanfaatkannya secara optimal. Walau dalam beberapa evaluasi masih ada beberapa tantangan yang kita hadapi dan masih jadi PR bagi kami”* (Wawancara Bapak Surya selaku Ketua Tim Pupuk dan Pembiayaan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Pati, 11 Oktober 2024, 08.50 WIB)

Selanjutnya, penyuluh pupuk bertanggung jawab dalam memastikan ketersediaan dan distribusi pupuk ditingkat lokal, bekerja sama dengan kelompok tani dan perangkat desa agar distribusi tepat waktu dan tepat sasaran. Penyalur juga harus menjaga stok dan penyaluran pupuk berdasarkan data dari kelompok tani yang terverifikasi.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Eny Penyuluh Pupuk Subsidi di Desa Kuryokalangan:

*“Kami bekerja sama dengan kelompok tani dan juga perangkat desa untuk memastikan distribusi pupuk dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran serta selalu memastikan dalam menjaga ketersediaan stok dan melakukan pengecekan data petani penerima manfaat pupuk subsidi yang diberikan oleh kelompok tani. Dan selanjutnya memastikan bahwa pupuk sampai ke petani yang berhak sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan.”* (Wawancara Bu Eny selaku Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, 09 Oktober 2024, 07.35 WIB).

Selain itu, kelompok tani (poktan) merupakan pihak penting dalam program ini karena bertugas mengelola data petani penerima manfaat dan mengkoordinasikan pembagian pupuk di antara anggotanya. Selain itu, poktan juga berperan dalam sosialisasi penggunaan pupuk yang tepat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Widodo Ketua Kelompok Tani:

*“Sebagai kelompok tani kami bertanggung jawab dalam mengelola data anggota yang menerima pupuk subsidi dan mengkoordinasikan pembagian pupuk. Kami juga membantu mensosialisasikan tentang cara penggunaan pupuk yang benar agar produktivitas hasil panen meningkat. Selain itu juga selalu menyesuaikan jumlah pupuk berdasarkan luas lahan anggota dan melaporkan jika ada kekurangan pupuk,”* (Wawancara Bapak Widodo selaku Ketua Kelompok Tani Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, 04 Oktober 2024, 14.36 WIB)

Adapun pengecer pupuk resmi memiliki peran langsung dalam mendistribusikan pupuk subsidi kepada petani. Mereka menjadi penghubung antara pemerintah (produsen pupuk dan dinas pertanian) dengan kelompok tani atau petani penerima subsidi.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kamijan selaku pengecer resmi di Desa Kuryokalangan:

*“Kami mendistribusikan pupuk subsidi sesuai alokasi yang ditentukan dalam RDKK. Pupuk biasanya datang dari distributor dua kali setahun, yaitu menjelang musim tanam serta melayani petani yang terdaftar di kelompok tani.” (Wawancara Bapak Kamijan selaku pengecer pupuk resmi Desa Kuryokalangan, 07 Oktober 2024, 18.35 WIB)*

Terakhir, perangkat desa mendukung program ini dengan mendata petani yang berhak menerima subsidi, memfasilitasi pengumpulan data, dan membantu distribusi di tingkat desa.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hayyin Sekretaris di Desa Kuryokalangan:

*“Kami membantu mendata petani yang memenuhi syarat untuk mendapatkan kuota pupuk subsidi. Kami juga memfasilitasi pengumpulan data petani di Desa Kuryokalangan ini agar semua berjalan dengan tertib dan terstruktur.” (Wawancara Bapak Hayyin Sekretaris Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, 08 Oktober 2024, 12.20 WIB).*

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa distribusi pupuk bersubsidi dilakukan berdasarkan data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disusun oleh kelompok tani. Kelompok Tani Makmur Desa Kuryokalangan memainkan peran penting dalam menentukan petani penerima pupuk subsidi serta jenis komoditas yang berhak mendapatkan subsidi.

Di tingkat Kabupaten Pati dan Desa Kuryokalangan, pemerintah bertugas mengimplementasikan program tersebut sesuai arahan pusat. Namun, meskipun para aktor implementasi telah menjalankan perannya sesuai kewajiban, beberapa kendala dalam pelaksanaan program pupuk subsidi masih tetap ditemukan, seperti keterbatasan alokasi pupuk yang dirasa belum cukup untuk kebutuhan petani, terutama pada musim tanam.

Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan evaluasi berkelanjutan terhadap mekanisme distribusi dan fleksibilitas alokasi pupuk bersubsidi. Dengan adanya

sinergi antar-aktor serta penyesuaian terhadap kebutuhan riil petani, diharapkan pelaksanaan program dapat lebih optimal dalam mendukung produktivitas dan kesejahteraan petani di Desa Kuryokalangan.

#### 6. Sumber Daya yang Tersedia (*Resources Committed*)

Sumber daya harus selalu ada saat membuat program atau kebijakan, sehingga dengan adanya program kemudian akan membawa manfaat secara fisik maupun non fisik (Wachidah & dkk, 2022).

Dalam implementasi kebijakan program pupuk subsidi, jenis dan sumber daya yang digunakan memiliki peran penting dalam mencapai tujuan program ini. Sumber daya ini bisa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok utama, yaitu tenaga kerja (staf), informasi, wewenang (otoritas), fasilitas, serta sumber daya keuangan yang sangat diperlukan dalam proses implementasi kebijakan.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian sudah mempersiapkan dengan baik dengan mengalokasikan sumber daya yang tepat. Sumber daya ini mencakup tidak hanya tenaga kerja dari berbagai instansi terkait, namun juga lembaga-lembaga yang mempunyai tanggung jawab khusus untuk melaksanakan program pupuk subsidi ini.

Pertama, untuk melakukan program ini secara optimal dalam implementasi program pupuk subsidi di Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati perlu adanya instansi dan tenaga kerja yang terlibat dalam program tersebut di Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati:

- a. Koordinasi Pelaksana (Dinas Pertanian Kabupaten Pati): Dinas Pertanian berperan sebagai koordinator utama dalam pelaksana program pupuk di Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati. Dinas Pertanian memiliki otoritas sebagai fungsi pengawasan, fungsi pengendalian dan mengevaluasi implementasi program secara keseluruhan, serta memastikan distribusi pupuk tepat sasaran dan sesuai dengan alokasi yang ada.
- b. Dukungan Penyedia Pupuk (Pengecer dan Kios Resmi): Pengecer dan kios resmi berperan sebagai penyedia pupuk subsidi kepada para petani penerima pupuk subsidi di Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati. Serta pengecer dan kios juga memastikan bahwa pendistribusian pupuk dilakukan sesuai jadwal serta tepat sasaran bagi penerima yang berhak, sejalan dengan kuota dan alokasi yang ditetapkan Pemerintah. Terdapat satu kios pengecer pupuk di desa ini yaitu UD. Kami Jaya.

- c. Kelompok Tani (Poktan Makmur dan Subur): Kelompok tani di Desa Kuryokalangan, seperti kelompok tani Makmur dan Subur, memiliki peran penting dalam menentukan daftar petani penerima subsidi berdasarkan luas lahan dan jenis tanaman. Poktan juga aktif mensosialisaikan program kepada anggotanya serta memiliki peran dalam pendataan dan mengawasi penerima pupuk di Desa Kuryokalangan. Jumlah keseluruhan dari petani yang tergabung dalam kedua kelompok tani tersebut adalah sebanyak 328 petani penerima bantuan pupuk bersubsidi.
- d. Perangkat Desa dan Kecamatan: Perangkat desa dan kecamatan berperan sebagai fasilitator dalam mengkoordinasikan layanan administrasi dan dukungan teknis bagi petani di Desa Kuryokalangan. Perangkat desa dan kecamatan juga memastikan bahwa para petani memahami syarat dan prosedur untuk mendapatkan pupuk subsidi dan berfungsi sebagai penghubung antara petani dengan pemerintah terkait. Setidaknya terdapat dua orang yang ditugaskan untuk membidangi program ini.

Kedua, adanya sumber daya berupa pupuk itu sendiri, dalam pelaksanaan program pupuk subsidi ini yang berasal dari pemerintah pusat dan dialokasikan hingga tingkat desa.

Gubernur Jawa Tengah telah mengalokasikan berbagai jenis pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Pati jumlah pupuk yang dialokasikan meliputi:

Tabel 17 Alokasi Pupuk Kabupaten Pati 2023

Jenis Pupuk	Jumlah (Ton)
Urea	47.000
NPK	26.000
NPK F. Khusus	80

Tabel 18 Alokasi Pupuk Kabupaten Pati 2024

Jenis Pupuk	Jumlah (Ton)
Urea	40.628,854
NPK	38.866,213
NPK F. Khusus	-
Organik	1.300

Terdapat perbedaan pada jenis pupuk di kedua tahun tersebut yakni pada tahun 2023 tidak terdapat pupuk jenis organik, namun hal itu tidak menjadi permasalahan

di Desa Kuryokalangan dikarenakan petani di desa ini tidak memerlukan pupuk jenis organik. Dapat dilihat dari tabel 13 dan tabel 14 alokasi pupuk urea mengalami penurunan jumlah pupuk sebesar 6.371,146 Ton, jenis NPK mengalami kenaikan alokasi sebanyak 12.866,213 Ton dan jenis NPK F Khusus di tahun 2024 tidak lagi ada.

Distribusi pupuk dilakukan secara bertahap berdasarkan kebutuhan yang tercatat dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Di Kecamatan Gabus pada tahun 2023 alokasi pupuk sebanyak 3.605,38 Ton, di tahun 2024 total alokasi pupuk mencapai 3.827,664 Ton, dengan sebaran jenis pupuk urea dan NPK. Distribusi ini dilakukan dalam dua tahap utama, yaitu sebelum musim tanam pertama dan kedua, untuk memastikan kebutuhan petani sesuai jadwal.

Program pupuk subsidi juga didukung oleh anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat dan disalurkan hingga ke tingkat desa. Dana ini digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti sosialisasi program, insentif bagi tenaga pelaksana, dan operasional distribusi pupuk.

Berdasarkan wawancara dengan Petugas Dinas Pertanian:

*“Alokasi berasal dari Pempus dan disalurkan hingga tingkat desa sesuai kebutuhan wilayah. Setiap tingkat, dari pusat hingga desa bertanggung jawab mengelola anggaran ini sesuai ketentuan,”* (Wawancara Bapak Surya selaku Ketua Tim Pupuk dan Pembiayaan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Pati, 11 Oktober 2024, 08.50 WIB)

Ketiga, fasilitas pendukung seperti kios resmi di setiap desa dan gudang penyimpanan di tingkat distribusi juga disediakan untuk memastikan proses distribusi berjalan lancar. Kios resmi bertugas menjual pupuk subsidi sesuai kuota, sementara gudang distributor berfungsi sebagai pusat penyimpanan sebelum pupuk didistribusikan ke pengecer.

Dapat disimpulkan bahwa sumber daya tersedia dalam implementasi program pupuk subsidi mencerminkan komitmen pemerintah untuk mendukung sektor pertanian. Dengan dukungan tenaga kerja, alokasi pupuk yang mencukupi, anggaran yang terencana, dan fasilitas yang memadai, program ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian di Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati. Namun, evaluasi berkala dan koordinasi yang lebih baik antar pihak terkait dalam pelaksanaan program pupuk bersubsidi Di Desa Kuryokalangan, masih diperlukan perbaikan pada aspek koordinasi, pelatihan, dan pengelolaan distribusi

agar program ini dapat berjalan lebih efektif. Serta memastikan distribusi pupuk benar-benar tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan petani di Desa Kuryokalangan.

## **BAB V**

### **ANALISIS KONTEKS KEBIJAKAN PROGRAM PUPUK BERSUBSIDI DI DESA KURYOKALANGAN KECAMATAN GABUS KABUPATEN PATI**

#### **A. Konteks Kebijakan (*Context of Policy*)**

Konteks kebijakan memainkan peran penting dalam kesuksesan program. Beberapa aspek dalam konteks kebijakan ini meliputi kekuasaan, karakteristik lembaga, dan tingkat kepatuhan pelaksana dalam melaksanakan program ini. Berikut adalah rinciannya:

##### **1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat (*Power, Interest and Strategy of Actor Involved*)**

Teori Grindle menekankan pentingnya kekuasaan dan peran aktor dalam mempengaruhi kebijakan. Dalam konteks kebijakan pupuk subsidi, kekuasaan dipegang oleh Menteri Pertanian selaku pembuat kebijakan ditingkat pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota selaku pembuat kebijakan tingkat daerah dan Dinas Pertanian, pemerintah desa, penyuluh pertanian, serta Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) selaku pelaksana kebijakan.

Dalam kebijakan ini, Dinas Pertanian Kabupaten Pati memiliki peran dalam menetapkan alokasi pupuk subsidi berdasarkan penetapan alokasi dari tingkat provinsi maupun pusat, sementara penyuluh pertanian bersama pemerintah desa berperan dalam bersosialisasi dan koordinasi dengan kelompok tani dan petani untuk memastikan program pupuk bersubsidi berjalan semestinya. Keberhasilan implementasi program memang diperlukan adanya suatu strategis oleh aktor-aktor yang terlibat dalam lingkaran kebijakan. Seperti pada program ini strategi dalam komunikasi program oleh penyuluh pertanian kepada para petani maupun melalui kelompok tani sangat penting karena penyuluh pertanian adalah aktor yang paling dekat dengan penerima pupuk subsidi yaitu petani. Penyuluh pertanian harus benar-benar memastikan data penerima pupuk subsidi sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Kebijakan pupuk subsidi di Indonesia terjal lama diterapkan sebagai upaya pemerintah untuk mendukung sektor pertanian, khususnya petani kecil. Dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 1 Tahun 2024 pembaharuan dari Peraturan Menteri No 10 Tahun 2022, kebijakan pupuk subsidi hanya mencakup 2

jenis, yaitu Urea dan NPK. Kebijakan yang lebih terbatas ini tidak sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan beragam komoditas yang ditanam oleh petani, sehingga petani sering kali menghadapi kesulitan dalam menghadapi pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanah dan tanaman. Dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 1 Tahun 2024 menjadi pembaharuan dengan menambah dua jenis pupuk baru dalam daftar subsidi, yakni menjadi urea, NPK, NPK Khusus, pupuk organik. Dalam penambahan jenis komoditas ini menjadikan penambahan alokasi pupuk bagi petani sehingga lebih banyak dan lebih fleksibel bagi petani dalam memenuhi kebutuhan pertanian. Meski demikian, di Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, pembaruan tersebut tidak terlalu berdampak pada jenis pupuk yang digunakan.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Eny selaku penyuluh pertanian di Desa Kuryokalangan:

*“Pupuk subsidi Urea dan NPK sudah cukup untuk kebutuhan pertanian kami. Pupuk lain seperti ZA atau organik belum relevan di Desa Kuryokalangan karena komoditas kami tidak memerlukannya,”* (Wawancara Ibu Eny Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Gabus, 09 Oktober 2024, 07.30 WIB).

Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Widodo, Ketua Kelompok Tani Desa Kuryokalangan dengan sebagai berikut:

*“Kami tetap fokus menggunakan Urea dan NPK. Kebutuhan kami untuk pupuk subsidi masih sesuai alokasi yang diberikan oleh pemerintah.”* (Wawancara Bapak Widodo Ketua Kelompok Tani, 04 Oktober 2024, 14.36 WIB).

Selanjutnya dilanjutkan wawancara dengan Bapak Surya selaku Dinas Pertanian mengungkapkan sebagai berikut:

*“Dinas Pertanian melalui PPL melakukan koordinasi dengan desa dengan kelompok tani, dapoktan dan KPL dalam setiap mau pengusulan mereka selalu mengadakan pertemuan semacam rapat membahas tentang data yang diusulkan dan ada koreksi, kemudian ketika ada alokasi turun desa ini punya alokasi sekian dan petani bisa mendapatkan sekian sesuai alokasi yang ada, sifatnya mensosialisasikan alokasi yang ada”.* (Wawancara Bapak Surya selaku Ketua Tim Pupuk dan Pembiayaan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Pati, 11 Oktober 2024, 08.50 WIB)

Selanjutnya Berdasarkan wawancara dengan Ibu Eny selaku penyuluh pertanian Desa Kuryokalangan yang ditugaskan oleh Dinas Pertanian menyatakan sebagai berikut:

*“Kami berkolaborasi dengan kelompok tani dan pemerintah desa yang turun langsung melakukan pengawasan ke lapangan dan melakukan sosialisasi kepada petani. Sosialisasi ini dilakukan untuk memastikan semua anggota paham mengenai aturan terkait kebijakan pupuk subsidi,”* (Wawancara Bu Eny selaku Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, 09 Oktober 2024, 07.15 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut keberhasilan implementasi kebijakan di Desa Kuryokalangan didukung oleh peran aktif penyuluh pertanian, pemerintah desa, dan kelompok tani dalam memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, alokasi sesuai kebutuhan, dan harga tetap dalam batas yang ditetapkan. Meskipun jenis pupuk subsidi bertambah, fleksibilitas kebijakan ini memberikan ruang bagi daerah untuk menyesuaikan kebutuhan tanpa mengganggu stabilitas penggunaan pupuk di desa seperti Kuryokalangan. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya pada pembuat kebijakan, tetapi juga melibatkan peran kolaborasi dengan pihak-pihak yang bertugas dan bersinggungan langsung dengan penerima pupuk subsidi.

Kebijakan subsidi pupuk perlu lebih fleksibel dengan melibatkan petani secara aktif dalam pengambilan keputusan alokasi. Selain itu, pelatihan intensif harus dilakukan untuk memastikan pemahaman petani tentang penggunaan pupuk sesuai kebutuhan. Langkah-langkah ini dapat meningkatkan keberhasilan kebijakan sekaligus mendukung keberlanjutan sektor pertanian.

## 2. **Karakteristik suatu Lembaga (*Intitution and Rezime Characteristic*)**

Karakteristik suatu lembaga dalam kebijakan publik adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Merille S. Grindle (1980) menjelaskan bahwa lingkungan kebijakan turut menjadi keberhasilannya, baik secara langsung atau tidak langsung. Karakteristik ini mencakup peran institusi yang bertanggung jawab dalam mengarahkan kebijakan serta hubungan mereka dalam mengarahkan kebijakan serta hubungan mereka dengan masyarakat sebagai penerima manfaat. Leo Agustino (2016) menyebutkan bahwa dukungan dan struktur kelembagaan yang kuat dapat membantu mencapai tujuan kebijakan.

Dalam konteks program pupuk bersubsidi di Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati terdapat perubahan signifikan antara tahun 2023 dan 2024

yang mencerminkan dinamika peran lembaga dalam mendukung kebijakan ini. Menurut Permentan No. 01 Tahun 2024 dan Surat Keputusan (SK) Bupati Pati Nomor 521.1992 Tahun 2024, tata kelola pupuk bersubsidi mengalami perbaikan untuk meningkatkan ketepatan sasaran, efisiensi distribusi, dan keterlibatan para pihak.

Pada tahun 2023, implementasi program pupuk bersubsidi mengacu pada Permentan No. 10 Tahun 2022, yang menggunakan sistem e-RDKK sebagai dasar distribusi. Namun, sistem ini belum optimal karena sering terjadi ketidaksesuaian data petani, mengakibatkan keterlambatan distribusi dan ketidaktepatan sasaran. Sebaliknya pada tahun 2024, kebijakan baru melalui Permentan No. 01 Tahun 2024 menekankan prioritas subsidi untuk tanaman pangan, hortikultura, atau perkebunan. Usaha tani di bidang tanaman pangan meliputi, jagung dan kedelai. Usaha tani dibidang hortikultura adalah cabai, bawang merah dan bawang putih. Usaha tani dibidang perkebunan adalah tebu rakyat, kakao, dan kopi. Jadi terdapat Sembilan macam jenis tanaman pertanian yang mendapat pupuk bersubsidi yang terbagi dalam empat jenis pupuk yaitu urea, NPK, NPK Khusus dan organik. Surat Keputusan Bupati Pati Nomor 521.1992 Tahun 2024 juga mengatur kuota pupuk berdasarkan kebutuhan lokal, mencerminkan responsivitas lembaga terhadap kondisi lapangan.

Berdasarkan wawancara dengan Bu Eny Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Gabus:

*“Kami berkomitmen untuk membantu petani, baik dalam administrasi program maupun motivasi agar mereka lebih produktif, inovatif, dan adaptif menghadapi perubahan.”*(Wawancara Ibu Eny Selaku Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, 09 Oktober 2024, 07.35 WIB).

Selain itu, Bapak Surya, Ketua Tim Pupuk dan Pembiayaan Dinas Pertanian Kabupaten Pati, menegaskan bahwa program ini juga diarahkan untuk mendukung praktik pertanian berkelanjutan.

Berikut wawancara dengan Bapak Surya Dinas Pertanian Kabupaten Pati:

*“Harapan kami, program pupuk subsidi tidak hanya membantu petani secara ekonomi tetapi juga mendorong penerapan praktik pertanian berkelanjutan.”* (Wawancara Bapak Surya Selaku Ketua Tim Pupuk dan Pembiayaan Bidang Prasarana dan Sarana

Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Pati, 11 Oktober 2024, 08.50 WIB).

Kabupaten Pati, yang dikenal dengan moto “Pati Bumi Mina Tani”, terus berupaya memperkuat sektor pertanian sebagai pilar utama ekonomi. Program pupuk bersubsidi adalah salah satu langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas tani sekaligus mengurangi biaya produksi petani. Dengan pengelolaan pupuk yang tepat sasaran, petani dapat meningkatkan hasil panen secara berkelanjutan, sejalan dengan tujuan pembangunan daerah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan karakteristik lembaga yang menangani program pupuk bersubsidi di Desa Kuryokalangan menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2024. Dukungan regulasi melalui Permentan No. 01 Tahun 2024 dan SK Bupati Pati Nomor 521.1992 Tahun 2024 memperkuat koordinasi antar-lembaga dan peran penyuluh dalam mendorong praktik pertanian berkelanjutan. Namun, masih diperlukan upaya lebih untuk meningkatkan validasi data, kapasitas lembaga lokal, pemanfaatan teknologi digital, dan pendampingan pertanian berkelanjutan. Dengan memperbaiki kelemahan ini, kebijakan pupuk bersubsidi dapat menjadi lebih efektif, adil, dan mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

### 3. **Tingkat kepatuhan dan respons pelaksana (*Compliance and Responsiveness*)**

Implementasi program pupuk subsidi di Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, bergantung pada tingkat kepatuhan dan respons dari para pelaksana kebijakan. Program ini bertujuan untuk menurunkan biaya produksi, meningkatkan produktivitas hasil tani, dan mendukung kesejahteraan petani kecil. Dalam pelaksanaannya, peran penyuluh pertanian, kelompok tani, dan pemerintah desa sangat menentukan keberhasilan program.

Daya tanggap para pelaksana mengacu pada sejauh mana mereka memahami tugas serta tanggung jawab yang telah ditentukan dalam kebijakan ini. Di Desa Kuryokalangan, penyuluh pertanian dari Badan Penyuluh Pertanian (BPP) berperan penting dalam mendistribusikan informasi kepada petani. Penyuluh bertugas memastikan petani memahami tatacara mengakses dan memanfaatkan pupuk subsidi dengan bijak. Selain itu, penyuluh melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi kendala yang muncul dalam distribusi pupuk subsidi.

Hal ini ditegaskan oleh Bu Eny penyuluh pertanian di Desa Kuryokalangan, yang menyatakan:

*“Harapan kami dengan adanya program pupuk subsidi ini dapat terus ditingkatkan dan lebih tepat sasaran. Juga petani semakin mudah dalam mengakses pupuk yang terjangkau sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian.”* (Wawancara Ibu Eny Selaku Koordinator Sekaligus Penyuluh Pertanian di Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, 09 Oktober 2024, 07.30 WIB).

Selain penyuluh, kelompok tani seperti Kelompok Tani Makmur juga memiliki peran sentral. Kelompok tani bertugas mendata anggota yang berhak menerima pupuk subsidi, memastikan distribusi sesuai alokasi, dan memberikan motivasi kepada anggotanya agar memanfaatkan pupuk subsidi secara optimal.

Berikut berdasarkan wawancara Bapak Widodo, Ketua Kelompok Tani Makmur, mengungkapkan sebagai berikut:

*“Kami bertugas melakukan pendataan dan memastikan anggota kelompok tani Makmur ini menerima sesuai alokasi. Tak hanya dalam hal administrasi, tetapi kami juga selalu memberikan motivasi kepada anggota kelompok tani untuk memanfaatkan pupuk subsidi secara optimal demi meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian.”* (Wawancara Bapak Widodo Selaku Ketua Kelompok Tani Desa Kuryokalangan, 04 Oktober 2024, 14.36 WIB).

Namun, di sisi lain peran perangkat desa dinilai kurang aktif dalam mendukung program ini. Petani lebih memilih untuk langsung berkoordinasi dengan penyuluh atau ketua kelompok tani daripada melibatkan perangkat desa.

Hal ini diungkapkan oleh Bapak Jumani, salah satu petani di Desa Kuryokalangan:

*“Kalau ada masalah kami langsung ke kelompok tani, Mbak, dan juga ke Pak Kamijan yang bawa pupuk, dibanding dengan perangkat desa karena kamituwo tidak begitu mengurus sektor pertanian.”* (Wawancara dengan Bapak Jumani salah satu petani Di Desa Kuryokalangan, 03 Oktober 2024, 16.20 WIB).

Dalam menilai tingkat kepatuhan dan respons pelaksana, perlu melihat bagaimana kebijakan subsidi pupuk mengalami perubahan dari tahun 2023 ke 2024. Pada tahun 2023, kebijakan ini mengacu pada Permentan No. 10 Tahun 2022 yang menggunakan sistem e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani secara elektronik) sebagai dasar distribusi pupuk subsidi. Namun, implementasi kebijakan

ini menghadapi berbagai kendala, seperti data petani yang tidak valid atau tidak diperbarui, sehingga distribusi pupuk sering kali terlambat dan tidak tepat sasaran. Koordinasi antara perangkat desa, penyuluh pertanian, dan kelompok tani juga belum optimal, yang mengakibatkan sosialisasi kebijakan tidak menyeluruh.

Pada tahun 2024, kebijakan ini mengalami penyempurnaan melalui Permentan No. 01 Tahun 2024 dan SK Bupati Pati Nomor 521.1992 Tahun 2024. Kebijakan baru ini memprioritaskan subsidi untuk komoditas strategis seperti padi, jagung, dan kedelai. Perubahan ini menciptakan peningkatan signifikan dalam validitas data, efisiensi distribusi, dan daya tanggap pelaksana. Penyuluh pertanian lebih proaktif dalam memperbarui data petani, sementara kelompok tani memastikan distribusi dilakukan sesuai alokasi.

Meski demikian, perangkat Desa Kuryokalangan tetap menunjukkan peran yang minim dalam mendukung kebijakan ini. Hal ini menjadi tantangan yang perlu diatasi agar implementasi program dapat berjalan lebih optimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi program pupuk subsidi di Desa Kuryokalangan menunjukkan daya tanggap dan kepatuhan yang cukup tinggi dari penyuluh dan kelompok tani. Namun, minimnya peran perangkat desa menimbulkan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan program. Perubahan kebijakan pada tahun 2024 membawa dampak positif dengan meningkatkan efisiensi distribusi dan keakuratan data penerima manfaat. Kedepannya, keterlibatan perangkat Desa Kuryokalangan perlu ditingkatkan untuk mendukung keberlanjutan kebijakan subsidi pupuk dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

## **B. Faktor Pendukung Implementasi Program Pupuk Bersubsidi Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati**

Faktor pendukung implementasi program pupuk subsidi di Desa Kuryokalangan mencakup peran serta pemerintah melalui regulasi dan kebijakan yang jelas, dukungan dari Dinas Pertanian, serta koordinasi dengan perangkat desa. Dukungan ini menjadi elemen penting dalam pelaksanaan program untuk menjamin distribusi pupuk subsidi terlaksana dengan lancar serta tepat sasaran.

Pemerintah memainkan peran penting dalam pelaksanaan program pupuk subsidi di Desa Kuryokalangan. Berbagai kebijakan telah diterapkan untuk memastikan program ini terlaksana secara efektif serta tepat sasaran, sehingga dapat mendukung para petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian mereka. Program bantuan subsidi pupuk yang

dirancang untuk meningkatkan produktivitas pertanian dengan memberikan akses pupuk yang lebih terjangkau bagi para petani. Hal ini terutama ditunjuk untuk membantu petani kecil yang berada di sektor pertanian dan membutuhkan dukungan dalam meningkatkan hasil produksi. Pemerintah yang berperan dalam memastikan ketersediaan pupuk secara berkelanjutan melalui berbagai kebijakan yang memadai, seperti penentuan harga pupuk subsidi yang terjangkau dan mekanisme distribusi yang efisien. Melalui dukungan pemerintah ini, para petani di Desa Kuryokalangan dapat memperoleh pupuk dengan harga yang lebih rendah dibanding dengan harga pasar. Dengan demikian, mereka mampu menekan biaya produksi yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pendapat mereka.

#### 1. Aturan-aturan Hukum yang Jelas

Aturan hukum yang jelas merupakan rujukan penting dalam pelaksanaan program pupuk subsidi. Pemerintah Pusat menetapkan regulasi terkait penyaluran pupuk subsidi, termasuk kriteria penerima, jenis pupuk yang disubsidi, dan mekanisme distribusinya. Hal ini membantu petani di Desa Kuryokalangan untuk mengakses pupuk subsidi secara adil dan tepat waktu.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Surya, petugas dari Dinas Pertanian Kabupaten Pati menyampaikan:

*“Regulasi yang telah ditetapkan oleh Pempus memberikan pedoman yang jelas bagi semua pihak yang terlibat dalam program ini, sehingga program subsidi pupuk dapat dilaksanakan dengan efektif dan mencapai sasaran yang tepat,”* (Wawancara Bapak Surya Sekelu Ketua Tim Pupuk dan Pembiayaan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Pati, 11 Oktober 2024, 08.30 WIB)

Disampaikan oleh pengecer pupuk resmi di Desa Kuryokalangan:

*“Aturan dari pemerintah sudah jelas disampaikan, jadi kami bisa menjalankan penyaluran pupuk subsidi tanpa ada kendala yang berarti,”* (Wawancara Bapak Kamijan selaku pengecer pupuk resmi di Desa Kuryokalangan, 07 Oktober 2024, 18.35 WIB).

Disampaikan juga oleh Bapak Jumani Petani Desa Kuryokalangan:

*“Adanya aturan yang jelas mengenai program pupuk subsidi, saya jadi lebih paham tentang cara mendapatkan pupuk dan persyaratan yang harus dipenuhi,”* (Wawancara Bapak Jumani selaku petani di Desa Kuryokalangan, 03 Oktober 2024, 16.15 WIB)

Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program pupuk subsidi di Desa Kuryokalangan, dukungan regulasi yang jelas dari pemerintah menjadi elemen penting yang memastikan kelancaran program. Regulasi ini berfungsi sebagai pedoman bagi semua pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah daerah sampai petani, sehingga program bisa dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran. Dan secara keseluruhan, regulasi yang jelas dari pemerintah tidak hanya memastikan distribusi pupuk subsidi berjalan lancar, tetapi juga memperkuat kepercayaan dan pemahaman petani terhadap program yang bertujuan mendukung produktivitas pertanian di desa mereka.

## 2. Program Pelatihan dan Edukasi bagi Petani

Salah satu faktor yang vital dalam keberhasilan implementasi program pupuk subsidi di Desa Kuryokalangan adalah adanya dukungan kebijakan melalui program pelatihan dan edukasi bagi petani. Program ini tidak hanya terfokus dengan distribusi pupuk subsidi, namun juga memberikan sosialisasi kepada petani terkait cara penggunaan pupuk yang tepat dan teknik pertanian yang baik. Pelatihan ini bertujuan untuk membuat pemahaman para petani meningkat agar mereka bisa mengoptimalkan pemanfaatan pupuk subsidi dan menerapkan praktik pertanian yang berkelanjutan. Pengetahuan petani tentang teknik pertanian yang benar adalah kunci untuk mencapai hasil produksi yang maksimal. Oleh karena itu, Dinas Pertanian bersama kelompok tani secara rutin mengadakan kegiatan pelatihan dan sosialisasi, di mana para petani diberikan penjelasan tentang pentingnya penggunaan pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman serta dampak positifnya pada produktivitas pertanian. Selain itu, petani juga dilatih untuk memahami teknik-teknik pertanian yang dapat membantu meningkatkan kesuburan tanah dan mengurangi ketergantungan pada bahan kimia.

Melalui dukungan kebijakan ini diharapkan para petani di Desa Kuryokalangan tidak hanya bergantung pada pupuk subsidi, tetapi juga mampu mengembangkan keterampilan pertanian mereka untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan hasil panen. Pelatihan ini juga menjadi wadah bagi petani untuk berdiskusi dan saling bertukar pengalaman tentang cara terbaik dalam bercocok tanam.

Disampaikan oleh Ibu Eny Selaku Penyuluh Pertanian yang di tugaskan di Desa Kuryokalangan:

*“Kami menyadari bahwa pengetahuan yang memadai tentang penggunaan pupuk dan teknik pertanian adalah fondasi utama dalam program ini. Oleh karena itu, kami memberikan pelatihan kepada para petani agar mereka tahu cara memanfaatkan pupuk subsidi dengan benar, sesuai dosis dan waktu yang tepat. Kami juga mengenalkan mereka pada teknik bercocok tanam yang ramah lingkungan. Harapannya, dengan pelatihan ini, para petani dapat memahami manfaat jangka panjang dari praktik pertanian yang baik dan benar”* (Wawancara Bu Eny selaku Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, 11 Oktober 2024, 08.30 WIB).

Disampaikan juga oleh ketua kelompok tani di Desa Kuryokalangan:

*“Sebagai kelompok tani, kami bertanggung jawab untuk memastikan setiap anggota memahami program pupuk subsidi ini. Kami rutin mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan cara terbaik dalam mengelola pupuk subsidi, dan kami juga membantu menjelaskan kepada petani tentang teknik-teknik pertanian yang lebih efisien. Dengan begitu, kami bisa membantu sesama petani untuk memperoleh hasil panen yang lebih baik dan menjaga tanah,”* (Wawancara Bapak Widodo selaku Ketua Kelompok Tani Subur, 04 Oktober 2024, 14.36 WIB)

Berdasarkan dukungan kebijakan ini, dapat dilihat bahwa Penyuluh Pertanian dan kelompok tani Desa Kuryokalangan berperan aktif dalam mengedukasi petani agar para petani dapat memanfaatkan pupuk subsidi secara optimal dan menerapkan praktik pertanian yang benar. Pelatihan dan sosialisasi ini tidak hanya memberikan pengetahuan tambahan kepada para petani tetapi juga mendorong para petani di Desa Kuryokalangan untuk lebih mandiri dalam menjaga hasil pertanian dan keseimbangan lingkungan.

### 3. Dukungan Akses yang Mudah ke Kios Pupuk

Salah satu faktor penting yang mendukung keberhasilan implementasi program pupuk subsidi di Desa Kuryokalangan adalah kemudahan akses petani ke kios pupuk resmi. Ketersediaan kios pupuk resmi yang terjangkau dan mudah dijangkau oleh petani sangat membantu proses distribusi pupuk subsidi. Pemerintah, melalui Dinas Pertanian, telah menetapkan sejumlah kios resmi yang didistribusikan secara strategis di berbagai titik agar para petani di desa dapat dengan mudah memperoleh pupuk subsidi sesuai kebutuhan mereka.

Keberadaan kios resmi ini memastikan bahwa petani bisa membeli pupuk dengan harga yang sudah pemerintah tentukan tanpa harus khawatir dengan praktik harga yang tidak sesuai atau kekurangan stok. Lokasi kios yang dekat dengan area

pertanian juga mengurangi biaya transportasi bagi petani, sehingga hal itu lebih mempermudah petani.

Disampaikan oleh petugas Dinas Pertanian menjelaskan:

*“Penempatan kios-kios pupuk resmi di lokasi yang strategis agar petani tidak perlu menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan pupuk subsidi. Hal ini dilakukan untuk mempermudah petani dalam memperoleh pupuk, dan memastikan mereka dapat membeli dengan harga yang sesuai ketentuan. Dengan adanya kios resmi yang mudah diakses, berharap kami program pupuk subsidi ini dapat berjalan lebih lancar dan mencapai sasaran yang tepat.”* (Wawancara Bapak Surya Selaku Ketua Tim Pupuk dan Pembiayaan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Pati, 11 Oktober 2024, 08.30 WIB)

Disampaikan juga oleh Bapak Ahmad Fakhri petani di Desa Kuryokalangan:

*“Dengan adanya kios pupuk di dekat desa, kami jadi lebih mudah mendapatkan pupuk tanpa harus pergi jauh. Harganya juga sudah jelas. Ini sangat membantu kami.”* (Wawancara Bapak Ahmad Fakhri Petani Desa Kuryokalangan, 03 Oktober 2024, 08.38 WIB)

Dengan adanya dukungan dari pemerintah dalam menyediakan kios pupuk resmi yang mudah diakses, program pupuk subsidi di Desa Kuryokalangan dapat berjalan lebih efisien. Kemudahan akses ini tidak hanya membantu dalam distribusi pupuk, tetapi juga memastikan bahwa petani bisa mendapatkan pupuk sesuai kebutuhan mereka, sehingga produktivitas pertanian dapat terus meningkat. Kios-kios resmi ini menjadi solusi penting dalam memenuhi kebutuhan pupuk dengan harga yang terjangkau, sehingga petani di Desa Kuryokalangan dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan hasil pertanian desa secara berkelanjutan.

### **C. Faktor Penghambat Implementasi Program Pupuk Bersubsidi Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati**

Program pupuk subsidi di Desa Kuryokalangan memiliki tujuan untuk mendukung peningkatan hasil pertanian di Desa Kuryokalangan menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Beberapa hambatan utama yang mengganggu kelancaran program ini adalah masalah distribusi pupuk subsidi yang tidak optimal, ketersediaan pengetahuan petani, dan kurang aktifnya kontribusi pemerintah desa. Berikut penjelasan mengenai masing-masing hambatan tersebut.

## 1. Distribusi Pupuk Subsidi yang Tidak Optimal

### a. Keterlambatan Distribusi Pupuk Subsidi

Keterlambatan distribusi pupuk subsidi menjadi salah satu masalah yang sering dialami petani. Pada musim tanam tiba pupuk subsidi sering terdambat dalam ketersediaannya. Hal ini berdampak pada proses tanam yang berpotensi menurunkan hasil panen. Kondisi ini memberikan tekanan tambahan kepada petani, terutama petani sangat menggantungkan pada pupuk subsidi untuk menjaga biaya tetap rendah.

Disampaikan oleh salah satu petani di Desa Kuryokalangan:

*“Pupuk subsidi ini terkadang telat, saat musim tanam belum turun jadi mau gak mau harus beli pupuk nonsubsidi, yang harga jauh lebih mahal. Terus baru turun setelah musim tanam, jadi pupuknya ya nganggur,” (Wawancara dengan Bapak Jumani selaku Petani di Desa Kuryokalangan, 03 Oktober 2024, 16.13 WIB)*

Dapat disimpulkan bahwa meskipun pupuk subsidi tersedia, namun ketidakpastian dalam waktu kedatangan dapat berdampak pada perencanaan dan keberhasilan musim tanam. Dimulai, efektivitasnya pemupukan yang optimal sudah terlewati. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi yang tidak tepat waktu tidak hanya menghambat proses pertanian, tetapi juga menambah beban finansial bagi petani. Pada akhirnya, meskipun tujuan dari subsidi pupuk adalah untuk membantu, realisasi di lapangan menunjukkan kebutuhan untuk perbaikan dalam segi ketepatan waktu distribusi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh petani.

### b. Redistribusi Informal Pupuk Tidak Diambil

Masalah lain yang muncul dalam program pupuk subsidi di Desa Kuryokalangan adalah praktik redistribusi informal pupuk subsidi yang tidak diambil oleh penerima resmi. Pupuk yang tidak diambil oleh penerima resmi sering kali dijual kepada petani lain yang membutuhkan, baik di dalam ataupun di luar desa.

Berdasarkan wawancara dengan Petani luar Desa (Desa Sambirejo) yang menerima pupuk subsidi dari Desa Kuryokalangan:

*“Kan saya tidak terdaftar kartu tani, jadi saya kalau beli pupuk itu pupuk non subsidi karena saya tidak mendapatkan pupuk subsidi. Tapi biasanya saya dapat jatah dari Mas Joko (Nama Disamarkan) pupuk subsidi, jadi saya membeli pupuk subsidi ke*

*dia.*” (Wawancara dengan Mbah Marsih di Desa Sambirejo, 02 September 2024, 12.35 WIB).

Dalam pernyataan di atas, meskipun dapat membantu petani lain yang tidak mendapatkan pupuk subsidi, tetapi hal ini bertentangan dengan tujuan awal program. Kebijakan pupuk subsidi di rancang pemerintah untuk petani kecil yang terdaftar di RDKK. Praktik ini menciptakan pasar gelap pupuk subsidi, di mana pupuk dijual dengan harga yang melampaui harga subsidi namun masih dibawah harga nonsubsidi. Praktik ini juga mencerminkan celah dalam pengawasan program baik dari tingkat desa maupun Dinas Pertanian. Seharusnya pupuk yang tidak diambil oleh penerima resmi dapat dikelola melalui mekanisme yang lebih formal dan transparan untuk memastikan distribusi ulang sesuai dengan aturan yang berlaku.

## 2. Fenomena Lebih Salur Akibat Pendataan Ganda

Adanya permasalahan lebih salur ini menambah permasalahan pada proses distribusi pupuk subsidi. Pendataan penerima pupuk subsidi yang tidak akurat menyebabkan alokasi pupuk melebihi kebutuhan faktual.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Surya Selaku Dinas Pertanian Kabupaten Pati:

*“Berbicara kevalidan, untuk mendapatkan data yang valid, temen-temen penyuluh sangat sulit karena pemerintah pusat tidak memfasilitasi itu. Contohnya pada saat pendaftaran yang dibutuhkan yang dibutuhkan itu KTP dan SPPT. Terdapat temuan dari 120rb NIK ada sekitar 7000 NIK tidak melakukan penebusan pupuk dikarenakan kegandaan data dan menyebabkan alokasi tidak sesuai dengan kebutuhan”.* (Wawancara Bapak Surya Selaku Ketua Tim Pupuk dan Pembiayaan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Pati, 11 Oktober 2024, 08.50 WIB).

Berdasarkan pernyataan diatas, terdapat fenomena permasalahan lebih salur yang terjadi akibat ketidakvalidnya data penerima subsidi akibat adanya duplikasi data dalam sistem pendataan penerima pupuk, termasuk pencatatan yang tidak akurat, seperti mendaftarkan beberapa KTP dalam satu keluarga atau menerbitkan SPPT yang tidak sesuai mengakibatkan alokasi pupuk yang lebih besar dari yang dibutuhkan oleh petani. Hal ini berdampak pada distribusi yang tidak tepat sasaran, di mana beberapa petani menerima pupuk yang tidak mereka butuhkan.

### 3. SDM Petani Rendah

Pengetahuan sebagian petani mengenai penggunaan pupuk subsidi masih terbatas. Terdapat beberapa petani Di Desa Kuryokalangan salah dalam pemahaman prosedur kebijakan program pupuk subsidi.

Berdasarkan wawancara Bapak Jumani Petani Desa Kuryokalangan:

*“Saya pikir kalau pupuk tidak saya ambil dimusim tanam ini, itu bisa saya tabung terlebih dahulu dikios, nanti bakal saya ambil kalau saya butuh tetapi ternyata tidak bisa begitu ketika saya mau ambil, ternyata pupuk saya sudah hangus.”* (Wawancara Bapak Jumani selaku Petani Desa Kuryokalangan, 03 Oktober 2024, 16.13 WIB)

Adapun penyampaian oleh Bapak Widodo sebagai Ketua Kelompok Tani di Desa Kuryokalangan:

*“Hal ini sudah disosialisasiaka, tapi masih ada petani yang benar-benar memahami langka-langkahnya. Jadi, masih ada beberapa petani yang pupuk tidak diambil. Kalau sekali tidak diambil masih bisa saya bantu. Tapi kalau musim tanam kedua masih tidak diambil lagi saya lepas tangan tidak bisa bantu lagi. Dan akibatnya petani ini terbacklish data penerima subidi karena dikira tidak membutuhkan bantuan lagi. Dan kemarin ada mba, ini saya cerita ada petani kesini mau ambil pupuk subsidi. Sebelumnya sudah saya ingatkan tapi tidak menghiraukan alhasil namanya terbacklish dan harus mengurus lagi di BPP Kecamatan”.* (Wawancara Bapak Widodo selaku Ketua Kelompok Tani Desa Kuryokalangan, 04 Oktober 2024, 14.36 WIB)

Berdasarkan hasil pernyataan diatas, bahwa masih banyak petani yang belum sepenuhnya memahami prosedur cara penggunaan pupuk subsidi yang tepat. Adanya kesalahpahaman yang umum terjadi adalah anggapan bahwa pupuk subsidi yang tidak diambil pada musim tanam ini masih bisa diambil pada musim tanam berikutnya. Padahal, jika pupuk subsidi tidak diambil dalam periode yang telah ditentukan, petani akan dianggap tidak membutuhkannya lagi, sehingga namanya akan terhapus dari daftar penerima pupuk subsidi di masa mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada sosialisasi, pemahaman petani mengenai hal tersebut masih terbatas.

Selain itu juga kurangnya pemahaman petani mengenai aplikasi pupuk yang tepat. Hal tersebut tidak hanya berdampak pada kuantitas pupuk yang diberikan, namun juga cara penggunaanya. Dibeberapa petani cenderung memberikan pupuk,

terutama urea, secara berlebihan pada tanaman karena tidak memahami kebutuhan nutrisi tanaman yang sebenarnya.

Disampaikan oleh Bapak Ali Mustofa Selaku Pegiat Pertanian di Desa Kuryokalangan:

*“Banyak petani disini yang masih kurang paham mengenai aplikasi pupuk. Mereka berfikir semakin banyak pupuk, semakin subur tanaman. Padahal, sebenarnya itu justru bisa merusak tanah. Tanpa pemahaman yang cukup, mereka jadi asal memberi pupuk, terutama urea, secara berlebihan.”* (Wawancara Bapak Ali Mustofa selaku Pegiat Pertanian Desa Kuryokalangan, 03 Oktober 2024, 09.42 WIB)

Berdasarkan pernyataan diatas juga adanya ketidakpahaman petani Di Desa Kuryokalangan dalam hal penggunaan pupuk itu sendiri. Banyak petani beranggapan bahwa semakin banyak pupuk yang diberikan, semakin subur tanah dan tanaman. Padahal penggunaan pupuk secara berlebihan justru dapat merusak struktur tanah dan mengganggu kesehatan tanaman jadi menguning.

#### 4. Kurangnya Kontribusi Pemerintah Desa

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam program pupuk subsidi. Pemerintah Desa Kuryokalangan dinilai kurang aktif keterlibatannya. Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan Gabus menilai Pemerintah Desa Kuryokalangan kurang dalam kepedulian terhadap program ini menyebabkan penyuluh harus bekerja lebih keras untuk memastikan program berjalan sesuai rencana.

Berdasarkan wawancara Ibu Eny selaku Penyuluh Pertanian Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati:

*“Akan tetapi Pemdes Desa Kuryokalangan kurang aktif dalam pertanian termasuk juga dalam program ini, tapi hal itu tak juga jadi masalah karena kita bisa langsung menghubungi dan berkolaborasi dengan kelompok tani disana.”* (Wawancara Ibu Eny Koordinator Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan Gabus, 09 Oktober 2024, 07.30 WIB).

Berikutnya wawancara dengan Bapak Jumani Petani Desa Kuryokalangan:

*“Kamituwo desa ini dalam pertanian tidak terlalu mengurus mba, contohnya perairan sawah tidak dibuat jadi rata-rata petani disini hanya mengandalkan tadah hujan hasilnya pertanian tidak maksimal apalagi ini musim kemarau panjang jadi ya kita sebagai petani hanya bisa pasrah saja.”* (Wawancara Bapak Jumani Petani Di Desa Kuryokalangan, 03 Oktober 2024, 16.15 WIB).

Diketahui dari hasil wawancara kedua narasumber diatas bahwa pemerintah Desa Kuryokalangan kurang aktif dalam mengelola pertanian dan juga program pupuk subsidi. Hal ini seharusnya tidak boleh terjadi karena kesejahteraan petani sangat bergantung pada dukungan dan kontribusinya dalam memastikan kelancaran program. Dengan adanya keterlibatan aktif pemerintah desa dapat membantu petani dalam memaksimalkan hasil pertanian untuk mencapai hasil produktifitas sehingga dapat mensejahterakan petani Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, implementasi program pupuk bersubsidi di Desa Kuryokalangan dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mendukung produktivitas pertanian melalui aksesibilitas pupuk yang lebih terjangkau bagi petani. Program ini dirancang secara *top-down*, dimana pelaksanaannya mengacu pada regulasi Surat Keputusan Bupati dan alokasi kuota melalui RDKK. Dalam pelaksanaannya, peran berbagai aktor seperti pemerintah desa, kelompok tani, penyalur pertanian, penyuluh pertanian, dan Dinas Pertanian menjadi kunci keberhasilan distribusi pupuk bersubsidi kepada petani yang berhak menerima. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi program pupuk bersubsidi di Desa Kuryokalangan Tahun 2023 - 2024 ini memiliki dinamika yang dapat dianalisis menggunakan teori kebijakan dari Grindle, yang mencakup aspek isi kebijakan serta lingkungan implementasi:

Pada aspek isi kebijakan (*content of policy*), program pupuk bersubsidi memberikan manfaat nyata bagi petani, terutama dalam menekan biaya produksi. Petani kecil yang bergabung dalam kelompok tani merasakan manfaat ini melalui aksesibilitas pupuk dengan harga subsidi. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan program ini. Salah satunya adalah adanya beberapa ketidaksesuaian antar kuota pupuk yang disubsidi dengan spesifik kebutuhan petani Desa Kuryokalangan. Selain itu, keterlambatan distribusi pupuk pada beberapa kesempatan mengakibatkan gangguan jadwal tanam petani. Hal ini diperparah oleh kurangnya pemahaman sebagian petani tentang cara penggunaan pupuk yang tepat, sehingga efektivitas penggunaannya belum maksimal.

Pada aspek lingkungan implementasi (*context of implementation*), relasi antar aktor yang terlibat menjadi faktor kunci keberhasilan program. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator yang membantu menyampaikan informasi kepada kelompok tani, meskipun mereka dinilai kurang aktif. Penyuluh pertanian, kelompok tani, penyalur pupuk dan Dinas Pertanian memainkan peran sentral dalam memastikan ketersediaan pupuk sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan. Namun, tantangan lain muncul, seperti koordinasi yang kurang optimal antara petani, kelompok tani, dan penyalur. Hal ini kadang menimbulkan miskomunikasi terkait jadwal distribusi pupuk.

Partisipasi petani juga menjadi perhatian, karena tidak semua petani aktif terlibat dalam program ini.

### **B.Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dijalankan, peneliti akan memberikan berbagai saran, yaitu:

1. Kepada aktor stekholder yang menangani atau terlibat dalam kebijakan pupuk bersubsidi diharapkan selalu patuh dalam menjalankan program ini sesuai dengan kebijakan yang ada tanpa terpengaruh kepentingan pribadi atau ancaman-ancaman yang ada.
2. Kepada penyuluh pertanian harus memiliki kemampuan yang baik dalam mengayomi kelompok tani juga petani. Karena penyuluh pertanian adalah lembaga yang berhubungan langsung dengan penerima pupuk subsidi supaya segala informasi mengenai program ini dapat dipahami oleh petani sehingga dapat meminimalisir ketidakpahaman.
3. Kepada Pemerintah Desa diharapkan lebih aktif serta lebih berkontribusi dan berkolaborasi dengan pihak terkait agar program ini dapat berjalan sesuai rencana sehingga mensejahterakan para petani di Desa Kuruyokalangan.
4. Kepada petani agar lebih memahami dampak negatif pupuk kimia bagi tanah karena program pupuk yang diberikan adalah non-organik dan mempertimbangkan agar penggunaan pupuk organik, seperti Bio Saka dan lain sebagainya, untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian. Hal ini selaras dengan tujuan pemerintah dalam mendukung pertanian berkelanjutan, khususnya Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2017). Malang : UB Press. *Kebijakan pendidikan menengah dalam perspektif governance di Indonesia.*
- Anbiya, H. S. (2024). Program Kartu Tani: Analisis Hambatan dari Perspektif Interest Group di Kab. Majalengka Tahun 2020-2023. *Journal of Politic and Government Studies*, 13(3), 320-334.
- Arifin, D. J. (2022). Efektivitas Program Kartu Tani Pada Tata Kelola Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (Kimap)* 3. 6, 1757-1768.
- Chakim, M. L. (2019). Pengaruh implementasi kartu tani terhadap efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. *Jurnal Pangan*, 28(3), 171-182.
- Citra, N. A. (2024). Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, . *Evaluasi Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Gresik*, 2(3), 143-152.
- Suwartono, M. (2014). *Dasar- Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Syahrudin, S. (2020). *Implementasi Kebijakan Publik ; Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Bandung: Nusamedia.
- Gayatri, S. (2021). Problematika Implementasi Program Kartu Tani Di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis JEPA*, 5(3), 1-12.
- Grindle, M. (1980). United Kingdom: Princeton University Press,. *Politics and Implementation in the Third World*.
- Hani.U., Y. T. (2024). *Problem Implementasi Program Kartu Tani dalam Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Jepara*, 12(1), 55-72.

- Hariato, S. &. (2023). . Jurnal Imiah Management Agribisnis (Jimanggis), . *ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN DAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN MUARA ENIM*, 4(1), 11-18.
- Helmi, A. A. (2024). Perbaikan Tata Kelola Perberasan Nasional. *Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika*, 6,1:834-837.
- Kurnia, F. M. (2021). Kurnia, F. M., & Purwanti, E. Y. (2021). Efektifitas Dan Benefit Incidence Analysis Kebijakan Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. . *Diponegoro Journal of Economics*, 9(2), 66-78.
- Kurniatin, T. S. (2023). Analisis Distribusi Pupuk Bersubsidi bagi Petani di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang. *Respon Publik*, 17 (13), 13-22.
- Patarai, M. (2020). *Kebijakan publik daerah: Posisi dan dimensinya dalam*, De La Macca.
- Pertanian, D. J. (2024, 5 12). Jamin Kemudahan Pupuk Bersubsidi, Kementan Sosialisasikan Dua Aturan Baru.
- Rambe, B. &. (2022). *Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Sektor Pertanian*. Jakarta: PT Granmedia Pustaka Utama.
- Saputri, D. D. (2024). Journal of Political and Development Issues,. *Kebijakan Pupuk Bersubsidi Dalam Mendorong Pertanian Berkelanjutan di wilayah perbatasan Kabupaten Merauke.*, 1(1), 19-33.
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Kebijakan*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Suhamah, E. &. (2024). Implementasi Program Kartu Tani dalam Distribusi Pupuk. *Journal of Sustainable Agribusiness*, 3(1), 16-20.
- Tomunu, B. d. (2021). Strategi Peningkatan Produktivitas Pertanian : Studi Kasus di Jawa Tengah . *Jurnal Pertanian*, 45-56.
- Tyas, W. M. (2024). Tyas, W., Rohmah, M., & Lestari, I. (2024). Implementasi Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Di Tingkat Petani Kecamatan Buay Pemuka Peliung Ditinjau Dari Segi Ketepatan Tempat, Jumlah, Harga, Jenis, Waktu Dan Mutu. *SIMBIOSIS: Jurnal Sains Pertanian*, 1(1), 1-7.
- Widodo, S. (2012). *Politik Pertanian*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

**LAMPIRAN****A. Dokumen Wawancara****Dokumentasi Bersama Bapak Surya Dispertan****Dokumentasi Bersama Ibu Eny BPP**



**Dokumentasi Bersama Bapak Hayyin Sekretaris  
Desa Kuryokalangan**



**Dokumentasi Bersama Bapak Widodo Ketua Kelompok Tani  
Desa Kuryokalangan**



**Dokumentasi Bersama Bapak Kamijan Kios Pupuk  
Desa Kuryokalangan**



**Dokumentasi Bersama Bapak Ali Mustohofa  
Pegiat Pertanian Desa Kuryokalanagan**



**Dokumentasi Bersama Bapak Ahmad Fakhri  
Petani Desa Kuryokalangan**



**Dokumentasi Bersama Bapak Darno  
Petani Desa Kuryokalangan**



Gambar Kios yang menjual Pupuk Subsidi



Gambar Kios yang Menjual Pupuk Subsidi



**Gambar Lahan Padi Sawah Desa Kuryokalangan**



**Gambar Lahan Padi Sawah Desa Kuryokalangan**

**PEMERINTAH KABUPATEN PATI**  
**DINAS PERTANIAN**

Jalan P. Diponegoro No. 23, Pati, Jawa Tengah, Kode Pos 59113  
 Telepon : (0295) 381418 e-mail : [disperant@paitkab.go.id](mailto:disperant@paitkab.go.id)  
 Fax : (0295) 381418 Website : <http://disperant.paitkab.go.id>

---

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertandatangan dibawah ini  
 Nama : Ir. Nikentri Meiningrum, MSi  
 NIP : 19680501 199803 2 006  
 Jabatan : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pati

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa:  
 Nama : Alfina Shofatun Nisa  
 NIM : 2006016074  
 Jurusan : Ilmu Politik Universitas

Telah melaksanakan kegiatan pengambilan data dan wawancara di Dinas Pertanian Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 11 Oktober 2024 untuk keperluan Penelitian Skripsi yang berjudul "Implementasi Program Pupuk Bersubsidi di Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati".

Pati, 24 Oktober 2024  
  
 Ir. Nikentri Meiningrum, MSi  
 NIP. 19680501 199803 2 006

### Lampiran Surat Izin Penelitian dari Dinas Pertanian Kabupaten Pati

**DINAS PERTANIAN KABUPATEN PATI**  
**BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) GABUS**  
Jalan Raya Gabus – Tambakromo No. 10 Kec. Gabus Kab. Pati

---

**SURAT KETERANGAN**  
NO : 014.190/X/2024

Yang bertandatangan dibawah ini:  
 Nama : Eny Prasetyowati BL, S.P  
 Jabatan : Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kec. Gabus, Pati.


Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa:  
 Nama : Alfina Shofatun Nisa  
 NIM : 2006016074  
 Jurusan : Ilmu Politik

Telah selesai melaksanakan penelitian dan pengambilan data di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 09 Oktober 2024 untuk memperoleh data penelitian dalam rangka Penelitian Skripsi yang berjudul "Implementasi Program Pupuk Bersubsidi di Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pati, 11 Oktober 2024  
 Koordinator BPP Kec. Gabus  
  
 ENY PRASEYOWATI BL, S.P  
 NIP. 197010142008012008

### Lampiran Surat Izin Penelitian dari Badan Penyuluh Pertanian



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
KECAMATAN GABUS  
DESA KURYOKALANGAN**  
Jl. Gabus - Tilogayu Km. 02 Kode Pos 59173  
Telepon : - email : [kuryokalangan@patidesa.go.id](mailto:kuryokalangan@patidesa.go.id)  
Faksimile : - Website : <http://kuryokalangan.pati.desa.go.id>


Nomor : 420/431 Kepada  
Lampiran : - Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Negeri Walisongo  
Perihal : Penelitian di - Semarang

Dengan Hormat,  
Dasar Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri  
Walisongo Nomor : 2448 / Un.10.6/DI/KM.05.01/09/2024 Tanggal 17 September 2024  
perihal : perihal Ijin Penelitian. Maka dengan ini kami menerangkan bahwa :

Nama : **Aifna Shofiatun Nisa**  
Alamat : Desa Sambirejo RT 04 RW 03 Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.  
Pekerjaan : Wiraswasta  
NIM : 2006016074  
Jurusan : Ilmu Politik

Benar-benar telah mengadakan Penelitian dalam rangka Menyusun Skripsi dengan Judul :  
"IMPLEMENTASI PROGRAM PUPUK BERSUSIDI DIDESA KURYOKALANGAN  
KECAMATAN GABUS KABUPATEN PATI ".  
Lokasi : Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.  
Waktu : 19 September 2024 s.d. 08 Oktober 2024

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Patih, 14 Oktober 2024  
KEPALA DESA KURYOKALANGAN  
  
**IDI HERMANTO, A.Md.**

**Lampiran Izin Penelitian dari Desa Kuryokalangan**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### B. Identitas Diri

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. Nama                  | : Alfina Shofiatun Nisa  |
| 2. NIM                   | : 2006016074   |
| 3. Tempat, Tanggal Lahir | : Pati, 17 Oktober 2001  |
| 4. Alamat                | : Dk. Biroto Rt 004 / Rw 003 Desa Sambirejo<br>Kecamatan Gabus Kabupaten Pati      |
| 5. Jenis Kelamin         | : Perempuan  |
| 6. Agama                 | : Islam  |
| 7. No. Hp                | : 085866555191   |
| 8. Email                 | : <a href="mailto:alfinashofiatunnisa@gmail.com">alfinashofiatunnisa@gmail.com</a> |

### C. Riwayat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Tahun Kelulusan
1.	TK Pertiwi	2008
2.	SDN Sambirejo 01	2014
3.	MTs Abadiyah	2017
4.	MA NU Banat Kudus	2020